



**ANALISIS EFEKTIVITAS KOLABORASI PENTAHELIX
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun oleh :

PARTIWI

NIM : 221003631010564

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2025



**ANALISIS EFEKTIVITAS KOLABORASI PENTAHELIX
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun Oleh :

PARTIWI

NIM : 221003631010564

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN 1



ANALISIS EFEKTIVITAS KOLABORASI PENTAHELIX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

PARTIWI

NIM : 221003631010564

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang, September 2025

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Rini Werdiningsih, M.S
NUPTK : 4353737638230043

Dr. Hj. Tri Lestari Hadiati, M. Si
NUPTK : 2850743644230092

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Prof. Dr. Rini Werdiningsih, M.S
NUPTK : 4353737638230043

LEMBAR PERSETUJUAN 2



ANALISIS EFEKTIVITAS KOLABORASI PENTAHELIX DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

PARTIWI

NIM : 221003631010564

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi Magister Administrasi Publik telah disetujui oleh Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang, September 2025

Menyetujui,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Rini Werdiningsih, M.S NUPTK : 4353737638230043	Ketua Tim Penguji Pembimbing Pendamping Utama	1
2	Dr. Hj. Tri Lestari Hadiati, M. Si NUPTK : 2850743644230092	Dosen Penguji 2	2
3	Dr. Charis Christiani, M. Si NUPTK : 7650745646230082	Dosen Penguji 3	3

Mengesahkan,

Dekan Fisip Untag Semarang

Prof. Dr. Rini Werdiningsih, M.S
NUPTK : 4353737638230043

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul analisis efektivitas kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, September 2025

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

Partiwi
NIM : 221003631010564

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan keharibaan Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk Tesis yang berjudul :

Analisis Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Penulisan Tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Segala daya dan upaya telah penulis lakukan agar karya tulis dalam bentuk tesis ini memenuhi kriteria penulisan ilmiah sehingga mempunyai responsibilitas yang kuat di muka sidang, dengan tetap menyadari kekurangan yang ada di dalam penulisan karya tulis dalam bentuk tesis ini. Kemampuan numerik yang penulis miliki merupakan salah satu dari sekian faktor untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi dalam penulisan penelitian ini. Namun saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan agar karya tulis dalam bentuk tesis ini mendekati kesempurnaan.

Selesainya karya tulis dalam bentuk tesis ini tidak dapat lepas dari kontribusi, sumbangsih, bantuan dan *support* baik dalam bentuk pikiran, gagasan, ide dan mungkin materi dari pelbagai pihak yang penulis butuhkan.

Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada beliau yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M. Si selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Rini Werdiningsih, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan dosen

pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan karya tulis ini.

3. Ibu Dr. Tri Lestari Hadiati M. Si selaku Kaprodi M.A.P dan dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan karya tulis dalam bentuk tesis ini memenuhi kaidah keilmiahan di muka sidang.
4. Ibu Dr. Charis Christiani, M. Si selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan saran-saran untuk penyempurnaan karya tulis dalam bentuk tesis ini
5. Segenap Civitas Akademika (Dosen dan TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang memberikan pelayanan keadministrasian dalam penyusunan laporan tesis ini.
6. Seluruh informan yang menjadi objek penelitian, yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan informasi tentang efektivitas kolaborasi *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
7. Seluruh keluarga besar kami yang mensupport tiada lelah kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis.

Akhir kata semoga Tuhan yang Maha Esa membalas amal baik kita semua.

Aamiin

Semarang, 2025

Penulis

MOTTO

- ❖ “Jangan takut bertemu kegagalan karena keberhasilan menunggumu di masa depan.”
- ❖ “Jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup.”
Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci untuk sukses.”
- ❖ “Jangan lelah berjuang, pasti akan ada hasil dari yang kita perjuangkan.”
- ❖ “Teruslah bergerak meski perlahan. Dengan begitu masa depan akan lebih mudah untuk didapatkan.”

Karya Tulis dalam bentuk Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga besar bani Mulyono tercinta
- Anak-anaku belahan jiwaku dan cucu kesayanganku
- Sahabat – sahabatku terima kasih atas suport dan kebersamaanya

ABSTRAK

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang memiliki ragam bencana baik bencana alam dan bencana non alam. Upaya penanggulangan bencana melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa. Keterbatasan kapasitas, sumberdaya ataupun jaringan menjadi pendorong untuk melakukan kolaborasi. Rumusan masalahnya bagaimana efektivitas kolaborasi unsur *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas kolaborasi unsur *pentehelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teknik Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Proses kolaborasi pentahelix merupakan kerjasama dari para subyek yang dalam posisi tidak setara atau model kolaborasi *inequal kolaboratif*, yang menggambarkan bentuk proses kolaborasi yang struktur pengelolaannya hierarkis, prinsip pelaksanaan *imperative, top down*, koordinasinya direktif. Hal ini terbukti dengan belum efektifnya beberapa unsur kolaborasi pentahelix yaitu akademisi yang belum memberikan kontribusi nyata sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk penanggulangan bencana. Beberapa faktor pendorong efektivitas dalam kolaborasi pentahelix adalah kepercayaan antar pemangku kepentingan, komitmen bersama, Keterbukaan komunikasi antar pelaku dalam berbagi informasi. Sedangkan faktor penghambat efektivitas dalam kolaborasi adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan kepentingan antar pihak, keterbatasan sumber daya dan sering gonta ganti pemangku wilayah.

Langkah yang dilakukan agar kolaborasi dapat berjalan maksimal adalah meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan melalui pertemuan intens dengan melibatkan seluruh forum pentahelix yang ada. Pendekatan intens terhadap dunia usaha melalui program sertifikasi yang memberikan insentif bagi dunia usaha. Optimalisasi peran akademisi melalui pendekatan intens oleh pemangku wilayah, Serta pelibatan komunitas berperan sebagai titik kontak antar pemangku kepentingan agar semua proses kerjasama berjalan lancar dan media massa dapat mengambil peran sebagai watchdog untuk ikut mengontrol, mengoreksi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan.

Kata Kunci : Kolaborasi, Pentahelix, Musrenbangkel, Penanggulangan Bencana, Mitigasi Struktural, Mitigasi Non Struktural

ABSTRACT

Ngaliyan District is one of the districts in Semarang City that is prone to a variety of disasters, both natural and non-natural. Disaster management efforts are carried out through pentahelix collaboration between the government, community, business, academics, and the mass media. Limited capacity, resources, and networks are driving this collaboration. The problem formulation is how effective is this collaboration?pentahelix In disaster management efforts in Ngaliyan District, Semarang City, what are the inhibiting and supporting factors for the effectiveness of collaboration between elements?pentehelix in disaster management efforts in Ngaliyan District, Semarang City.

This research uses a qualitative descriptive method in accordance with the goals and objectives to be achieved. The research technique used was interviews, documentation, and field observations. The pentahelix collaboration process is a collaboration between subjects in unequal positions, or a collaborative model.collaborative inequality, which describes the form of collaboration process whose management structure is hierarchical, the implementation principlesimperative, top down, the coordination is directive. This is evidenced by the ineffectiveness of several elements of pentahelix collaboration, namely academics who have not made a real contribution as conceptors to develop new concepts, theories, and models for disaster management. Several factors driving the effectiveness of pentahelix collaboration are trust between stakeholders, shared commitment, and open communication between actors in sharing information. Meanwhile, factors inhibiting the effectiveness of collaboration are a lack of coordination between institutions, differing interests between parties, limited resources, and frequent changes in regional stakeholders.

Steps taken to ensure optimal collaboration include increasing trust between stakeholders through intensive meetings involving all existing pentahelix forums. An intensive approach to the business world is implemented through a certification program that provides incentives for businesses. Optimizing the role of academics through an intensive approach by regional stakeholders. Community involvement acts as a point of contact between stakeholders to ensure all collaboration processes run smoothly. The mass media can play a watchdog role in monitoring and correcting anything that does not comply with regulations.

Keywords: Collaboration, Pentahelix, Musrenbang, Disaster management, Structural mitigation Non-structural mitigation

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN 1	3
LEMBAR PERSETUJUAN 2	4
LEMBAR PERNYATAAN	5
KATA PENGANTAR	i
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Ruang Lingkup Permasalahan	11
1.3. Perumusan Masalah	12
1.4. Tujuan Penelitian	13
1.5. Manfaat Penelitian.	13
1.5.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.5.2. Manfaat Praktis	14
BAB II	16
KAJIAN LITERATUR	16
2.1. Penelitian Terdahulu	16
2.2. Kajian Pustaka.	32
2.2.1. Konsep Administrasi Publik.....	32
2.2.2. Manajemen Publik	35
2.2.3. Konsep dan Teori Efektivitas	43
2.2.4. Kolaborasi	47
2.2.5. Model Pentahelix	53
2.2.6. Penanggulangan Bencana.....	57
2.2.7. Mitigasi Bencana	64
2.3. Kerangka Teori atau Pemikiran	66
BAB III	69
METODE PENELITIAN	69
3.1. Pendekatan Penelitian	69
3.2. Fokus dan lokus Penelitian.....	70

3.2.1. Fokus Penelitian.....	70
3.2.2. Lokus Penelitian	71
3.2.3. Data dan sumber Data	71
3.2.4. Tehnik Pengumpulan Data	72
3.2.5. Informan Penelitian.....	74
3.2.6. Tehnik Analisis Data.....	76
3.2.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	81
BAB IV	83
GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGALIYAN	83
4.1.1. Profil Kecamatan Ngaliyan	83
4.1.2. Profil Informan	129
4.1.3. Regulasi Implementasi Pentahelix	134
BAB V	137
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	137
5.1 Hasil Penelitian.....	137
5.1.1. Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan	137
5.1.2. Faktor faktor penghambat dan pendorong dari efektivitas kolaborasi unsur pentehelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan	194
5.2. Pembahasan	196
5.2.1. Kajian Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	196
5.2.2. Kajian Faktor pendorong dan faktor penghambat dari efektivitas kolaborasi unsur <i>pentehelix</i> dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang	198
BAB VI.....	213
KESIMPULAN DAN SARAN.....	213
6.1 Kesimpulan.....	213
6.2 Saran.....	215
DAFTAR PUSTAKA.....	218

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Kolaborasi Tahun 2023	4
Tabel I. 2	Kolaborasi Tahun 2024	7
Tabel 1. 3	Kolaborasi 2025	10
Tabel 2. 1	Daftar Penelitian terdahulu	26
Tabel 3. 1	Jadwal Kegiatan Penelitian	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bencana Indonesia periode Januari 2025 – 20 Mei 2025.....	3
Gambar 2	Triplehelix	67
Gambar 3	Quadruplehelix.....	68
Gambar 4	Pentahelix	70
Gambar 5	Alur Kerangka Teori atau Pemikiran	85
Gambar 6	Proses Analisis Data	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.¹

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan rangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum

terjadi bencana, pada saat tanggap darurat atau sesudah terjadinya bencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang–Undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Selain Undang-undang, konstitusi lain yang mengatur tentang upaya penanggulangan bencana juga diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, beberapa Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BNPB dan juga Peraturan Daerah yang memberikan legitimasi kegiatan penanggulangan bencana.

Upaya penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara secara global dalam hal risiko bencana dengan nilai *indeks* risiko sebesar 41,13 dibawah Filipina (*World Risk Index*, 2024). Tidak hanya potensi multi ancaman bahaya yang tinggi, namun juga tingkat kerentanan termasuk kerentanan fisik yang turut mengakibatkan tingginya

tingkat risiko terhadap bencana. Saat ini, sekitar 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana, dengan total populasi yang berisiko sekitar 104,9 juta orang (33% dari total populasi Indonesia).

Berdasarkan data Inarisk yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bencana Alam yang terjadi selama periode Januari 2025 sampai dengan 20 Mei 2025 terdapat 1.110 kejadian. Kejadian bencana alam yang mendominasi adalah Bencana Hidrometeorologi 99,37% dan bencana geologi 0,63% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, karhutla dan erupsi gunungapi. Dampak akibat kejadian bencana yang terjadi selama periode di atas mengakibatkan kerusakan yang cukup masiv yang menyebabkan rumah warga, sarana pendidikan, rumah ibadah, fasilitas penyelenggaraan kesehatan kantor dan jembatan mengalami kerusakan. Disamping kerusakan sarana infrastruktur, bencana alam juga mengakibatkan banyaknya korban jiwa, korban hilang, luka-luka dan menderita serta mengungsi. Untuk detail kejadian dan dampak dapat di lihat dari gambar berikut ini.



Gambar 1. Bencana Indonesia Periode Januari 2025 s/d 20 Mei 2025

Seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Bencana tersebut dapat berupa bencana alam, non-alam, maupun sosial. Begitu juga Kecamatan Ngaliyan yang memiliki luas 42,99 KM² dengan jumlah penduduk 143.899 jiwa. Kontur wilayah berbukit dan dataran rendah serta terlantasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Plumbon seringkali mengakibatkan bencana banjir. Selain bencana banjir, bencana lain yang sering terjadi diantaranya tanah longsor dan kebakaran dan bencana sosial seperti tawuran antar pelajar. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis (pengkajian) risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian penganggarannya dan melibatkan seluruh komponen. Berikut adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Ngaliyan dalam upaya penanggulangan bencana dari porsi anggaran tahun 2023 – 2025.

Tabel 1. 1 Kolaborasi Tahun 2023

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
A KEGIATAN FPRB KEC. NGALIYAN 2023					
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus FPRB	Kelurahan Wonosari	Meningkatkan Pengetahuan tentang bencana	10.000.000	kerjasama BPBD Kota dan PMI Kota Semarang
2	Apel Relawan sebanyak 500 orang dan	TPA Jatibarang	Suport Relawan dan Pendanaan	45.000.000	kerjasama dengan BPBD Prov, DLHK

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
	Penanaman 2300 pohon				Prov, DLH Kota Semarang
3	Sosialisasi Petabencana.id	Kecamatan, kelurahan, SD Wonosari 1,2,3, SD Ngaliyan Kampus, SMP Texmaco, SMP N 23, SMP N 44,	Pendampingan Fasilitator	3.500.000	kerjasama BNPB, USAID yayasan peta bencana
4	Gelar Pasukan Relawan se Kec. Ngaliyan dan tanam pohon 1.328, bersih sungai dan peduli lingkungan 250 orang dari 15 ormas	Kecamatan Ngaliyan	Suport Relawan dan Pendanaan	15.000.000	Kerjasama dengan PT.Sango, PT Indofood ,BPBD Kota Semarang, Basarnas
5	Apel Relawan dan Penanaman Pohon serta kegiatan bersih sungai	Kecamatan Ngaliyan	Bantuan Uang	1.500.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
6	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Bantuan Uang	1.000.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
7	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Mie Instant	1.379.000	PT. Indofood Sukses Makmur Noedle
8	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Bantuan Uang	2.000.000	CV. Hamas
	Sub Total FPRB Kec. Ngaliyan			79.379.000	
B	KEGIATAN KEC. NGALIYAN 2023				
1	Jembatan RW 10	Kel. Podorejo		1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
2	Saluran Air Pasangan Batu	Kel. Podorejo		1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
3	Saluran Air Pasangan Batu	Kel. Podorejo		1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
4	Pembangunan Talud Bronjong	Kel. Bringin		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
5	ban dalam ukuran 900	Kel. Kalipancur Mayangsari		5.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	ban dalam	Kel. Kalipancur		1.200.000	Dinas

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
	ukuran 700	Mayangsari			Kebudayaan dan Pariwisata
7	pelampung	Kel. Kalipancur Mayangsari		11.731.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	pelindung siku dan lutut	Kel. Kalipancur Mayangsari		7.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	pelindung kepala(helm)	Kel. Kalipancur Mayangsari		7.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	sepatu karet	Kel. Kalipancur Mayangsari		1.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Talud Tebing Candisari RW 4	Kel Wonosari		511.992.000	Dinas Pekerjaan Umum
12	Perkuat Talud Bronjong	Kel Wonosari		500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
13	Pembuatan Talud Sungai	Kel Wonosari		1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
14	Peninggian Jembatan	Kel. Wates		600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
15	Peninggian Jembatan dan Normalisasi Sungai Sikere	Kel. Wates		300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Sub Total Kecamatan			8.446.423.500	
C	KEGIATAN DUNIA USAHA TH 2023				
1	Apel Relawan dan Penanaman Pohon serta kegiatan bersih sungai	Kecamatan Ngaliyan	Bantuan Uang	1.500.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
2	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Bantuan Uang	1.000.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
3	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Mie Instant	1.379.000	PT. Indofood Sukses Makmur Noedle
4	Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana	Bandungan	Bantuan Uang	2.000.000	CV. Hamas
	Sub Total Dunia Usaha			5.879.000	
1	Peliputan Kegiatan apel relawan dan	Kec, Ngaliyan	Penebalan Informasi		Suara Merdeka

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
	penanaman pohon di TPA Jatibarang				
2	Peliputan Kegiatan gelar pasukan relawan kecamatan ngaliyan dalam rangka antisipasi bencana	Kec, Ngaliyan	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
3	Peliputan kegiatan Pelatihan Dapur Umum	Kec, Ngaliyan	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
Grand Total				8.531.681.500	

Sumber : <https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/>

Sedangkan akumulasi kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Kecamatan Ngaliyan dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Kolaborasi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
A KEGIATAN FPRB KEC. NGALIYAN TH 2024					
1	Revitalisasi KSB Kel. Purwoyoso dan FPRB Kel Wates	Kel. Wates dan Kel Purwoyoso	Pendampingan Fasilitator	5.000.000	Kegiatan dilaksanakan bareng dengan peningkatan kapasitas Masy terkait dengan Manajemen bencana
2	Pembentukan KSB di Kelurahan Ngaliyan	Kelurahan Ngaliyan	Pendampingan Fasilitator	2.500.000	
3	Pembentukan KSB di Kelurahan Bambankerep	Kelurahan Bambankerep	Pendampingan Fasilitator	2.500.000	
4	Pembentukan KSB di Kelurahan Podorejo	Kelurahan Podorejo	Pendampingan Fasilitator	2.500.000	
5	Kajian Risiko	Kelurahan	Pendampingan		Kerjasama dengan

	Bencana dan Peta BKRK	Ngaliyan	Fasilitator	5.000.000	LPMK dan Kel. Ngaliyan
6	SPAB sasaran SD Wonosari, SD dondong dan SD Kalipancur	SD Wonosari	Meningkatkan pengetahuan ketrampilan anak didik terhadap bencana	3.750.000	Kerjasama dengan LPMK kel wonosari
7	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Halaman Kecamatan Ngaliyan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga	3.000.000	Kerjasama dengan Trantib Kecamatan Ngaliyan
8	Sosialisasi Petabencana.id	SMP N 16, SMP N 18, SMP N 28, SMP N Marsudi Rini, MTS/MA Nurusbayan , MA Darul Ulum, SMK Texmaco, SMK Pelayaran	Pendampingan Fasilitator	3.500.000	kerjasama BNPB, USAID yayasan peta bencana
Sub Total FPRB Kec. Ngaliyan				27.750.000	
B	KEGIATAN KEC. NGALIYAN TH 2024				
	Talud Saluran Air	Kel. Gondorio		300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembuatan Talud Tebing makam Tikung	Kel. Wonosari		250.000.000	Dinas Tata Ruang
	Pembangunan Talud dan Pembangunan Jembatan Sungai Sirendeng	Kel. Wates		5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Talud Sungai Tikung	Kel. Wates		2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan Talud Sungai Ontong	Kel. Wates		1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangn Slrn Air Kel. Bambankerep	Kel. Bambankerep		2.447.400.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Saluran Air	Kel. Bringin		800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Talud Jalan dan Saluran 3 Titik RT 01,05, 06 RW 12	Kel. Purwoyoso		200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Talud Sungai Silandak	Kel. Purwoyoso		200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Talud Jaln Silandak	Kel. Purwoyoso		200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
	Talud saluran	Kel. Ngaliyan			Dinas Pekerjaan

				250.000.000	Umum
Sub Total FPRB Kec. Ngaliyan				12.702.900.000	
C KEGIATAN DUNIA USAHA TH 2024					
1	Bantuan Banjir Wonosari	Kel. Wonosari	Beras, Mie, Gula, Sarden, Telur dll	25.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	Bantuan Banjir Wonosari	Kel. Wonosari	Mie Instant	2.759.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
3	Banjir Tambakaji (Wahyu Utomo)	Kel. Tambakaji	Mie Instant	6.897.500	PT. Indofood Sukses Makmur Noedle
4	Banjir Tambakaji (Wahyu Utomo)	Kel. Tambakaji	Uang	3.000.000	PT. Sango Ceramis Indonesia, T.bk
5	Banjir Tambakaji (Wahyu Utomo)	Kel. Tambakaji	Sarden,telur,minyak goreng,beras	10.000.000	PT Bank Jateng
6	Banjir Tambakaji (Wahyu Utomo)	Kel. Tambakaji	Selimut, dan kebutuhan balita, wanita, obat2an	15.000.000	PMI Kota Semarang
7	Banjir Tambakaji (Wahyu Utomo)	Kel. Tambakaji	Bantuan Uang	20.000.000	Baznas Kota Semarang
2	Dapur Umum	RT 03 RW 08 kelurahan Wonosari	uang dan baju pantas pakai	8.000.000	Diberikan secara langsung kepada korban kebakaran dedi iwan setiawan
Sub Total Kec. Ngaliyan				90.656.500	
D KEGIATAN MEDIA MASSA TH 2024					
1	Peliputan Kejadian Banjir di Wonosari	Kel. Wonosari	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
1	Peliputan Kejadian Banjir di Tambakaji	Kel. Tambakaji	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
1	Peliputan kegiatan SPAB di SD Wonosari	Kel. Tambakaji	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
Grand Total				12.821.306.500	

Sumber : <https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/>

Tabel 1. 3 Kolaborasi Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
A KEGIATAN FPRB KEC. NGALIYAN TH 2024					
1	Peningkatan Kapasitas relawan pelatihan Dapur Umum (DU)	Kecamatan Ngaliyan	Pendampingan Fasilitator	12.500.000	Kerjasama dengan kecamatan Ngaliyan, PT Sango, PT Indofood,

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
					BPBD Kota Semarang, PMI
2	Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana	Kecamatan Ngaliyan	Pendampingan Fasilitator	3.000.000	kerjasama dengan kecamatan Ngaliyan dan PMI
3	Sosialisasi Petabencana.id	SMK 7, SMKN 4, SMKN 10, SMAN 7, SMAN 8, SMAN 13, SMAN16, SMA Bagimu Negeriku, SMA Kesatriyan, SMA Terang Bangsa, UIN Semarang, Puskesmas Ngaliyan, Tambakaji, Purwoyoso	Pendampingan Fasilitator	3.500.000	kerjasama BNPB, USAID yayasan peta bencana
Sub Total FPRB Kec. Ngaliyan				19.000.000	
B KEGIATAN KEC. NGALIYAN TH 2024					
1	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	Kel. Wonosari		1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
2	Perbaikan talut sungai	Kel. Ngaliyan		250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
3	Perkuatan Talud Bronjong	Kel. Wonosari		700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
4	Normalisasi Saluran Air	Kel. Bringin		1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
Sub Total Kec. Ngaliyan				3.450.000.000	
C KEGIATAN MEDIA MASSA TH 2025					
1	Peliputan Kegiatan Dapur Umum yang melibatkan relawan sekota Semarang	Kec. Ngaliyan	Penebalan Informasi		Suara Merdeka
Grand Total				3.469.000.000	

Sumber : <https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd/>

Koordinasi yang solid antara pelbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam konsep *pentahelix*, yaitu kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia

usaha, komunitas, dan media untuk bersama melakukan penanggulangan bencana. Upaya kolaborasi dengan konsep *pentahelix* (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media) mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan bantuan dan operasi pada saat PDB. Pelibatan perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebagai representatif dunia usaha dalam *pentahelix* selama PDB dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan untuk meningkatkan ketangguhan bencana. Akan tetapi kolaborasi tersebut belum berjalan secara maksimal, hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa unsur dalam model *pentahelix* yang belum mengambil perannya dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian mengambil judul tentang : ***Analisis Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang***

1.2. Ruang Lingkup Permasalahan

Penelitian ini dilakukan dengan batasan-batasan untuk menfokuskan konten dari persoalan yang mengemuka sebagaimana uraian dalam latar belakang. Penelitian ini membatasi pada analisis terhadap model kolaborasi yang dilakukan unsur *pentahelix* (Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Media Massa dan Dunia Usaha) dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Hasil Musrenbangkel akan dipadupadankan upaya-upaya mitigasi oleh unsur *pentahelix* lainnya seperti Masyarakat (Forum PRB Kecamatan Ngaliyan,

Akademisi (UIN Walisongo), Media Massa (Suara Merdeka) dan Dunia Usaha (PT Sango Ceramics Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur CBP). Hasil kolaborasi Musrenbang dan unsur pentahelix lainnya akan menjadi upaya dalam penanggulangan bencana.

1.3. Perumusan Masalah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Upaya untuk penanggulangan bencana harus melalui perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada prinsipnya penanggulangan bencana menjadi tugas

dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat dan unsur lainnya yang dilakukan secara gotong royong. Memasukan rencana upaya penanggulangan bencana melalui perencanaan mitigasi struktural (fisik) atau mitigasi non struktural yang menjadi domain dari pemerintah, peran dari unsur pentahelix lainnya (Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa dan Akademisi) juga tidak kalah pentingnya.

Mendasarkan hal tersebut diatas permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana efektivitas kolaborasi unsur *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas kolaborasi unsur *pentehelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efektivitas kolaborasi unsur *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas unsur *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1.5. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian sebuah tujuan. Jika dalam penelitian, tujuan dan rumusan masalahnya dapat tercapai atau terpecahkan

secara tepat dan akurat, maka manfaatnya akan terasa secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Camat, Staf Kecamatan, Lurah dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan serta organisasi kemasyarakatan lainnya agar dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan dari prioritas permasalahan yang terukur. Juga dapat menjadi materi untuk dikaji dalam pelatihan-pelatihan pelaku kebencanaan seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dan kelompok relawan kebencanaan lainnya sehingga program yang direncanakan berdasarkan kebutuhan mendesak sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan kajian lapangan.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam pembelajaran mengkaji dan menyusun proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi serta evaluasi dampak dari sebuah kebijakan yang disusun.

b. Bagi Camat, Kelurahan Dan Staf

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi camat, lurah, staf dan organisasi lainnya yang ikut menyusun dan melaksanakan kegiatan musrenbangkel dari tingkat usulan RT, kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota dalam upaya mendukung penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan, dengan mengedepankan perencanaan berbasis kajian.

c. Bagi Pelaku Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Kecamatan Ngaliyan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan terutama menggali kolaborasi untuk membangun mitigasi baik struktural maupun non struktural demi menciptakan masyarakat tangguh bencana.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dasar penelitian sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk evaluasi dalam penyusunan, pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah, unsur pentahelix lainnya dan Forum PRB.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Pada bab dua ini peneliti akan memaparkan tiga hal penting yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam melakukan penelitian. *Pertama*, penelitian terdahulu yaitu pemaparan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Pemaparan penelitian terdahulu dapat menambah pengetahuan peneliti dan menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian. *Kedua*, kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai alat peneliti dalam menganalisis penelitian terkait dengan kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *Ketiga*, Alur Pikir Penelitian, bagian ini akan menggambarkan alur berpikir peneliti yang akan mempermudah peneliti atau pembaca dalam memahami hasil penelitian.³

2.1. Penelitian Terdahulu

Indonesia telah menjadi tuan rumah Forum *Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) yang diselenggarakan oleh *United Nations for Disaster Risk Reduction* (UNDRR). Forum ini menjadi penting, karena berlangsung 7 (tujuh) tahun setelah adopsi SFDRR dan 2 (dua) tahun pasca pandemi COVID-19, yang menunjukkan dampak kerentanan dan ketidaksetaraan pada kelompok rentan. GPDRR 2022 membahas pentingnya kolaborasi internasional dalam mengurangi faktor risiko dasar secara lokal dan global, serta memperkuat tata kelola pengurangan risiko bencana. Agenda forum tersebut didasarkan pada tujuan SFDRR, menilai pelaksanaannya, memberikan saran kebijakan, dan meningkatkan kesadaran terhadap

risiko bencana. Hasil dari pertemuan ini telah menjadi rujukan dalam peninjauan pelaksanaan *Sendai Framework* antar-pemerintah pada tahun 2023.

Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan. Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.

Kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran para pihak dalam penanganan kebencanaan. Kolaborasi dapat dilakukan di fase Pra Bencana (Tidak ada Bencana dan adanya potensi bencana), Tanggap darurat dan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Dalam praktiknya, kolaborasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk uang/anggaran, tetapi bisa dalam bentuk kolaborasi perencanaan (peran para pihak untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang

komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan), dan/atau kolaborasi pelaksanaan (pelibatan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan fisik, semisal perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata atau KKN Tematik dan menugaskan mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana), dan lain-lain.

Melalui pendekatan kolaborasi ini, diharapkan upaya untuk penanggulangan bencana lebih fokus dan terarah, sehingga memberikan dampak peningkatan pengetahuan masyarakat dan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bencana di kelurahan atau kecamatan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara satu pihak saja.

1. Asmiddin, Anwar Sadat, Muh Askal Basir (2022), judul *Triple Helix Collaboration In Landslide Disaster Management In Buton Regency*, Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana model *Triple Helix Collaboration* dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton
 - b. Apa saja factor yang menyebabkan *Triple Helix Collaboration* tidak berjalan maksimal di Kabupaten Buton

Landasan Teori : Teori kerjasama, Metode: deskriptif dengan fokus kualitatif. Pengumpulan data melalui pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam; dan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumenter.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi terkesan lamban; antar elemen triple helix ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix, sehingga relasi triple helix tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan; dan kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton.⁴

2. Lina Putri Pasaribu, Nurliana Cipta Apsari, Sri Sulastri (2022) Judul, Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi

a. Bagaimana kolaborasi pentahelix antara pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa dilaksanakan ?

b. Apa saja hambatan kolaborasi pentahelix diimplementasi?

Landasan Teori : Teori Kolaborasi, Pentahelix, Manajemen pasca bencana Metode: menggunakan pendekatan *literature review* untuk mengumpulkan data dari media cetak, *e-book*, situs, dan artikel ilmiah.

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan mengkoordinasi para unsur atau pemangku kepentingan lainnya supaya berkontribusi dalam pengembangan kolaborasi ini. Khususnya pada situasi pasca bencana gempa bumi dibutuhkan kesigapan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah demi mempercepat penanganan bencana serta meminimalisir kelalaian. Bisnis

dapat berperan menopang kebutuhan materil maupun non materil sesuai usaha dan kapasitas yang dimiliki. Akademisi berperan sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanganan pasca bencana. Media membantu peningkatan kesadaran bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana; yang didukung oleh peningkatan teknologi dan akses informasi melalui berbagai *platform*. Sedangkan komunitas berperan sebagai akselerator, di mana membantu mempercepat proses pencapaian pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan arahan dari penanggung jawab atau koordinator penanganan pasca bencana. Sementara itu pekerja sosial memiliki peranan sebagai relawan bencana, perencana program kebencanaan, dan pelaksana program kebencanaan.⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Putra Pratama, Laurensius Punto Dewo, Hayatul Khairul Rahmat pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka”. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan berfokus pada analisis dan penelusuran literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian atau studi yang sedang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis technique*). Teknik analisis isi adalah suatu metode sistematis untuk menganalisis konten dari teks atau dokumen (Rahmat & Alawiyah, 2020).⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentahelix adalah konsep yang mencakup lima elemen utama atau pihak yang terlibat pada konsep pengembangan ekosistem inovasi. Konsep Pentahelix mencoba menyatukan kekuatan kelima elemen ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Pentahelix* memperluas konsep *triple helix* yang awalnya hanya melibatkan pemerintah, universitas, dan industri, dengan menambahkan masyarakat sipil dan individu sebagai elemen penting dalam ekosistem inovasi. Pentahelix sendiri adalah bentuk pembaharuan dari model sebelumnya karena dapat memetakan dan mencari solusinya permasalahan melalui sinergi dan kepercayaan antar aktor yang menimbulkan kerjasama (Purnomo et al., 2021).

Dari konsep *triple helix* kemudian ditambahkan satu unsur, yaitu komunitas atau civil society yang berperan mengakomodasi perspektif atau pandangan masyarakat sehingga berkembang menjadi model *Quadruple Helix*. Dan dari konsep *Quadruple Helix* kemudian, Pentahelix menambahkan 1 (satu) elemen dari sisi lain media sehingga memenuhi peran 5 (lima) elemen dan saling berkolaborasi untuk membentuk inovasi atau memecahkan masalah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fikky Ardiansyah pada tahun 2021 yang berjudul “Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah Covid-19 Di Kabupaten Bojonegoro” metode penelitian kombinasi (*mixed methode*) model *sequential exploratory*. Metode ini merupakan metode penelitian yang memuat dua metode didalamnya yaitu, metode kualitatif dan

kuantitatif serta diterapkan secara urut. Model sequentil exploratory dipilih untuk mendapatkan kevalidan data mengenai implementasi kolaborasi model pentahelix dalam upaya penanganan COVID-19 di Bojonegoro. Sedangkan tahapan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat akan peran stakeholder daerah tersebut karena masyarakat merupakan validator eksternal yang dapat menjadi sampel yang bersifat netral.

Hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima unsur pada kolaborasi model pentahelix turut berkontribusi dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro, dan masyarakat Bojonegoro juga menyetujuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari garis kontinum yang menunjukkan hasil sebagai berikut, butir pernyataan 1 sampai butir pernyataan 15 terletak pada daerah setuju (S), kecuali pada butir pernyataan 8 yang terletak pada daerah ragu-ragu (RR). Butir pernyataan 7 dan 8 merupakan pernyataan untuk menguji hipotesis terkait kontribusi akademisi (guru/pendidik) pada konsep pembelajaran selama pandemi. Walaupun hasil pernyataan 8 terdapat pada daerah ragu-ragu (RR), namun peran akademisi sebagai konseptor masih bisa dikatakan baik karena pada butir pernyataan 7 masih berada pada daerah setuju (S). Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur akademisi (guru/pendidik) berperan dalam membuat konsep pembelajaran selama masa pandemi, tetapi implementasinya masih belum efektif.⁷

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Arfani tentang Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata

Di Desa Kalanganyar Sidoarjo pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi baik keadaan ataupun kondisinya, sehingga metode ini disebut deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian ini adalah pembahasan dan data pendukung yang ada di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bahwa kolaborasi pentahelix dalam mengurangi risiko bencana pada destinasi wisata baik untuk wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah rawan bencana kategori sedang menurut data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, seperti bencana alam dan bencana non alam yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana daerah Sidoarjo mempunyai fungsi dan tugas dalam penanganan masalah bencana di Kabupaten Sidoarjo, dengan membuat rencana dan program untuk pencegahan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, bencana maupun pasca bencana. Unsur Pentahelix yang ada di Kabupaten Sidoarjo berperan serta dalam penanganan bencana dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan bencana seperti dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur dunia usaha, unsur masyarakat dan unsur media massa. Dengan melakukan kolaborasi pentahelix, masyarakat memperoleh bantuan pengetahuan tentang kebencanaan dan cara cara mengurangi risiko bencana yang terjadi sehingga masyarakat mempunyai gambaran preventif tentang bencana.⁸

6. Penelitian yang dilakukan oleh A.H. Rahadian yang berjudul Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. metode penelitian eksplanatori kuantitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam. Berdasarkan hasil pengolahan data di dapat hasil Terdapat pengaruh positif dan signifikan Disiplin terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja secara bersama-sama terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
7. Izma Fatima, Desiderius Priyo Sudibyو dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan BPBD Kabupaten Magelang sudah bisa dikatakan efektif namun perlu dilakukan peningkatan. Terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu pembagian wewenang, pemberian motivasi, peningkatan kualitas pegawai, dan SOP yang digunakan. Sementara untuk faktor penghambatnya

yaitu kekurangan pegawai dan peralatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mitigasi bencana terutama anak remaja.

Beberapa penelitian tersebut di atas dapat diringkas dalam tabel yang membandingkan hasil penelitian dan titik pembeda dari 5 (lima) penelitian sebelumnya dengan penelitian yang berjudul Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Ngaliyan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta peran *pentahelix* dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
1	<i>Triple Helix Collaboration In Landslide Disaster Management In Buton Regency</i> Peneliti : Asmiddin, Anwar Sadat, Muh Askal Basir (2022)	minimnya tingkat koordinasi dan inovasi yang terjalin pada elemen triple helix sehingga tidak tercipta satu integrasi yang membuat upaya mitigasi terkesan lamban; antar elemen triple helix ini memiliki ideologi yang berbeda, dan ideologi ini yang terkadang ditonjolkan oleh masing-masing elemen helix, sehingga relasi triple helix tidak dapat terbangun sesuai apa yang diinginkan; dan kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi tanah longsor di Kabupaten Buton	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada <i>Triple Helix Collaboration</i> dan menguraikan kelambanan antar elemen <i>Triple Helix Collaboration</i> sehingga relasi tidak terbangun sesuai yang diinginkan serta kondisi kondisi prosedur birokrasi yang terlalu sulit membuat elemen perguruan tinggi maupun perusahaan enggan untuk menjalin kerjasama dengan elemen pemerintah dalam upaya mitigasi

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
2	<p>Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi</p> <p>Peneliti : Lina Putri Pasaribu, Nurliana Cipta Apsari, Sri Sulastri (2022)</p>	<p>Pemerintah berperan mengkoordinasi para unsur atau pemangku kepentingan lainnya supaya berkontribusi dalam pengembangan kolaborasi ini. Khususnya pada situasi pasca bencana gempa bumi dibutuhkan kesigapan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah demi mempercepat penanganan bencana serta meminimalisir kelalaian. Bisnis dapat berperan menopang kebutuhan materil maupun non materil sesuai usaha dan kapasitas yang dimiliki. Akademisi berperan sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanganan pasca bencana. Media membantu peningkatan kesadaran bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana; yang didukung oleh peningkatan teknologi dan akses informasi melalui berbagai platform. Sedangkan komunitas berperan sebagai akselerator, di mana membantu mempercepat proses pencapaian pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai dengan arahan dari penanggung jawab atau koordinator penanganan pasca bencana. Sementara itu pekerja sosial memiliki peranan sebagai relawan bencana, perencana program kebencanaan, dan pelaksana program kebencanaan</p>	<p>Penelitian ini menitik beratkan pada Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana serta menguraikan peran dari masing-masing elemen.</p>

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
3	<p>Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Peneliti : Jeremy Putra Pratama, Laurensius Punto Dewo, Hayatul Khairul Rahmat pada tahun 2024</p>	<p>Pentahelix adalah konsep yang mencakup lima elemen utama atau pihak yang terlibat pada konsep pengembangan ekosistem inovasi. Konsep Pentahelix mencoba menyatukan kekuatan kelima elemen ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. <i>Pentahelix</i> memperluas konsep <i>triple helix</i> yang awalnya hanya melibatkan pemerintah, universitas, dan industri, dengan menambahkan masyarakat sipil dan individu sebagai elemen penting dalam ekosistem inovasi. Pentahelix sendiri adalah bentuk pembaharuan dari model sebelumnya karena dapat memecahkan dan mencari solusinya permasalahan melalui sinergi dan kepercayaan antar aktor yang menimbulkan kerjasama. Dari konsep <i>triple helix</i> kemudian ditambahkan satu unsur, yaitu komunitas atau civil society yang berperan mengakomodasi perspektif atau pandangan masyarakat sehingga berkembang menjadi model <i>Quadruple Helix</i>. Dan dari konsep <i>Quadruple Helix</i> kemudian, Pentahelix menambahkan 1 (satu) elemen dari sisi lain media sehingga memenuhi peran 5 (lima) elemen dan saling berkolaborasi untuk membentuk inovasi atau memecahkan masalah</p>	<p>Lebih detail menguraikan model sinergitas pentahelix dalam rangka pengurangan risiko bencana hasil tinjauan pustaka.</p>

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
4	<p>Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah Covid-19 Di Kabupaten Bojonegoro Peneliti : Fikky Ardiansyah pada tahun 2021</p>	<p>kelima unsur pada kolaborasi model pentahelix turut berkontribusi dalam upaya penanganan bencana wabah COVID-19 di Bojonegoro, dan masyarakat Bojonegoro juga menyetujuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari garis kontinum yang menunjukkan hasil sebagai berikut, butir pernyataan 1 sampai butir pernyataan 15 terletak pada daerah setuju (S), kecuali pada butir pernyataan 8 yang terletak pada daerah ragu-ragu (RR). Butir pernyataan 7 dan 8 merupakan pernyataan untuk menguji hipotesis terkait kontribusi akademisi (guru/pendidik) pada konsep pembelajaran selama pandemi. Walaupun hasil pernyataan 8 terdapat pada daerah ragu-ragu (RR), namun peran akademisi sebagai konseptor masih bisa dikatakan baik karena pada butir pernyataan 7 masih berada pada daerah setuju (S). Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur akademisi (guru/pendidik) berperan dalam membuat konsep pembelajaran selama masa pandemi, tetapi implementasinya masih belum efektif</p>	<p>fokus penelitian pada model kolaborasi pentahelix dalam penanganan wabah bencana Covid 19. Model garis kontinum mengurai tentang pernyataan setuju dan Ragu-ragu</p>

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
5	<p>Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo Peneliti : Mochammad Arfani tahun 2022</p>	<p>Pembahasan dan data pendukung yang ada di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bahwa kolaborasi pentahelix dalam mengurangi risiko bencana pada destinasi wisata baik untuk wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah rawan bencana kategori sedang menurut data dari Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, seperti bencana alam dan bencana non alam yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana daerah Sidoarjo mempunyai fungsi dan tugas dalam penanganan masalah bencana di Kabupaten Sidoarjo, dengan membuat rencana dan program untuk pencegahan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, bencana maupun pasca bencana. Unsur Pentahelix yang ada di Kabupaten Sidoarjo berperan serta dalam penanganan bencana dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan bencana seperti dari unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur dunia usaha, unsur masyarakat dan unsur media massa. Dengan melakukan kolaborasi pentahelix, masyarakat memperoleh bantuan pengetahuan tentang kebencanaan dan cara cara mengurangi risiko bencana yang terjadi sehingga masyarakat mempunyai gambaran preventif tentang bencana</p>	<p>Fokus penelitian ini pada kolaborasi pentahelix untuk membangun destinasi wisata dari ancaman bencana. Peningkatan kapasitas pelaku usaha destinasi wisata di Desa Kalanganyar Sidoharjo diperlukan untuk memitigasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.</p>

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Titik Pembeda
6	Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Pegawai Terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Peneliti : A.H. Rahadian tahun 2020	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Disiplin terhadap Efektivitas Kerja Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.	Fokus penelitian ini pada efektivitas kerja dengan tidak merinci peran dari unsur pentahelix untuk penanggulangan bencana
7	Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Peneliti : Izma Fatima, Desiderius Priyo Sudibyo tahun 2021	Hasil penelitian menunjukkan BPBD Kabupaten Magelang sudah bisa dikatakan efektif namun perlu dilakukan peningkatan. Terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu pembagian wewenang, pemberian motivasi, peningkatan kualitas pegawai, dan SOP yang digunakan. Sementara untuk faktor penghambatnya yaitu kekurangan pegawai dan peralatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mitigasi bencana terutama anak remaja	Penelitian ini menguraikan faktor pendorong dan penghambat hanya di lingkup internal pegawai organisasi BPBD. Penelitian tidak menguraikan faktor unsur lainnya (pentahelix) dalam upaya penanggulangan bencana.

Sumber : olahan dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya beberapa topik tentang membangun kolaborasi pentahelix untuk membangun mitigasi baik struktural maupun non struktural. Kolaborasi itu dibangun oleh elemen Pemerintah (Regulator), Masyarakat (Akselerator), Dunia Usaha (Pendorong), Akademisi (Konsep dan Inovasi), Media

Massa (Pengganda atau corong). Metode penelitian juga banyak yang hampir mirip yaitu Sebagian besar adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada model kolaborasi, subyek yang melakukan kolaborasi (tingkat kelurahan). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan proses partisipatif berpadu dengan teknokratis dan politik berkolaborasi serta peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan dalam upaya Penanggulangan bencana. Lokus penelitian ini di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang merupakan satu-satunya kecamatan yang sudah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang.

2.2. Kajian Pustaka.

2.2.1. Konsep Administrasi Publik

Paradigma perkembangan administrasi publik dimulai dari era “*administration dichotomy*” sampai dengan era “*governance*” hingga sampai akhirnya lahirnya konsep “*collaborative governance*”. Asumsi utama dari paradigma “*The Politics Administration Dichotomy*” yakni memisahkan politik dan fungsi pemerintahan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pemikiran ini dipelopori oleh Woodrow Wilson dalam publikasi esai “*The Study of Administration*” yang dimuat di *Political Science Quarterly*, tahun 1897 (Basheka, 2012).

Perkembangan terakhir di Indonesia, banyak akademisi dan pakar lebih cenderung menggunakan istilah “administrasi publik” daripada “administrasi negara” dengan berbagai alasan dan sudut pandang. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah secara filosofis dan esensi dari administrasi publik adalah pelayanan publik. Berbagai argumentasi dikemukakan sebagai alasannya, antara lain: administrasi negara lebih menonjolkan aspek negara dan aspek kekuasaan negara, sedangkan administrasi publik lebih menonjolkan aspek masyarakat atau publik, aspek pelayanan, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan masyarakat. Selain hal tersebut, istilah administrasi publik lebih umum secara global dipergunakan.

Governance banyak dipergunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” atau setidaknya merujuk pada padanannya cukup banyak (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “government”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. *Governancen* memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018). *Governance* secara umum dapat di pahami bentuk peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan aktor lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya.

Pada dasarnya karakteristik sebuah governance akan berbeda pada siapa yang memiliki pengaruh/ kekuatan untuk mengatur dan mengoordinasikan sebuah kebijakan, program, dan proyek, atau lebih khusus mengenai lagi: bagaimana dasar hukum dan peraturan yang ada; orientasi demokratis; hubungan prinsipal antara anggota/ agen; proses implementasi; dan bentuk/ kondisi akuntabilitasnya (Hanberger, 2004). Klasifikasi model “karakteristik governance” administrasi publik atau kebijakan dapat dibagi menjadi:

- 1) Terkoordinasi oleh negara (*state-coordinated*);
- 2) Terkoordinasi oleh pemerintah daerah (*local government coordinated*);
- 3) Terkoordinasi oleh multi-aktor (*multi-actor-coordinated*).

State-coordinated merupakan model yang paling banyak dikenal dan masih mungkin paling umum di temui di beberapa negara. Model ini biasanya melibatkan banyak aktor, akan tetapi pengelolaan masih seperti pemerintahan konvensional. Governance dimulai dengan “keputusan negara”, yang dibuat oleh perwakilan rakyat atau elit politik. Dengan kata lain, negara adalah pelaku utama dan pemerintah/ aktor di tingkat bawah adalah perantaranya.

Local government coordinated merupakan model dimana pemerintah daerah telah mengambil peran atau diberi peran. Keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah landasan hukumnya, atau dapat pula dimulai dari mandat keputusan yang diambil di tingkat pusat/ provinsi kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kekuasaan dan tanggung jawab atau koordinasi pelaksanaan suatu program di rumuskan dengan bentuk desentralisasi.

Multi-actor coordinated mewakili suatu situasi dimana pemerintah pusat dan daerah hanya dua di antara beberapa aktor yang berusaha mengarahkan dan mengoordinasikan sumber daya secara kolektif. Landasan hukum dari model ini adalah perjanjian dan atau kontrak antara aktor yang berpartisipasi. Bergantung pada ruang lingkup dan kedalaman governance dan kolaborasi, orientasi dapat berupa partisipatif atau diskursif (*deliberatif*).

Mirip dengan *local government coordinated*, anggota yang utama tidak begitu jelas dalam model ini. Konsep principal-agent (utama-pelaksana) tidak relevan diterapkan karena para peserta dapat menjadi principal-agent sekaligus, di mana program dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi.⁹

2.2.2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Teori-teori utama dalam manajemen publik, diantaranya teori kelembagaan baru (*new institutionalism theory*), teori pilihan publik (*publik choice theory*) dan *principal agent theory*. Pada teori manajemen, terdapat konsep manajemen tradisional dan kontemporer pada sektor publik yang kemudian diaplikasikan pada fungsi utama manajemen yaitu PODSCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

Manajemen publik menurut Overman dalam Keban (2004:85), adalah bukanlah "*scientific management*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific management*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada satu pihak, dan orientasi politik

kebijakan di pihak lain. Manajemen Publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz (1991:xi), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Oleh karena dapat dikatakan bahwa manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.¹⁰

Sedangkan dalam literasi lain, Manajemen berasal dari kata management, berawal dari kata “*to manage*” yang artinya tata laksana atau mengurus atau ketatalaksanaan. Manajemen adalah mengatur, membimbing dan memimpin karyawannya supaya usaha yang sedang dikerjakan mencapai tujuan, perilaku ini dilakukan oleh seorang manajer (Mappasiara, 2018:76)

Manajemen dalam bahasa Arab disebut *Idarah*. *Idarah* diambil berasal dari kata *ad-dauran*. Sebagian pengamat secara istilah mengartikannya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan umum. (Nizar, 2018) Bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas yang terkait kepemimpinan, pengarahan,

pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019). Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni ialah kecakapan yang diperoleh dari pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreatifitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen. Maka karena itu ilmu pengetahuan dari seni manajemen saling melengkapi dan seimbang diantara keduanya (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019).

Manajemen pada dasarnya belum memiliki pengertian yang baku namun dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan perusahaan. Meski demikian, memiliki pokok pengertian yang sama. Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang management. Menurut Marry Parker Foller management is the art of getting this done through people. Manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Selanjutnya James A.F. Stoner Management is the process of planning, organizing, leading, and

controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals. Manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, Luther Gulick Manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dan terakhir, menurut Robert L. Katz mengutip dari sulastri manajemen merupakan suatu profesi yang menuntut persyaratan tertentu, seorang manajer harus memiliki tiga keahlian atau kemampuan hakiki, yaitu kompetensi secara konseptual, sosial (hubungan manusiawi), dan teknikal. (Kamal, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan atau organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: Perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Pergerakan/pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

- 1. Perencanaan atau *planning*** adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor

produksi lain yang akan digunakan (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019). Menurut Wilson, dalam (Sarinah, 2017: 38), Pengertian Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang di wakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi: Analisis, kebijakan dan rancangan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum seseorang dapat mengorganisir, mengendalikan, ataupun memimpin, maka ia harus terlebih dahulu membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah suatu kelompok atau kegiatan.(Kamal, 2019:356)

Menurut Wilson ini jelaskan lebih rinci dalam buku direktorat Jenderal bahwa langkah-langkah perencanaannya yaitu menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada organisasi, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada dilingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan mengukur keberhasilan, target-target untuk mencapai tujuan, orang yang bertanggung jawab dan memonitoring. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

2. **Pengorganisasian atau *Organizing*** merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan

yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Pengorganisasian adalah seluruh kegiatan dalam proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan organisasi tercapai (Dakhi, 2016). Pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019). Selain itu pengorganisasian juga merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas dan membagi tugas kepada setiap karyawan. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk menetapkan peran serta struktur dimana karyawan dapat mengetahui apa tugas dan tujuan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah sistem yang dibentuk untuk membagi atau mengelompokkan setiap lini dalam organisasi sehingga organisasi dapat dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Perangkat yang baik dibutuhkan dalam mengurus suatu lembaga. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengelolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan

memasak. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut yaitu amanah, profesional dan transparansi.(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

- 3. Pergerakan/Pelaksanaan atau *Actuating*** adalah cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga modernnya peralatan tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat apa-apa (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2019). Pergerakan biasanya dikatakan sebagai kegiatan

manajemen yang paling menantang dan paling penting karena langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Manajer harus mampu menciptakan suasana (atmosfer) yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain. (Kamal, 2019:358)

- 4. Pengawasan atau *Controlling*.** Mengutip dari sarinah, Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. System pengawasan harus dibuat sebaik mungkin dan komprehensif. Disamping *Control by System*, seorang pemimpin harus memberikan *warning* kepada bawahannya terhadap situasi kerja yang sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan. *Controlling* atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. *Controlling* atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan (Sarinah, 2017:70,105).

Pengendalian bertujuan melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan: (1) menentukan standar

prestasi, (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan (4) melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Kemudian, kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. (Kamal, 2019:358)

2.2.3. Konsep dan Teori Efektivitas

Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut James L Gibson dkk (Pasolong, 2013: 4) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Menurut Gibson (1985: 27-30), Gibson memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

a. Efektivitas Individu. Pada prespektif ini menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena individu bekerja dalam suatu organisasi pasti berhubungan langsung dengan kelompok.

- b. Efektivitas Kelompok. Prespektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan perorangan.
- c. Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang Administrasi Publik Paradigma Administrasi Publik Manajemen Publik *Good Governance* Efektivitas lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing.¹¹

Menurut Daft (2010:13) menjelaskan Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya melalui pendekatan sasaran (*goal approach*). Yang dimaksud dengan sasaran (*goal*) organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan mengemukakan bahwa sasaran efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir. Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi.

Sedangkan menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: (1). Pencapaian Tujuan (2). Adaptasi (3). Integrasi Gibson (1985:33-35) mengemukakan ada lima aspek kriteria efektivitas yaitu: (1) Produksi (2) Efisiensi (3) Kepuasan (4) Adaptasi (5) Pengembangan Organisasi Emirat Etziomi (Indrawijawa, 2010 :187) mengemukakan pengukuran efektivitas organisasi mencakup 4 kriteria: (1) Adaptasi (2) Integrasi (3) Motivasi (4) Produksi.

Komarudin (2014:25) mendefinisikan tentang pelayanan publik, yaitu Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan, ini adalah pendapat Daft (dalam Priansa, 2013: 11). Sedangkan Akmal (dalam Priansa, 2013: 11) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Konsep efektivitas menurut Priansa (2013: 24) adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.¹²

Selanjutnya, Tangkilisan (2005: 156) mengemukakan adanya faktor yang berpengaruh pada efektivitas, yaitu: (1) Struktur organisasi, yaitu sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakan secara maksimal dalam suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. (2) Adanya kerja sama, yang merupakan unsur terpenting dalam

organisasi, karena dengan adanya hubungan/kerja sama yang baik, maka keberhasilan pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat. (3) Kemampuan administratif pegawai, sebagai bentuk dari kemampuan sumber daya manusia, yang merupakan unsur penentu dalam keberhasilan organisasi dalam produktivitas kerja. (4) Perencanaan program kerja memegang peranan dalam memulai kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. (5) Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi, yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai efektivitas organisasi.

Upaya penanggulangan bencana sangat terkolerasi pada tingkat ffektivitas kerja. Dimana efektivitas kerja merupakan keadaan serta kemampuan untuk mengatakan berhasilnya suatu kerja yang dilaksanakan anggota organisasi dalam pencapaian tujuan (*goal getter*) dan hasil yang tercapai dapat berguna dan berdaya guna bagi organisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Kumorotomo (2006), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain: (1) Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. (2) Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. (3) Keadilan, yaitu

mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

(4) Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan.

2.2.4. Kolaborasi

Secara etimologi, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010), ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun.

Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih

spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Walaupun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari konsep kolaborasi. Identik dengan ilmu-ilmu sosial pada umumnya kolaborasi sebagai salah satu konsep disiplin ilmu sosial memiliki pengertian yang kompleks tergantung dari sudut pandang para ahli itu memahaminya.

Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Roschelle dan Teasley yang mengatakan bahwa *collaboration more specifically as “mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”* (Lai, 2011, hlm. 4.). Selanjutnya, Roschelle dan Teasley menjelaskan bahwa *collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence.*

Sementara itu, definisi kolaborasi yang unsur-unsurnya lebih perinci dan lengkap pernah diutarakan Sanaghan (2015) sebagai berikut :

*“Collaboration involves a transparent and trusted communication process where all parties feel informed and can provide feedback and ideas to others with whom they work. Most importantly, collaboration involves shared decision making, where the decision rules are understood by everyone and all involved parties can inform or influence important decisions that can potentially impact them, especially resource allocation decisions”.*¹³

Ansell dan Gash (2007:550) membedakan kolaborasi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut, kolaborasi yang diartikan secara normatif dan kolaborasi yang diartikan dalam proses. Kolaborasi yang diartikan secara normatif adalah aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi dengan para partner atau mitranya, sedangkan kolaborasi yang diartikan dalam proses adalah serangkaian proses dalam mengatur semua pihak yang terlibat dalam halnya pemerintah dan stakeholder, maksud dari kolaborasi dalam arti proses merujuk pada sejumlah institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya.

Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan terdapat 5 (lima) indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain:

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka) Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman Bersama, dan komitmen terhadap prosrs dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.
2. *Trust Building* (membangun kepercayaan). Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi

bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.

3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses) Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.
4. *Shared Understanding* (saling memahami) Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.
5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai) Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat

menjalankan tupoksi pada masing-masing stakeholders guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Collaborative merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang terlibat secara langsung dengan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif. *Collaborative* memiliki karakteristik yaitu .¹⁴

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh Lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, antara lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik ataupun manajemen publik.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa forum dalam *collaborative governance* bersifat formal. *Collaborative governance* dijelaskan sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang berasal dari berbagai kalangan. Hal ini

Secara umum, kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui atau bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menggapai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama ataupun

untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka yang berkolaborasi. Betapa pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang dibangun oleh Roschelle dan Teasley yang mengatakan bahwa *collaboration more specifically as “mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”* (Lai, 2011, hlm. 4.). Selanjutnya, Roschelle dan Teasley menjelaskan bahwa *collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence*. Begitu pula dengan Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) dengan nada yang hampir sama mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.¹³

Menurut Frederich, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sementara itu, implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

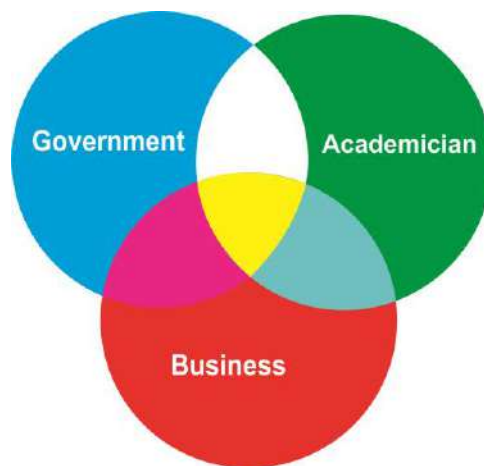
program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Oleh sebab itu, kolaborasi juga dapat dipahami sebagai tindakan koordinasi konstruktif yang dilakukan secara langsung sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kesepakatan pembuatan dalam keputusan bersama untuk menggapai sesuatu ataupun terhadap penanggulangan masalah secara bersama-sama

2.2.5. Model Pentahelix

Perspektif kebencanaan sebagaimana terdahulu adalah upaya – upaya yang dilakukan secara reaktif yang hanya bergerak saat terjadi bencana dan fokus pada penyelamatan korban jiwa dan aset. Setelah adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 perspektif kebencanaan berubah. Penanggulangan bencana lebih preventif dengan menitikberatkan pada upaya investasi untuk pengurangan risiko serta memilikivisi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 menyebutkan dalam menghadapi peningkatan risiko bencana di 5 (lima) tahun mendatang, Pemerintah menyusun RENAS PB Tahun 2025-2029 yang berisi tentang kebijakan, strategi, dan rencana aksi dengan tujuan “Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan”.

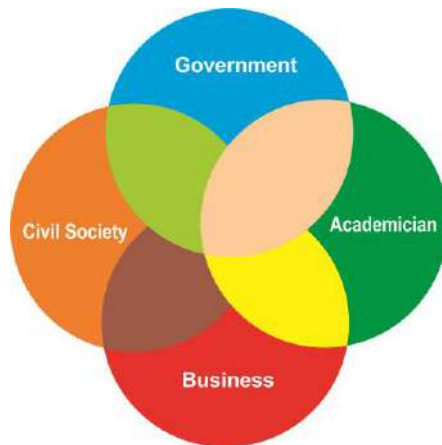
Model Pentahelix merupakan pengembangan inovatif dari model *Quadruple helix* yang menghubungkan akademisi, praktisi/bisnis/dunia usaha, masyarakat/komunitas, pemerintah, dan media massa untuk menciptakan ekosistem

berbasis kreativitas dan pengetahuan demi solusi manajemen pascagempa (Leydesdorff, 2012). *Pentahelix* adalah model pengembangan sosioekonomi yang mendorong ekonomi pengetahuan untuk mengejar inovasi dan kewirausahaan melalui kolaborasi dan kemitraan yang sukses antara akademisi, pemerintah, industri, LSM, dan sektor sipil masyarakat dan wirausaha sosial (REPEC, 2012). Kemitraan *Pentahelix* merupakan perpanjangan dari model Triplehelix. *Triplehelix* mencakup elemen dari akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Etzkowitz dan Leyesdorff berpendapat bahwa *Triplehelix* membutuhkan sesuatu yang lain agar karya *Triplehelix* mengakomodasi inovasi baru (Etzkowitz & Leyesdorff, 2000).



Gambar 2 Triplehelix

Penyempurnaan model Triplehelix mengalami perubahan yang terus berkembang yaitu dengan memasukan komunitas atau *civil society* yang berperan mengakomodasi perspektif atau pandangan masyarakat sehingga berkembang menjadi model *Quadruplehelix*. *Government, University, Business and civil society* membentuk kerangka *quadruplehelix model*.

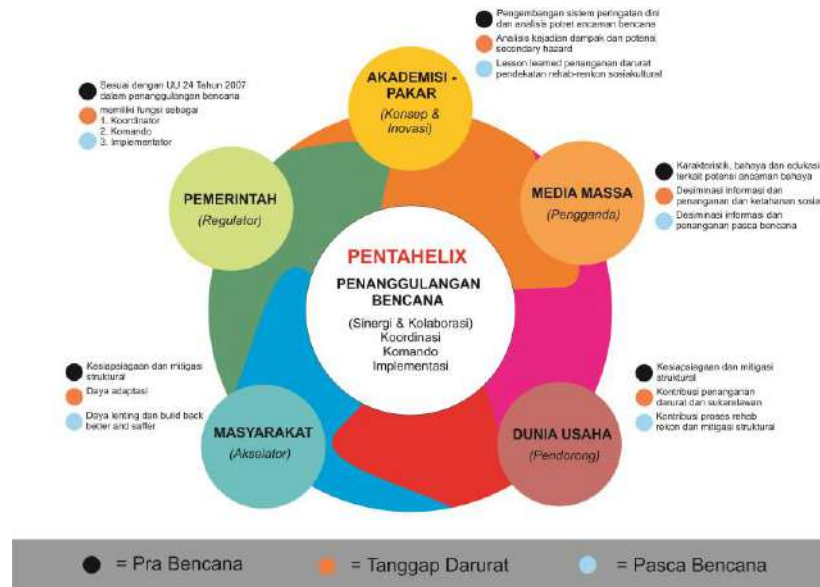


Gambar 3 Quadruplehelix

Model pentahelix adalah kerangka kolaborasi yang melibatkan lima unsur utama: *Academician* (Akademisi), *Business* (Bisnis), *Community* (Komunitas), *Government* (Pemerintah) dan Media (Publikasi Media)., untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian *Pentahelix* menambahkan 1 (satu) elemen dari sisi lain media sehingga memenuhi peran 5 (lima) elemen dan saling berkolaborasi untuk membentuk inovasi atau memecahkan masalah. Dalam mengatakan:

1. Pemerintah penampilan perannya Pemerintah dapat bertindak sebagai badan yang mengatur dan mengendalikan, di mana mengembangkan dan menegakkan peraturan dan tanggung jawab. Pemerintah terlibat dalam perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, promosi, otorisasi, alokasi keuangan, kebijakan inovasi publik, dan membangun jaringan dengan mitra swasta dan masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan agar berkontribusi dalam pengembangan kemitraan ini.

2. Bisnis Perseroan berperan dalam mendukung upaya perubahan atau pengembangan sumber daya manusianya dalam rangka kerjasama dengan pemerintah. Perusahaan juga dapat mendukung kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pendapatan dana dalam kegiatan tertentu.
3. Akademisi Akademisi berperan sebagai konseptor. Akademisi mengembangkan konsep, teori, dan pemikiran baru untuk membantu kegiatan unggulan dan mendukung tujuan.
4. Komunitas Komunitas adalah kumpulan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama untuk dicapai bersama. Dalam kemitraan *Pentahelix*, komunitas berperan sebagai akselerator, membantu mempercepat proses pencapaian tujuan. Selain itu, komunitas juga berperan sebagai titik kontak antar pemangku kepentingan agar semua proses kerjasama berjalan lancar.
5. Media ; Media di dunia modern saat ini merupakan faktor terpenting dalam menyebarkan informasi, publikasi dan promosi. Media juga berperan dalam mendorong penerimaan dan kontribusi publik terhadap keberhasilan tujuan program atau kegiatan. Para pihak dalam komitmen dapat berubah, tetapi proses komitmen terus berlanjut. Proses pelibatan pemangku kepentingan memiliki banyak segi (Pedoman APGA tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan, 2015).



Gambar 4 Pentahelix

2.2.6. Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan ancaman bencana; kepada masyarakat dari b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ¹

Didalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (*disaster management*), risiko bencana didefinisikan sebagai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana atau dapat disebut sebagai ancaman bahaya, khususnya bahaya yang berasal dari alam bersifat tetap karena merupakan bagian dari dinamika proses alami pembentuk struktur bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan suatu daerah dapat dikurangi melalui berbagai usaha peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi struktural maupun non struktural, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga fase yaitu : Fase Pra Bencana, fase Tanggap Darurat dan Fase Pasca Bencana.

2.2.6.1. Pada fase pra bencana

Fase pra bencana ada dua kondisi atau keadaan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dua kondisi tersebut adalah:

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan bencana; disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; pemahaman tentang kerentanan masyarakat; analisis kemungkinan dampak bencana; pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak bencana; dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- b. Pengurangan risiko bencana; merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: Pengenalan dan pemantauan risiko bencana; Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; Pengembangan budaya sadar bencana; Peningkatan komitmen penanggulangan bencana; dan terhadap pelaku Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
- c. Pencegahan; dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan sebagaimana

dimaksud dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah
- e. Persyaratan analisis risiko bencana; ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud disusun dan ditetapkan oleh Kepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembaga terkait. Persyaratan analisis risiko bencana juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- g. Pendidikan dan pelatihan; ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.²

2. *Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana.*

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

- a. Kesiapsiagaan; untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang

berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:

- 1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - 2) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - 5) Penyiapan lokasi evakuasi;
 - 6) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - 7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- b. Peringatan Dini; dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:
- 1) mengamati gejala bencana;
 - 2) Menganalisa data hasil pengamatan;
 - 3) Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - 4) Menyebarkan hasil keputusan; dan
 - 5) Mengambil tindakan oleh masyarakat.
- c. Mitigasi Bencana; dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:
- 1) Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - 2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.²

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder oleh karena itu fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana

Daerah adalah fungsi koordinasi yaitu melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana.

2.2.6.2. Pada Fase Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi beberapa data yang ada di lokasi bencana antara lain
 - 1) cakupan lokasi bencana;
 - 2) jumlah korban bencana;
 - 3) kerusakan prasarana dan sarana;
 - 4) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - 5) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana; Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

 - 1) Pengerahan sumber daya manusia;
 - 2) Pengerahan peralatan;
 - 3) Pengerahan logistik;
 - 4) Imigrasi, cukai, dan karantina;
 - 5) Perizinan;
 - 6) Pengadaan barang/jasa;
 - 7) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - 8) Penyelamatan; dan
 - 9) Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB jika status kedaruratannya skala Nasional dan jika status kedaruratannya tingkat daerah maka kewenangannya ada pada kepala BPBD. ²

2.2.6.3. Pada fase Pasca Bencana:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. ¹⁶

Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis

kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan: pengaturan mengenai bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

- b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.²

2.2.7. Mitigasi Bencana

Upaya untuk melakukan penanggulangan bencana terus dilakukan guna mencegah terjadinya korban akibat dari bencana tersebut. Sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9 menyatakan Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Berdasarkan atas pemahaman pada ketentuan pasal di atas maka mitigasi bencana terbagi atas 2 (dua) pola: (1) Mitigasi struktural: upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi (seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi,

bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun *Early Warning System* yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami, kejadian tanah gerak). Dan (2) Mitigasi non-struktural: upaya mengurangi dampak bencana, selain dari upaya fisik sebagaimana yang ada pada mitigasi struktural. Dalam mitigasi non struktural dapat dilakukan dengan pembuatan tata ruang kota, capacity building perencanaan masyarakat, wilayah, dan legislasi, asuransi. Kebijakan mitigasi baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat non struktural harus saling terintegrasi. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai.

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan penataan ruang;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu 1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana; 2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana; 3)

mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

2.3. Kerangka Teori atau Pemikiran

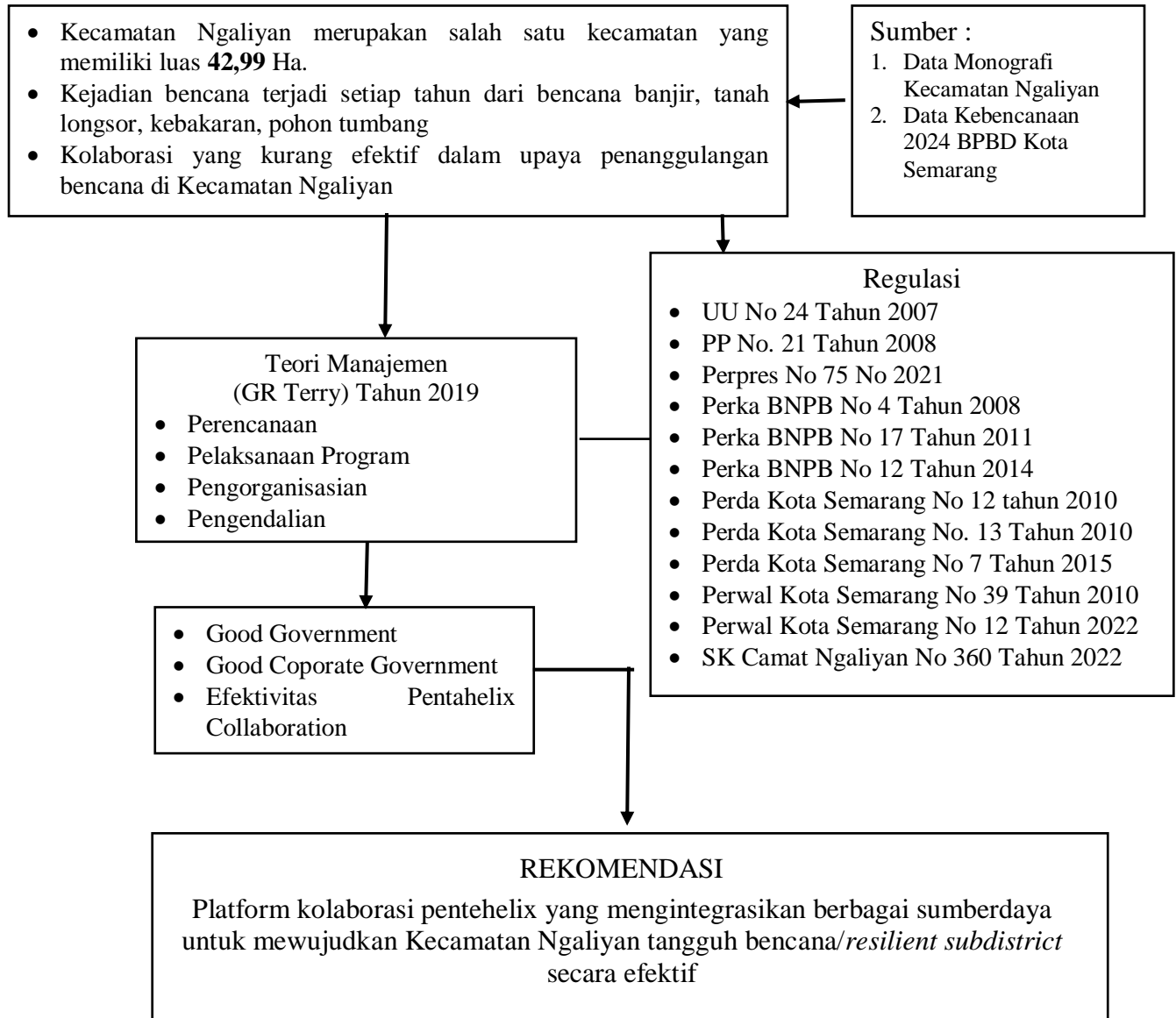
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Upaya pencegahan bencana dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Untuk mengetahui bahaya yang ada di suatu wilayah maka diperlukan kajian terhadap ancaman yang ada.

Kajian ancaman/bahaya yang dilakukan melalui proses partisipatif melibatkan seluruh unsur komunitas dan sumber daya yang ada. Model kajian diharapkan masyarakat akan menemukan ancaman/bahaya yang lebih bersifat historis. Upaya penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Ngaliyan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi kecamatan yang memiliki ancaman tinggi karena letak topografi wilayah yang dilewati Daerah Aliran Sungai Bringin dan wilayah perbukitan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi serta laju pertumbuhan penduduk cukup pesat. Penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan bahaya adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: a. aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini secara khusus mengangkat kolaborasi Musrenbangkel dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan dalam mempercepat perbaikan penanggulangan bencana. Secara gamblang dapat tergambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 5 Alur Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjangkau informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (masyarakat, suatu proses dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mendekati data primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual, dan kategoris dari data itu sendiri. Sedangkan Miles dan Hubner, menyatakan bahwa, data kualitatif merupakan sumber

dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral.

3.2. Fokus dan lokus Penelitian

3.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu menentukan pembahasan penelitian yang mencakup hal-hal penting dalam penelitian. Menurut Pangarso Suryotomo (2022) dalam kajian kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan risiko bencana, Keterlibatan para pihak dalam penanggulangan bencana menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan. Pentahelix memiliki makna Kolaborasi yang intinya adalah ‘semua pelaku memiliki peran’, dan *Responsibility* yang memiliki makna ‘semua pelaku memiliki tujuan bersama’. *Pentahelix* mengawinkan makna kolaborasi dan *responsibility*.¹⁷

Penulisan fokus penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian digunakan sebagai batasan peneliti agar pembahasan penelitian dapat dijelaskan secara spesifik, tegas dan rinci. Masalah dari penelitian ini yang menjadi fokus adalah Bagaimana efektivitas kolaborasi dari unsur pentahelix dalam upaya penanggulangan

bencana di Kecamatan Ngaliyan dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas kolaborasi tersebut.

3.2.2. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan sebuah tahap yang penting karena tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh data dan informasi, serta pelaksanaan observasi yang digunakan untuk memperoleh sumber penelitian. Pada penelitian yang akan dilakukan melibatkan banyak aktor sehingga penelitian dilakukan di beberapa tempat. Lokus atau tempat penelitian yaitu di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penelitian ini adalah (a) BPBD Kota Semarang (b) Camat Ngaliyan (c) Kasi Pembangunan Kecamatan Ngaliyan (d) 10 Lurah di Kecamatan Ngaliyan meliputi Lurah Ngaliyan, Lurah Bringin, Lurah Tambakaji, Lurah Purwoyoso, Lurah Kalipancur, Lurah Bambankerep, Lurah Gondorio, Lurah Wates, Lurah Podorejo dan Lurah Wonosari. (e) Dunia Usaha PT Sango Ceramics Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur CBP, (f) Media Massa PT Suara Merdeka Press Semarang (g) Pengurus FPRB Kecamatan Ngaliyan.

3.2.3. Data dan sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar

suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. **Data Primer**, merupakan data yang didapat dari sumber pertama dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer melalui survei (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
- b. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, et.al., 2001). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi.

3.2.4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat dan relevan. Dalam usaha pengumpulan data yang valid maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik *interview* adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya”. *Interview*/wawancara merupakan alat informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (*laten*) maupun yang bersifat *manifest*. Dalam penelitian ini digunakan *interview* bebas terpimpin, sebab di samping diberi kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, juga *interview* mengarahkan dalam proses tanya jawab menuju persoalannya, sehingga dalam tanya jawab ini sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang mengetahui secara teknis dari kegiatan musrenbang, kemitraan atau kolaborasi dari dunia usaha, kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan antara lain Camat Ngaliyan, 5 Lurah di Kecamatan Ngaliyan meliputi Lurah Bringin, Lurah Tambakaji, Lurah Kalipancur, Lurah Bambangkerap, dan Lurah Wonosari. Ketua FPRB Kecamatan Ngaliyan Dunia Usaha, Media Massa dan Universitas Islam Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Adapun yang dimaksud dengan dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari

penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

Dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan rekaman aktivitas yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, melalui foto ataupun pada tingkatan rekaman hasil wawancara. Dokumentasi digunakan penulis untuk memberikan kemudahan dalam menggali data saat dilakukan pengolahan data.

c. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku – buku referensi, laporan – laporan, majalah – majalah, jurnal – jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Studi pustaka yang digunakan yaitu hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul.

d. Observasi

Suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sistematis melalui pengamatan langsung di tempat penelitian / objek penelitian yaitu Kecamatan Ngaliyan agar data-data yang didapat cukup valid dan sesuai dengan yang diinginkan.

3.2.5. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi, oleh kaarena itu seseorang informan harus benar-benar tahu atau merupakan pelaku

yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih informan harus dilihat dari kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maka teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah sistem *purposive sample*, yakni sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu. Dan untuk menganalisa perkembangan informasi maupun sumbernya menggunakan prinsip "*snowball sampling*" (sampel bola salju) yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian informan ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel semakin banyak, artinya peneliti menunjuk salah satu *key informan* dan kemudian *key informan* tersebut menunjuk informan selanjutnya (Sugiyono, 2008:97).

Bertitik tolak dari penjabaran tersebut, maka penulis memilih informan dari:

1. Camat Ngaliyan
2. Lurah Bringin, Lurah Tambakaji, Lurah Kalipancur, Lurah Bambankerep, dan Lurah Wonosari
3. Ketua Forum PRB Kecamatan Ngaliyan
4. Dunia Usaha antara lain dari PT Sango Ceramis Indonesia dan perwakilan dari PT Indofood Sukses Makmur CBP
5. Media Massa PT Suara Merdeka Press Semarang
6. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Jumlah responden yang dilibatkan pada penelitian ini adalah subyek yang terlibat secara langsung dalam upaya penanggulangan bencana baik dalam mitigasi struktural atau mitigasi non struktural.

3.2.6. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul (Danim :2002,209). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data dan menyajikan data tersebut kepada pihak lain tentang temuan di tempat penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara melakukan analisa terhadap data tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka analisis data berproses secara induktif dikarenakan beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan–kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti–responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, analisis induktif dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar yang lain. Keempat, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan–hubungan dan

kelima, dapat memperhitungkan nilai–nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik (Moleong, 2007:10).

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) menyatakan bahwa ”Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*”. Ketiga proses analisis data tersebut dapat dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan elemen pertama dalam suatu proses analisis yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah suatu kegiatan yang nantinya dalam penelitian ini akan melakukan suatu proses terperinci yang mencakup: Pertama, data dan informasi yang diperoleh di lapangan dalam bentuk rekaman (suara atau video), foto, atau tulisan harus di diterjemahkan dalam sebuah laporan tertulis. Kedua, laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok. Ketiga, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai pola dan temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, disusun secara sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting,

sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi akan lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk melanjutkan keproses analisis selanjutnya.

2. Sajian Data (*Data Display*)

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsikan dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang disajikan merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:249) menyatakan bahwa, ” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif ”. Untuk mempermudah sajian data digunakan skema, matrik, jaringan berkait kegiatan dan tabel apabila diperlukan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan dan verifikasi adalah kegiatan analisis ketiga yang berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini pada awalnya masih kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan mempunyai landasan yang kuat

terhadap fenomena yang ada. Untuk menguatkan kesimpulan peran verifikasi sangat penting, karena dalam setiap penarikan kesimpulan yang diikuti proses verifikasi akan membuat suatu kesimpulan mempunyai dasar kebenaran dalam menjawab suatu permasalahan atau fenomena.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

4. Keabsahan Data

Menurut Moleong (2005:320), yang dimaksud dengan keabsahan data adalah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menentukan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan kriteria pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria berikut

1. Kepercayaan (*kredibilitas*)

Kriteria ini menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif, berfungsi: melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya akan dicapai, dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferbility*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.

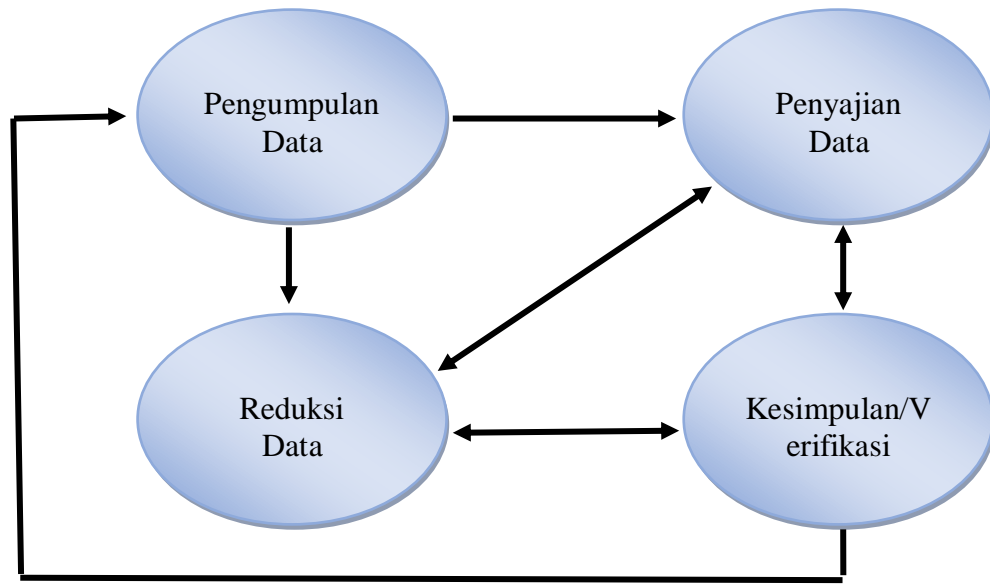
3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi dari konsep reliabilitas. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian merupakan persamaan konsep objektivitas dalam pendekatan nonkualitatif. Dalam objektivitas, sesuatu dikatakan objektif atau tidak berdasarkan pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Selain hal tersebut, menurut Scriven (1971) masih terdapat unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas. Hal tersebut digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objektif, maka dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.

Proses analisis data dalam penelitian ini tergambar dalam teori Milnes & Huberman (2018: 22) sebagai berikut



Milnes & Huberman (2018: 22)
Gambar 6 Proses Analisis Data

3.2.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dalam kajian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pemilihan lokasi dilandasi oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang merupakan kecamatan yang memiliki jenis ancaman bencana tinggi dan terdapat beragam jenis ancamannya.
- b) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang merupakan satu-satunya kecamatan yang sudah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan dan berjalan dengan baik.

- c) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang melaksanakan kegiatan musrenbang secara rutin dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang ada.
- d) Kolaborasi dan kontribusi nyata dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan yang ada di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang membantu kegiatan Penanggulangan Bencana.

Sedangkan jadwal penelitian dari penyusunan proposal, penelitian lapangan, penyusunan laporan penelitian dari bulan Juni sampai Agustus 2025

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan			
		Juni'25	Juli'25	Agust'25	Sept'25
1	Perencanaan				
2	Penyusunan Proposal				
3	Asistensi				
4	Seminar Proposal				
5	Penelitian				
6	Asistensi				
7	Penyusunan hasil lapangan				
8	Seminar hasil				
9	Asistensi				
10	Seminar Akhir				

Sumber : hasil analisis dari peneliti 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGALIYAN

4.1.1. Profil Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu. Sebelum menjadi sebuah Kecamatan sendiri, Ngaliyan merupakan Kelurahan di dalam wilayah Kecamatan Tugu. Namun, melihat potensi pengembangan dan luas wilayahnya, maka akhirnya Ngaliyan berubah menjadi sebuah Kecamatan.

Kecamatan Ngaliyan yang berada di sebelah barat pusat kota Semarang mempunyai posisi yang strategis karena menjadi penghubung antara Semarang dan Kendal. Kecamatan Ngaliyan memiliki fasilitas umum yang relatif baik. Mulai dari pasar tradisional, sarana peribadatan (masjid, gereja), sekolah umum, perumahan dan banyak lagi. Secara geografis Kecamatan Ngaliyan terletak pada koordinat *Latitude* 6°59'47.595"S 110°20'53.301"E *Longitude* 7°0'23"S 110°20'54"E Adapun keadaan umum lokasi penelitian di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang akan dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- 1) Keadaan Geografis
- 2) Keadaan Demografis
- 3) Keadaan Sosial Budaya Dan Ekonomi
- 4) Kondisi Hasil Kajian Risiko Bencana
- 5) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

4.1.1.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah \pm 4.299,9 Ha dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 130 dan 922 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan lahan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang didominasi oleh lahan campuran dan pertanian lahan basah, dengan adanya juga lahan permukiman dan industri. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan pada lahan campuran dan penurunan pada lahan pertanian lahan basah. Berikut adalah rincianya *Lahan Campuran*: Mengalami peningkatan luas sebesar 68,03 Ha (1,49%). *Pertanian Lahan Basah*: Mengalami penurunan luas sebesar 19,56 Ha (0,43%). *Permukiman dan Industri*: Termasuk dalam penggunaan lahan bukan pertanian dan cenderung meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. *Kesesuaian Penggunaan Lahan*: Sebagian besar penggunaan lahan di Ngaliyan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, Kecamatan Ngaliyan mengalami perkembangan penggunaan lahan yang dinamis, dengan adanya transformasi dari lahan pertanian ke lahan campuran dan permukiman, seiring dengan pertumbuhan kota Semarang.

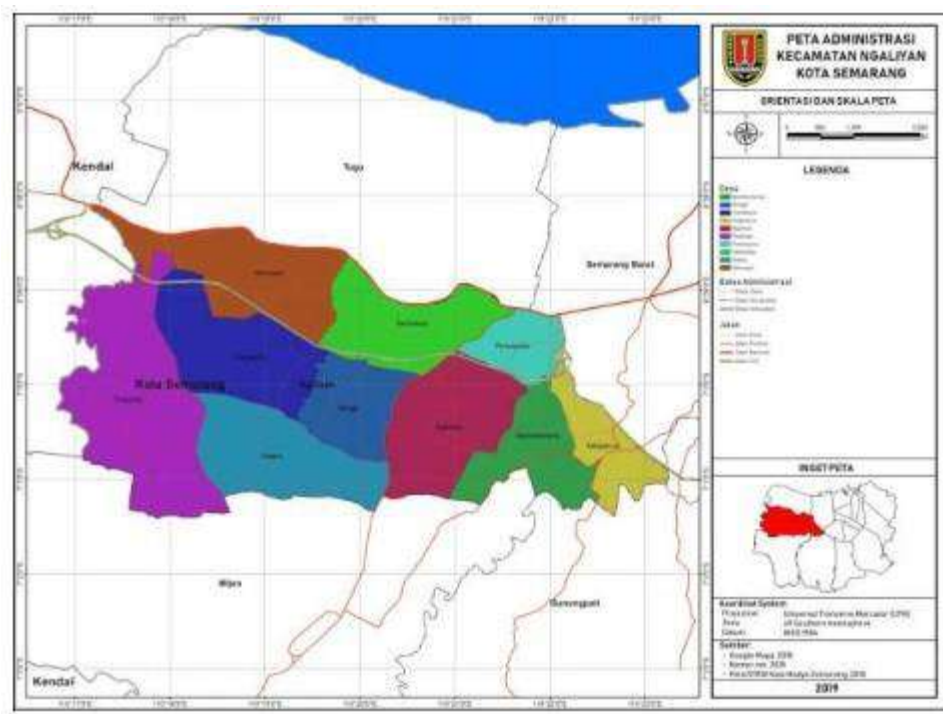
Sedangkan suhu Pada siang hari (12.00-15.00 WIB), suhu diperkirakan sekitar 30°C, dengan kondisi cerah atau cerah berawan. Menjelang sore dan malam hari (16.00-23.00 WIB), suhu akan turun menjadi 28-24°C. Ketinggian Wilayah dari permukaan air laut mencapai 11 mdpl dengan

lokasi kantor kecamatan Ngaliyan yang berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan. Sedangkan Kecamatan Ngaliyan memiliki batas administratif kecamatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Berikut disajikan peta Kecamatan Ngaliyan yang diambil dari

<http://openstreetmap.id/peta-kelurahan-semarang-kecamatan-a-n/>



Sumber : <http://openstreetmap.id/peta-kelurahan-semarang-kecamatan-a-n/>

Gambar IV. 1. Kecamatan Ngaliyan

Wilayah Kecamatan Ngaliyan secara morfologi merupakan daerah yang sebagian termasuk dataran tinggi daerah berbukit berelief halus dan sedang dan merupakan daerah perbukitan tanah liat (lempung). Adapun penggunaan tanah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel IV.1

Klasifikasi Penggunaan Tanah di Kecamatan Ngaliyan

No	Jenis Tanah	Luasan	Satuan
1	Tanah sawah		
	Tadah Hujan / sawah rendengan	573	Ha
2	Tanah kering		
	Pekarangan/bangunan/emplasement	953,75	Ha
	Tegal/kebun/hutan	1259,25	Ha
	Industri	374	Ha
3	Tanah Basah		
	Embung	2	Ha
4	Tanah keperluan fasilitas umum		
	Lapangan olah raga	10,2	Ha
	Pemukaman	7,76	Ha
5	Lain-lain	2	Ha
	Jumlah	3181,96	Ha

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar tanah di Kecamatan Ngaliyan berupa tegalan/kebun/hutan yaitu 1.259,25 ha, selanjutnya sebanyak 953,75 ha sudah digunakan untuk pekarang/bangunan/emplasement, sebanyak 573 ha digunakan untuk tanah tadah Hujan / sawah rendengan dan sebanyak 374 ha digunakan untuk kawasan industri yang masuk wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Jika melihat dari tabel di atas maka potensi lahan terbesar adalah tegalan/kebun/hutan yang dapat menghasilkan pangan dan hutan di sekitar podorejo, gondorio sebagai penyedia oksigen, pengatur siklus air, pencegah

bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta menjaga keseimbangan iklim global.

4.1.1.2. Keadaan Demografi

Keadaan demografi adalah deskripsi struktur dan penduduk di suatu daerah. Struktur merupakan gambaran atau potret penduduk dari hasil sensus penduduk (cacah jiwa) pada hari sensus tertentu, struktur penduduk meliputi: jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

Ketiga unsur tersebut saling berpengaruh, jika pada suatu penduduk tingkat kelahiran tinggi maka akan berpengaruh pada struktur penduduk di daerah tersebut yaitu prosentase penduduk usia muda jumlahnya akan menjadi lebih besar. Demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu tetapi penduduk sebagai suatu kelompok, jadi yang dimaksud dengan penduduk dalam kajian demografi adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah.

Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 144.342 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki 71.796 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 72.546 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Ngaliyan menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	71.796	49,75%
2	Perempuan	72.546	50,25%
	Jumlah	144.342	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat perbandingan penduduk menurut jenis kelamin (*sex ratio*) yaitu : “perbandingan penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu”. Biasanya dinyatakan bahwa penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan yaitu dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 SR &= \frac{\sum \text{penduduk laki-laki}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \cdot K \\
 &= \frac{71.796}{72.546} \times 100 \\
 &= 0,989662 \times 100 \\
 &= 98,96617 \\
 SR &= \underline{\underline{99}}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa *sex ratio* di Kecamatan Ngaliyan adalah sebesar 100. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 99 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk laki-

laki di Kecamatan Ngaliyan lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. Namun perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan perbedaannya tidak begitu signifikan. Sedangkan penggolongan penduduk menurut usia di Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah	Prosentase
1	Usia 0-4 Tahun	8.673 Jiwa	6,01%
2	Usia 5-9 Tahun	10.831 Jiwa	7,50%
3	Usia 10-14 Tahun	11.512 Jiwa	7,98%
4	Usia 15-19 Tahun	11.525 Jiwa	7,99%
5	Usia 20-24 Tahun	11.374 Jiwa	7,88%
6	Usia 25-29 Tahun	11.019 Jiwa	7,63%
7	Usia 30-34 Tahun	11.127 Jiwa	7,71%
8	Usia 35-39 Tahun	10.270 Jiwa	7,12%
9	Usia 40-44 Tahun	11.589 Jiwa	8,03%
10	Usia 45-49 Tahun	10.931 Jiwa	7,57%
11	Usia 50-54 Tahun	9.969 Jiwa	6,91%
12	Usia 55-59 Tahun	9.165 Jiwa	6,35%
13	Usia 60-64 Tahun	6.933 Jiwa	4,80%
14	Usia 65-69 Tahun	4.809 Jiwa	3,33%
15	Usia 70-74 Tahun	2.567 Jiwa	1,78%
16	Usia 75 Tahun ke Atas	2.048 Jiwa	1,42%
Jumlah		144.342 Jiwa	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, jumlah penduduk yang terbanyak adalah pada kelompok umur 40 – 44 tahun yaitu berjumlah 11.589 jiwa atau 8,03%, Sedangkan jumlah penduduk tersedikit ada di kelompok umur 75 tahun ke

atas dengan jumlah penduduk 2.048 jiwa atau 1,42%. Sedangkan untuk menghitung *Dependency Ratio* (angka ketergantungan) di Kecamatan Ngaliyan dapat dihitung sebagai berikut :

$$DR = \frac{PO (0 \rightarrow 14) + P65}{P (15 \rightarrow 64)} \cdot K$$

$$DR = \frac{31016 + 9424}{103906} \times 100$$

$$DR = \frac{40440}{103906} \times 100$$

$$DR = 0,3892 \times 100$$

$$DR = 38,9198$$

$$DR = \underline{\underline{39}}$$

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung 39 penduduk usia non produktif di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Sedangkan untuk mengetahui angka kepadatan penduduk (*Density of Population*) harus mengetahui terlebih dahulu luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan luas wilayah Kecamatan Ngaliyan adalah: 448,432 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.473 orang, tingkat kepadatan penduduknya dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Angka kepadatan penduduk} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}} \\
 &= \frac{144.342}{4299,9} \\
 &= 33,57 \text{ jiwa/ha} \\
 \text{Dibulatkan} &= 34 \text{ jiwa/ha}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam setiap 1 ha ditempati oleh 34 jiwa. Jadi wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat dikategorikan termasuk wilayah yang jarang penduduknya. Hal ini sesuai dengan tabel VI.1 klasifikasi penggunaan tanah sebanyak 1259,25 ha merupakan tegalan/kebun/hutan.

Sedangkan untuk mengetahui kelompok usia penduduk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada periode Juli 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini

Diagram Batang VI.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Menurut *World Health Organization* (WHO) atau dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi Kesehatan Dunia usia produktif adalah usia

yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan hingga aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, usia produktif penduduk adalah sekitar usia 15-64 tahun. Jika kemudian dikorelasikan dengan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa kelompok usia produktif penduduk Kecamatan Ngaliyan sebanyak 103.902 jiwa atau 71,98%. Sedangkan kategori usia tidak produktif sebanyak 9.424 jiwa atau 6,53% dan usia belum produktif sebanyak 31.016 jiwa atau 21,49%.

4.1.1.3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Keadaan sosial budaya merupakan perilaku masyarakat beserta prakarsa dan hasil karyanya dalam menempuh kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada nilai-nilai/norma-norma yang ada serta menurut kemampuan yang dimilikinya. Sosial budaya mencakup komponen moral, keyakinan, pengetahuan, dan adat istiadat. Sosial budaya tidaklah stagnan, Namun terus mengalami perubahan dan perkembangan. Adanya perkembangan dan perubahan sosial budaya menunjukkan kehidupan manusia yang dinamis. Semua itu bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berbagai bentuk perubahan terus berkembang di masyarakat sampai saat ini. Perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat dapat diatur oleh salah satu norma yaitu norma agama. Sedangkan jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	133.631	92,579%
2	Kristen	6.092	4,220%
3	Katholik	4.376	3,030%
4	Hindu	124	0,090%
5	Budha	102	0,070%
6	Konghucu	3	0,002%
7	Kepercayaan	14	0,009%
Jumlah		144.342	100,00%

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas, data diketahui bahwa agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang didominasi agama Islam sebanyak 92,579% atau 133.631 jiwa. Sisanya merupakan penganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha dengan jumlah pemeluk masing-masing 4,220% atau 6.092 jiwa, 0,65%, 4.376 jiwa dan 3,030%. Hindu sebanyak 124 jiwa atau 0,090%, Budha 102 atau 0,070% dan diikuti agama Konghucu dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masing-masing 3 Jiwa atau 0,002% dan 14 Jiwa atau 0,009%.

Agama adalah salah satu agen paling penting untuk sosialisasi dan kontrol sosial. Agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Agama mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu

maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi dalam naungan Masjid, gereja, atau organisasi kemasyarakatan berbasis agama dapat menjadi media untuk ikut mengedukasi tentang penanggulangan bencana terutama pada mitigasi non struktural agar mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. Sedangkan untuk mengetahui angka tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dari sajian tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 5
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	4.719	25,80%
2	Belum Tamat SD	2.029	11,09%
3	Tamat SD	738	4,03%
4	SLTP	1.598	8,74%
5	SLTA	4.660	25,47%
6	D1 dan D2	87	0,48%
7	D3	1.034	0,57%
8	S1	3.041	16,62%
9	S2	362	1,98%
10	S3	26	0,14%
11	Jumlah	18.294	100,00%

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut pendidikan yang mendominasi ada di kelompok tidak/belum tamat sekolah sebanyak 4.719 orang atau 25,80%. Pendidikan di Kecamatan Ngaliyan masih tergolong rendah, Besarnya masyarakat yang tidak/belum sekolah akan mempersulit dalam upaya penanggulangan bencana terutama

dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan atau simulasi. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Ngaliyan akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan tingkat ekonomi yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehingga upaya untuk membentuk keluarga tangguh untuk menopang kecamatan tangguh bencana juga sulit terwujud. Untuk mengetahui usaha penduduk Kecamatan Ngaliyan dapat di lihat dari sajian tabel berikut ini :

Tabel IV.6
Jumlah Penduduk Menurut Usaha

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Belum / Tidak Bekerja	39.502	44,70%
2	Nelayan	22	0,03%
3	Pelajar dan Mahasiswa	21.806	24,67%
4	Pensiunan	1.761	1,99%
5	Perdagangan	50	0,06%
6	Mengurus Rumah Tangga	17.092	19,34%
7	Wiraswasta	6.483	7,34%
8	Guru	1.329	1,50%
9	Perawat	309	0,355%
10	Pengacara	23	0,03%
11	Pekerjaan Lainnya	-	0,00%
12	Jumlah	88.377	100,00%

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa usaha penduduk Kecamatan Ngaliyan didominasi kelompok belum atau tidak bekerja sebanyak 39.502 orang atau 44,70%. Dan diikuti usia produktif yang masih dalam rentan waktu menuntut ilmu sebanyak 21.806 jiwa atau 24,67%.

Sedangkan rutinitas penduduk Kecamatan Ngaliyan lainnya adalah mengurus rumah tangga sebanyak 17.092 atau 19,34%. Pekerjaan lainnya tersebar dari wiraswasta, guru, pensiunan dan lainnya. Sedangkan untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan penduduk Kecamatan Ngaliyan selama semester 2 tahun 2024 dapat di lihat dari sajian tabel berikut ini :

Tabel IV.7
Prasarana Pendidikan Penduduk

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	PAUD	22
2	TK	15
3	SD	22
4	MI	10
5	SMP/Sederajat	10
6	SMA dan MA	4
7	SMK	2
8	Universitas/Sederajat	3

Sumber : Monografi Kecamatan Ngaliyan Juli 2025

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa prasarana yang diuraikan. Sarana dan prasarana pendidikan tingkat dasar berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswanya. Kecamatan Ngaliyan memiliki sarana pendidikan yang relatif lengkap dari pra sekolah seperti PAUD/RA dan TK sampai dengan sarana pendidikan tinggi yaitu UIN

Walisongo, PGSD Unnes dan Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah (ITESA Muhammadiyah) Semarang yang mendukung bagi terpenuhinya kebutuhan sarana pendidikan bagi warga Kecamatan Ngaliyan.

Sedangkan sarana dan prasarana kesehatan yang menunjang kesehatan masyarakat kecamatan Ngaliyan terdiri dari :

Tabel IV 8
Sarana Kesehatan Penduduk

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	152
2	Pustu	2
3	Poliklinik	7
4	Rumah Sakit Bersalin	0
5	Apotik	8
6	Puskermas tanpa rawat inap	2
7	Puskermas dengan rawat inap	1
8	Rumah Sakit	2
Jumlah		174

Sumber : Data Monografi Kecamatan 2025

Fungsi sarana kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik *promotif* (pencegahan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (pengobatan), maupun *rehabilitatif* (pemulihan). Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Ngaliyan terbilang sangat lengkap, karena kebutuhan pelayanan kesehatan dari wilayah terdepan (posyandu) sudah ada di lokasi RW masing-masing Kelurahan. Sarana kesehatan rumah sakit juga tersedia di Kecamatan Ngaliyan seperti

Rumah Sakit Adhyatma, MPH Tugurejo dan Rumah Sakit Permata Medika yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dan mudah terjangkau.

4.1.1.4. Kondisi Hasil Kajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Untuk melakukan pengkajian risiko bencana dilakukan pendekatan partisipatif. Pengkajian risiko partisipatif partisipatif merupakan suatu cara untuk menilai potensi dampak negatif pada aset penghidupan suatu komunitas yang mungkin timbul akibat kejadian ancaman. Pengkajian risiko bencana partisipatif dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas, pada lingkup ruang hidupnya, menggunakan ukuran-ukuran dan pendekatan baik ilmiah, alamiah dan subyektif.

Beberapa kegiatan Pengkajian risiko bencana partisipatif meliputi kegiatan Pendekatan Aset Penghidupan, Penilaian Ancaman dan Ragam Jenis Ancaman, Penilaian Kerentanan, Penilaian Kapasitas, Penilaian Risiko Bencana Dan Penetapan Rekomendasi Aksi, Pemetaan Risiko Bencana.

Berikut hasil kajian risiko bencana Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pemeringkatan Ancaman Bencana

Setiap jenis ancaman memiliki perbedaan dampak dan kemungkinan kejadian. Diperlukan penilaian peringkat ancaman untuk memahami dampak dan kemungkinan kejadian. Peringkat ancaman akan memperlihatkan jenis ancaman yang sering terjadi dengan indikator pemeringkatan yaitu perkiraan dampak dan kemungkinan terjadi.

Tabel IV. 9
Pemeringkatan Ancaman

NO	RAGAM ANCAMAN	KEMUNGKINAN TERJADI	PERKIRAAN DAMPAK	TOTAL
1	Banjir	4	3	7
2	Tanah Longsor	4	2	6
3	Kebakaran Rumah	2	2	4
4	Narkoba	4	1	5
5	Tawuran Antar Kampung	1	1	2
6	Miras	4	1	5
7	Angin Puting Beliung	4	2	6
8	Kebakaran Hutan & Padang	3	1	4
9	Kekeringan	3	3	6

NO	RAGAM ANCAMAN	KEMUNGKINAN TERJADI	PERKIRAAN DAMPAK	TOTAL
10	Demam Berdarah Dengue	4	1	5

Sumber data : hasil Kajian Bencana 2024

Untuk dapat menilai kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak dari jenis ancaman bencana yang ada di Kecamatan Ngaliyan maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV 10

Keterangan Nilai kemungkinan dan perkiraan dampak

Kemungkinan Terjadi	Perkiraan Dampak
Nilai 1 = Sangat kecil kemungkinan terjadi	Nilai 1 = Tidak parah
Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi	Nilai 2 = Agak parah
Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi	Nilai 3 = Parah
Nilai 4 = Pasti terjadi	Nilai 4 = Sangat parah

Sumber : Modul Pengkajian risiko Bencana 2023

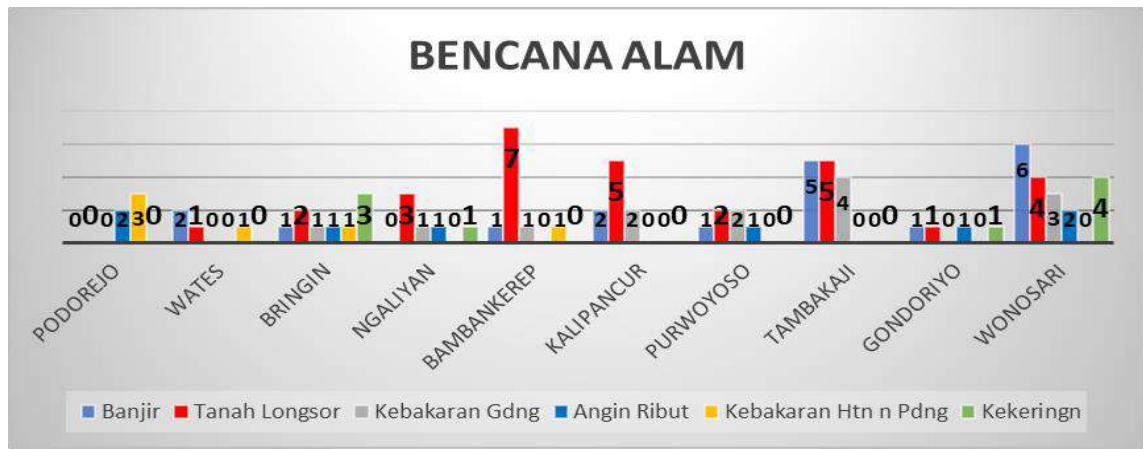
Dari tabel 4.1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jenis ancaman yang sering terjadi di Kecamatan Ngaliyan adalah bencana banjir dengan nilai total 7 artinya kejadian bencana pasti terjadi di setiap tahunnya dan dampak dari banjir tersebut sangat parah. Hal tersebut sering terjadi di hampir kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan meliputi Kelurahan Wonosari, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Bringin, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Ngaliyan dan lainnya.

Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ngaliyan adalah bencana Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Gedung, Angin Puting

beliung, Kekeringan dan kebakaran hutan dan padang ilalang. Grafik di bawah menjelaskan kejadian bencana alam yang telah terjadi.

Diagram IV. 1

Bencana Alam

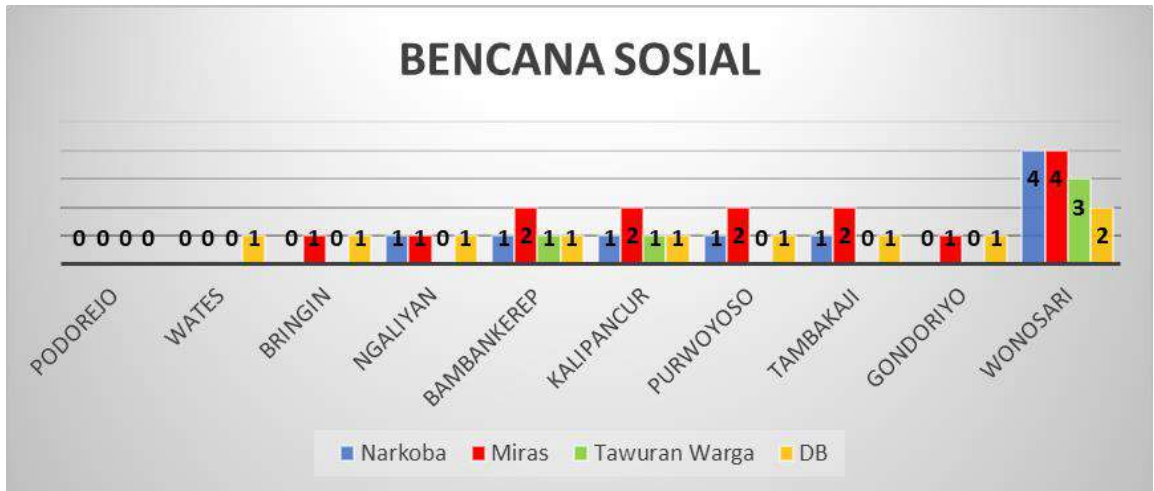


Sumber : Laporan Kejadian Bencana BPBD, 2024

Sedangkan bencana sosial yang terjadi di Kecamatan Ngaliyan adalah Peredaran dan konsumsi narkoba, Minuman keras, tawuran warga atau tawuran siswa sekolah dan Demam Berdarah.

Berikut grafik bencana sosial yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ngaliyan

Diagram IV. 2
Bencana Sosial



Sumber : Laporan Kejadian Bencana BPBD, 2024

2. Karakteristik Ancaman Banjir

Setiap bentuk ancaman wajib dikenali karakter atau ciri-cirinya. Karakter atau ciri-ciri tersebut dapat diekspresikan dengan ukuran-ukuran ilmiah maupun alamiah. Berikut adalah hasil karakteristik ancaman banjir yang sering terjadi di Kecamatan Ngaliyan tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.11

Karakter Ancaman Banjir

Jenis Ancaman	: Banjir	
Kelurahan	: 10 Kelurahan	
Kecamatan	: Kecamatan Ngaliyan	
Kota	: Semarang	
Provinsi	: Jawa Tengah	
KARAKTER	KETERANGAN	ISIAN
Asal/Penyebab	Sumber atau penyebab ancaman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Curah hujan tinggi • Penyempitan DAS Beringin • Irigasi saluran air • Buang sampah sembarangan • Banyak perumahan • Kekurangan resapan • Pendangkalan DAS Beringin
Faktor Perusak	Bagian dari ancaman bencana yang menyebabkan kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • Genangan Air • Material yang dibawa Banjir (Kayu, Kasur dll) • Fasilitas drainase tidak memadai
Tanda Peringatan	Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman bencana datang	<ul style="list-style-type: none"> • Hujan dengan intensitas tinggi 2-3 Jam • Jika wilayah hulu hujan > 3 Jam
Sela Waktu	Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Jam jika hujan lokal • lebih dari 4 Jam jika hujan kiriman
Kecepatan Hadir	Kecepatan ancaman bencana	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Jam • lebih dari 4 Jam
Perioda	Masa atau siklus ancaman bencana	September - Februari (6 bulan dalam 1 tahun)
Frekuensi	Jumlah perulangan kejadian ancaman bencana setiap periode	3 - 4 Kali dalam 6 bulan
Durasi	Lama setiap kejadian ancaman bencana	3 - 10 Hari
Intensitas	Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman	5 sampai 6 Kelurahan

Posisi	Jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset-aset penting lainnya (sekolah, pasar, rumah ibadah, rumah sakit/ puskesmas,	5-10 Meter dari bibir sungai jika intensitas banjir tinggi
--------	---	--

Sumber data : hasil Kajian Bencana 2024

Sedangkan untuk mengetahui penilaian kerentanan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada tabel berikut :

3. Penilaian Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Penilaian kerentanan merupakan tahapan untuk mengidentifikasi jenis dan faktor penyebab kerentanan masyarakat. Faktor penyebab kerentanan terhadap bencana disebabkan faktor biologis, geografis, ekonomi, politik, budaya dan teknologi di wilayah tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk menyepakati strategi yang perlu dilakukan untuk mengurangi ancaman tersebut.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan penilaian kerentanan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang hasil dari kajian risiko yang dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan masing-masing perwakilan dari kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.

. Tabel IV. 12

Penilaian Kerentanan

Jenis Ancaman	: Banjir
Kelurahan	: 10 Kelurahan
Kecamatan	: Kecamatan Ngaliyan
Kota	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah

Karakter	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset
Manusia	Meninggal 450 Jiwa	Banyaknya yang belum mengetahui jalur evakuasi
	Luka luka 525 jiwa	Kurangnya Pengetahuan Mengenai Kebencanaan
	Hilang 225 jiwa	kelompok rentan (Lansia, anak-anak, Disabilitas)
	Kehilangan keterampilan 659 jiwa	Tidak adanya jalur evakuasi menuju tempat aman
	Mengungsi 1222 jiwa	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai tindakan kesiapsiagaan
Sosial	Terdapat lebih dari 20 Lembaga Organisasi baik formal maupun non formal di Kecamatan Ngaliyan	Gangguan fungsi organisasi dan kemasyarakatan
	Gangguan kerukunan warga Gangguan fungsi organisasi sosial Gangguan/hambatan partisipasi Gangguan kekerabatan keluarga	Tim Siaga Bencana Kelurahan belum bekerja secara maksimal, Anggaran kebencanaan belum sepenuhnya masuk dalam musrenbangkel
Ekonomi/Finansial	Kehilangan sumber penghasilan 600 jiwa	Banyaknya pedagang dan transportasi tidak bisa
	Kehilangan Harta benda 750 Jiwa	beraktifitas sehingga tidak bisa mendapatkan
	Kehilangan Modal Usaha 1555 Jiwa	Penghasilan dalokasi dekat dengan pantai

Ekonomi/Finansial	Gagal panen 30 Ha Kerusakan/kehilangan harta benda 575 kk	Waktu kejadian terlalu cepat Kurangnya diversifikasi mata pencaharian
	Rusaknya Rumah 670 Bangunan	Banyaknya kehilangan asset dan bangunan sehingga warga tidak mempunyai tempat tinggal, lokasi dekat dengan pantai dan struktur bangunan kurang baik
Fisik/Infrastruktur	Rusaknya Gedung Sekolah 12 Gedung	Memiliki akses jalan yang layak untuk evakuasi
	Rusaknya Kantor, Masjid 25 Gedung	Memiliki lumbung air bersih
	Rusaknya bangunan pasar 1, Bank/BMT	Memiliki lokasi tempat evakuasi sementara di lapangan Kecamatan dan Kelurahan
	Kerusakan jaringan pipa air bersih Kerusakan jaringan listrik/telepon Kerusakan saluran air 2 km Kerusakan tempat kerja Kerusakan fasilitas umum 1 unit	Tidak ada jalur dan rambu evakuasi Permukiman penduduk dekat dengan sumber bencana, Infrastruktur kurang kokoh
	Hilangnya Sumber Air Bersih	Kurangnya warga menggunakan air bersih
Alam/Lingkungan	Rusaknya Hutan	Memiliki hutan untuk penghijauan dan penanggulangan banjir
	Kerusakan sepadan sungai	Lokasi dekat dengan sumber ancaman

Sumber data : hasil Kajian Bencana 2024

Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman/bahaya tertentu. Dari karakter ancaman dapat diperkirakan aset-aset berisiko dan

perkiraan bentuk risikonya. Kemudian kelemahan-kelemahan penyebab aset tersebut berisiko. Harus ada hubungan masuk akal antara aset berisiko, asumsi bentuk risiko dan kelemahan penyebab aset berisiko. Tabel tersebut memperlihatkan dengan jelas kerentanan wilayah Kecamatan Ngaliyan pada jenis ancaman bencana banjir

4. Penilaian Kapasitas

Kemampuan suatu daerah atau masyarakat untuk mengurangi dampak negatif bencana dan memperkuat ketahanan mereka. Ini mencakup semua sumber daya, atribut, dan kekuatan yang tersedia untuk mengelola risiko bencana. Berikut adalah tabel penilaian kapasitas yang menguraikan tentang karakter yang ada kemudian dikorelasikan dengan kekuatan atau potensi yang tersedia untuk mengurangi risiko bencana.

Tabel IV. 13
Penilaian Kapasitas

Jenis Ancaman	: Banjir
Kelurahan	: 10 Kelurahan
Kecamatan	: Kecamatan Ngaliyan
Kota	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah
Karakter	Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana)
Manusia	Memiliki sumber daya manusia
	Dekat Puskesmas Ada dokter/bidan jaga
	Kesepakatan penyusunan rencana evakuasi dan dukungan mobilisasi warga Masyarakat
	Memiliki Relawan Kebencanaan
Sosial	Memiliki banyak lembaga baik formal maupun non formal (kelompok masyarakat peduli, LSM dll)

Ekonomi/Finansial	Memiliki Pasar
	Memiliki Koperasi
	Memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat
Fisik/Infrastruktur	Memiliki lokasi tempat evakuasi sementara di lapangan Kecamatan dan Kelurahan
	Memiliki akses jalan yang layak untuk evakuasi
	Memiliki lumbung air bersih
Alam/Lingkungan	Memiliki tebing penghalang di titik-titik rawan longsor
	Memiliki hutan untuk penghijauan dan penanggulangan banjir

Sumber data : hasil Kajian Bencana 2024

Penilaian kapasitas ini bertujuan untuk membantu komunitas/masyarakat kecamatan memahami kapasitas yang dimiliki baik berupa kapasitas manusia, infrastruktur, sosial/budaya, ekonomi, dan sumberdaya alam. Dengan mengetahui kapasitas yang dimiliki maka masyarakat akan memahami tindakan apa yang dilakukan untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan melakukan mitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Penilaian kapasitas ini berguna sebagai salah satu faktor dalam penilaian risiko. Sedangkan untuk mengetahui rencana aksi yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat pada uraian berikut :

5. Penilaian Risiko Bencana Dan Penetapan Rekomendasi Aksi/Aksi PRB

Penilaian risiko bencana merupakan tahapan untuk mengetahui tinggi atau rendah risiko bencana pada suatu wilayah atau desa atau kelurahan dengan cara membandingkan hasil penilaian kerentanan dengan hasil

penilaian kapasitas yang dimiliki. Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2) kerentanan, dan 3) kapasitas. Pola hubungan tiga faktor tersebut sehingga menghasilkan risiko bencana dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:

$$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman X Kelemahan}}{\text{Kekuatan}}$$

Sumber : Modul Kajian Risiko Bencana, 2016

- a) Tingkat Risiko Tinggi (T) ketika kapasitas yang dimiliki tidak mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, kebutuhan sumberdaya dari luar kecamatan lebih besar daripada sumberdaya kecamatan.
- b) Tingkat Risiko Sedang (S) ketika kapasitas yang dimiliki mampu belum sepenuhnya mampu menghadapi/menyelesaikan kerentanan, sehingga masih membutuhkan bantuan dari luar kecamatan.
- c) Dan Tingkat Risiko Rendah (R) ketika kapasitas yang dimiliki desa sepenuhnya mampu menghadapi kerentanan dan tidak membutuhkan dukungan dari luar kecamatan.

Sedangkan penilaian risiko bencana dan penetapan rekomendasi aksi/aksi PRB di Kecamatan Ngaliyan sesuai dengan tabel IV. 14 berikut

Tabel IV. 14

Rekomendasi kegiatan/Rencana Aksi PRB

Jenis Ancaman	: Banjir
Kelurahan	: 10 Kelurahan
Kecamatan	: Kecamatan Ngaliyan
Kota	: Semarang
Provinsi	: Jawa Tengah

Fase/tahap	Kegiatan	Pemerintah	Masyarakat	Dunia Usaha	Akademi	Media Massa
Pra bencana, saat tidak terjadi bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas) & saat terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan)	Pembuatan Peraturan Penanggulangan Bencana	y				
	Pengajuan kegiatan RPB ke Musrenbang	y	y			
	Sosialisasi kesadaran bencana	y	y	y	y	y
	Pembuatan Early Warning System (EWS)	y		y	y	
	Pembentukan tim siaga bencana	y	y	y	y	y
	Pelatihan evakuasi dan P3K		y	y	y	y
	Pelatihan Dapur Umum		y	y	y	y
	Simulasi bencana Kebakaran		y	y	y	y
	Simulasi bencana Banjir		y	y	y	y
	Simulasi bencana Gempa bumi	y	y	y		
	Pengadaan perlengkapan kebencanaan	y	y	y		
	Pengelolaan tabungan siaga	y	y	y		
	Kajian Risiko Bencana	y	y			
	Penilaian Ketangguhan	y	y			

	Kelurahan					
	Pelatihan Jitu Pasma	y	y			
Saat tanggap darurat	Mengelola logistik pengungsian	y	y	y	y	
	Melakukan evakuasi	y	y	y	y	y
	Mengaktifkan pos pengungsian	y	y			
	Melakukan kajian kerugian	y	y		y	
	Pengamanan Lokasi bencana	y	y			
	Trauma healing		y	y	y	y
Pasca bencana	Sosialisasi tentang pemulihan mental		y	y	y	
	Rekonstruksi/rehabilitasi	y	y	y	y	y
	Pemulihan Aktivitas		y		y	

Sumber data : hasil Kajian Bencana 2024

Bentuk kegiatan yang diusulkan bertujuan mengurangi tingkat risiko dengan mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dan/atau mengurangi ancaman. Kegiatan kolaborasi merupakan upaya untuk meminimalisir semua jenis ancaman sehingga upaya untuk membentuk ketangguhan kecamatan dapat terwujud dan efektivitas kolaborasi dapat menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan bencana.

Rencana aksi komunitas juga untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Rencana aksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu, serta meminimalkan dampak bencana melalui upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

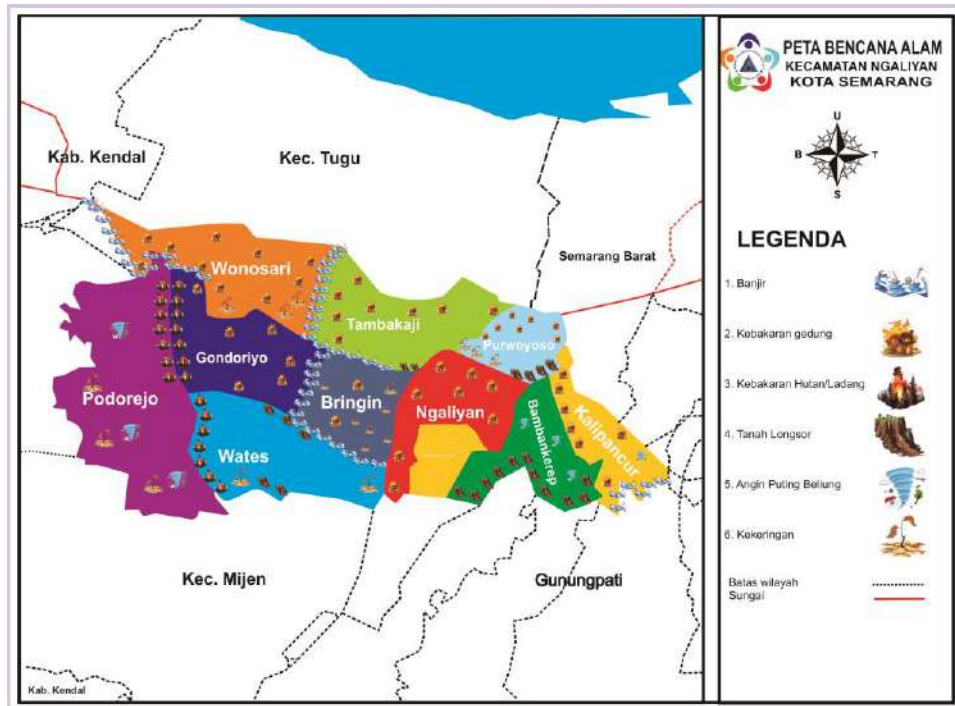
6. Peta Jenis Ancaman dan Peta Kapasitas

6.1. Peta Jenis Ancaman

6.1.1. Peta Bencana Alam

Peta bencana alam adalah representasi visual dari area yang berpotensi terkena dampak bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kekeringan. Peta ini memberikan informasi tentang lokasi dan tingkat risiko suatu daerah terhadap bencana tertentu, serta dapat digunakan untuk perencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Peta ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang tepat. Peta ini meliputi Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran Gedung, Kebakaran Hutan atau Padang. Adapun peta sebagai berikut :



Sumber : Hasil Kajian Risiko, 2024

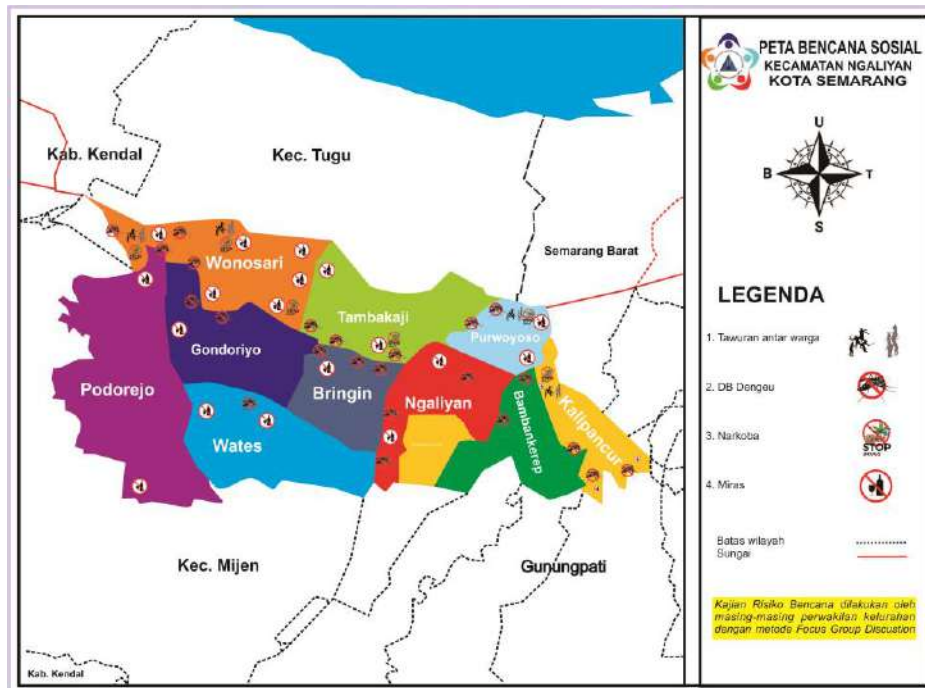
Banjir yang terjadi di Kecamatan Ngaliyan disebabkan karena adanya luapan air dari DAS Beringin, DAS Silandak dan DAS Kaligarang sehingga menyebabkan bencana banjir di Kelurahan Wonosari, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Bringin, Kelurahan Wates, Kelurahan Gondoriyo dan Kelurahan Kalipancur. Intensitas banjir lebih sering terjadi di Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Tambakaji hal tersebut karena secara geografis dua kelurahan itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Selain banjir, bencana yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau terjadi karena banyak daun kering yang mudah tersulut karena cahaya matahari dan perilaku dari petani yang membakar lahan untuk persiapan pertanian menjelang musim penghujan. Kebakaran

perumahan dan gedung lebih disebabkan karena adanya konsleting listrik, karena jumlah penduduk yang padat sering kali kebakaran tersebut menjalar di rumah sekitarnya. Sedangkan bencana tanah longsor biasanya terjadi di wilayah dataran tinggi seperti Kelurahan Bambankerep yang secara geografis terletak di wilayah dataran tinggi.

Sedangkan untuk mengetahui peta bencana sosial yang ada di Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dalam visualisasi gambar berikut ini:

6.1.2. Peta Bencana Sosial

Peta bencana sosial adalah representasi visual dari potensi atau kejadian bencana sosial di suatu wilayah. Peta ini membantu dalam mengidentifikasi lokasi rawan bencana, jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi, serta potensi dampak yang ditimbulkan, baik itu konflik sosial, kerusuhan, atau bentuk gangguan sosial lainnya. Peta ini juga dapat digunakan untuk perencanaan mitigasi, respons, dan pemulihan dari bencana sosial.



Sumber : Hasil Kajian Risiko, 2024

Bencana sosial yang ada di Kecamatan Ngaliyan meliputi bencana tawuran antar warga/siswa, kejadian Demam Berdarag Dengeu, peredaran dan konsumsi narkoba serta konsumsi miras yang mengakibatkan korban jiwa. Bencana sosial sering kali dipandang sebelah mata bagi sebagian besar masyarakat. Padahal jika dilihat dari dampaknya sering kali bencana sosial menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda (biaya pembelian dan perawatan jika sudah terkena) serta efeknya juga pertengkaran hingga perkelahian akibat dari dampak konsumsi narkoba dan miras tersebut.

7. Peta Kapasitas

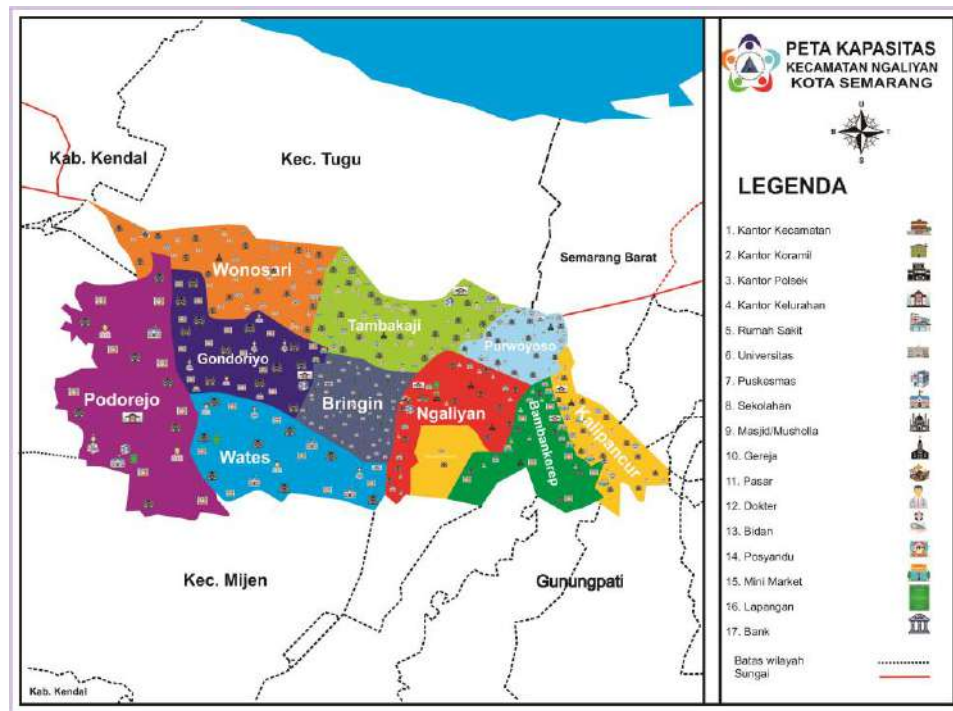
Peta kapasitas dalam konteks kebencanaan adalah representasi visual dari kemampuan suatu wilayah dan masyarakat untuk

menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Peta ini menunjukkan sumber daya, potensi, dan upaya yang ada untuk memitigasi risiko bencana, seperti infrastruktur yang ada, sistem peringatan dini, serta kemampuan evakuasi dan penanganan medis.

Secara lebih rinci, peta kapasitas:

- 1) Menggambarkan potensi dan sumber daya: Peta ini menunjukkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana.
- 2) Menunjukkan kemampuan mitigasi: Peta ini mencakup informasi tentang infrastruktur yang ada, seperti sistem peringatan dini, jalur evakuasi, fasilitas kesehatan, dan organisasi penanggulangan bencana.
- 3) Membantu perencanaan: Peta kapasitas menjadi dasar untuk perencanaan upaya pengurangan risiko bencana dan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- 4) Mendukung pengambilan keputusan: Peta ini membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 5) Memfasilitasi kesiapsiagaan: Peta kapasitas menjadi dasar untuk penyusunan rencana kesiapsiagaan dan tindakan praktis dalam menghadapi bencana.

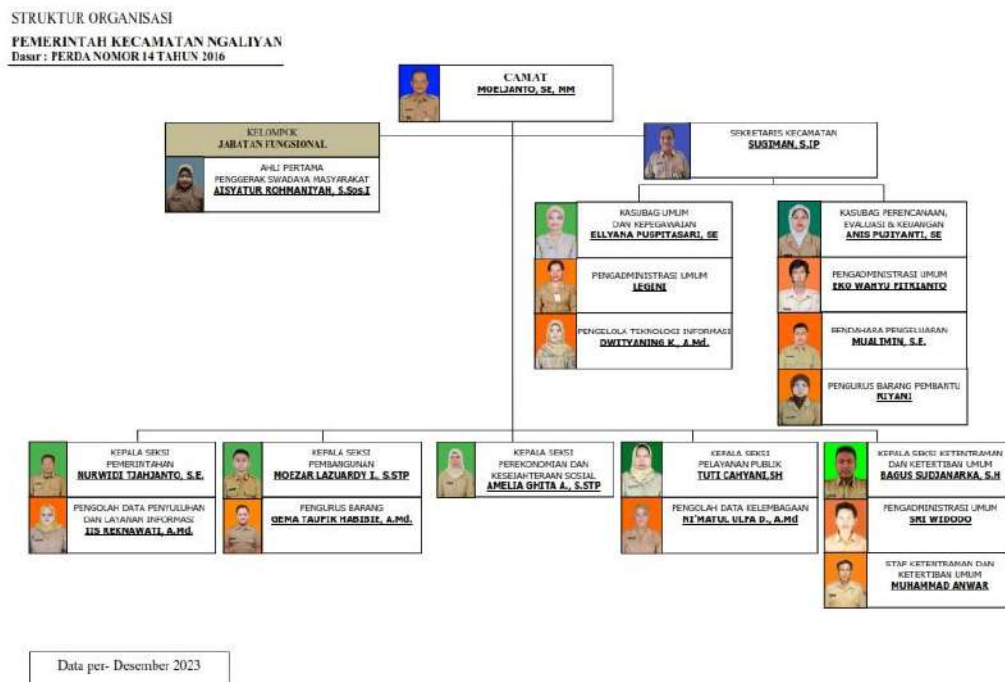
Peta kapasitas, bersama dengan peta ancaman dan peta kerentanan, merupakan komponen penting dalam pengkajian risiko bencana. Pembuatan peta ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pengumpulan data yang akurat dan terpercaya



Sumber : Hasil Kajian Risiko, 2024

4.1.1.5. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan

Merujuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan pada bab II pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Berikut adalah bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Semester II Kecamatan Ngaliyan, 2024

Gambar IV. 2. Struktur Organisasi Kecamatan Ngaliyan

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelurahan, terdiri atas:
 1. Lurah;
 2. Sekretariat;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
 5. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- i. Jabatan Fungsional.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan
- 4) Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan
- 5) Penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan
- 7) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 8) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan
- 10) Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
- 12) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- 14) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat
- 15) Penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi

- 16) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- 17) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 18) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁸

b. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi: sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- 4) pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- 5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kecamatan;
- 6) penyusunan kebijakan di pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;

- 7) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- 9) pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan
- 10) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- 11) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- 12) pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- 13) pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
- 14) pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
- 15) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- 16) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- 17) pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
- 18) pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
- 19) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
- 20) pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
- 21) pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
- 22) pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- 23) pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
- 24) pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;

- 25) pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- 26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- 27) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
- 28) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- 29) pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan.¹⁸

1. *Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai

tugas sebagai berikut :

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- c) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- d) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- e) menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- f) menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- g) menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- h) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- i) menyiapkan kegiatan penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahan Laporan menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
- j) menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan;

- k) menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- l) menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan;¹⁸

2. *Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- c) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f) menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- g) menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- h) menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i) Sistem menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan;
- j) menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- k) menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- l) menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- m) menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- n) menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- o) menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;¹⁸

c. *Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:*

- 1) menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- 4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- 5) kegiatan penyusunan kebijakan Seksi menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
- 6) menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
- 7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- 8) menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- 9) menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- 10) menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;¹⁸

d. *Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :*

- 1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- 3) menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan Pembangunan; penyusunan menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4) menyiapkan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
- 5) menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- 6) menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- 7) menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 8) menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- 9) menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- 10) menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat
- 11) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- 12) menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- 13) menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 14) menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 15) menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolah, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);¹⁸

e. *Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial* mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- 4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan penyusunan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; kebijakan Seksi menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 5) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 6) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- 7) menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 8) menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- 9) menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- 10) menyiapkan kesejahteraan kegiatan fasilitasi keluarga, pemberdayaan program dan peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
- 11) menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- 12) menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- 13) organisasi menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 14) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
- 15) menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
- 16) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;¹⁸

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- 4) menyiapkan pelaksanaan koordinasi; menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- 5) menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan; menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- 6) menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- 7) menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- 8) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik; menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
- 9) menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 10) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- 11) menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 12) menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
- 13) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- 14) menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 15) menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;¹⁸

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 3) menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- 4) menyiapkan kegiatan penyusunan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 5) menyiapkan kegiatan fasilitasi kebijakan pemeliharaan Seksi dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- 7) menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting
- 8) menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 9) menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- 10) menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum; menyiapkan kegiatan

fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;

- 11) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 12) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 13) menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu; menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- 14) menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
- 15) menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 16) menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas; menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;¹⁸

4.1.2. Profil Informan

Informan dalam metode penelitian kualitatif adalah informan adalah seseorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya. Wawancara selama runtutan peristiwa itu adalah bagian dari metoda observasi partisipasi. Enumerasi dan sampel dilakukan melalui survei dan observasi langsung yang dapat dihitung, karena itu dalam kegiatan seperti ini kurang dilakukan partisipasi.¹⁹

Pilihan informan tergantung kepada jenis informasi yang akan dikumpulkan serta yang ditemukan dari teknik bola salju. Dalam teknik

ini peneliti harus mengenal beberapa informan kunci dan meminta mereka memperkenalkannya kepada informan lain. Informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum. Sesuai dengan sifat luwes dalam desain penelitian kualitatif, maka tidak ada rincian jumlah dan tipe informan secara pasti. Hanya ada rencana umum mengenai siapa yang akan diwawancarai dan bagaimana menemukannya di lapangan. Informan dalam penelitian terdiri dari Camat Ngaliyan, Lurah yang memiliki jenis ancaman bencana tinggi meliputi Lurah Bringin, Lurah Tambakaji, Lurah Kalipancur, Wonosari, Lurah Bambangkerap, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sango Ceramics Indonesia, Uin Walisong, Ketua FPRB Kecamatan Ngaliyan dan Perwakilan dari Suara Merdeka. Adapun jumlah informan terbagi sebagaimana berikut ini:

1. Camat Ngaliyan
2. Lurah Bringin
3. Lurah Tambakaji
4. Lurah Kalipancur
5. Lurah Bambangkerap
6. Lurah Wonosari
7. Ketua Forum PRB Kecamatan Ngaliyan
8. PT Sango Ceramis Indonesia
9. PT Indofood Sukses Makmur CBP

10. Media Massa PT Suara Merdeka Press Semarang

11. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Gambaran detail terkait dengan informan pada penelitian yang saat sekarang ini diuraikan berdasarkan jenis kelamin informan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.14
Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki - Laki	11	100,00
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	11	100,00

Sumber : Questioner Penelitian Jenis Kelamin Informan point C

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin informan didominasi laki-laki sebanyak 11 orang atau 100% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 0 orang atau 0,00% yakni Lurah Wates. Jenis kelamin informan tidak mempengaruhi tingkat aktifitas dan pemahaman responden. Jenis kelamin perempuan dari informan adalah Lurah Wates. Informan yang kami wawancarai merupakan representasi dari unsur yang mengetahui detail terkait dengan efektivitas kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan untuk mengetahui identitas informan dari aspek umur dapat disajikan dari tabel berikut:

Tabel IV.15
Rentan Umur Informan

No	Rentang Umur	Jumlah	Persentase
1	20 - 30 Tahun	-	-
2	31 - 40 Tahun	1	9,09
3	41 - 50 Tahun	1	9,09
4	51 - 60 Tahun	9	81,82
5	61 - 70 Tahun	-	-
6	70 tahun ke atas	-	-
	Jumlah	11	

Sumber : Questioner Penelitian Umur Informan point D

Dari tabel di atas sangat jelas bahwa rentang umur informan pada usia 51 – 60 tahun artinya jika merujuk pada kategori *World Health Organization* WHO, masi dalam kategori usia produktif, sehingga dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait dengan efektivitas kolaborasi pentehelix dalam penanggulangan bencana dapat lebih lengkap dan sesuai kondisi lapangan.

Sedangkan untuk mengetahui pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.16
Pendidikan Informan

No	Rentang Umur	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah/Tamat SD	0	-
2	Tamat SLTP atau sederajat	0	-
3	Tamat SLTA atau sederajat	0	-
4	Sarjana Muda/D3	0	-
5	Sarjana S1	7	63,64
6	Sarjana S2/S3	4	36,36
	Jumlah	11	100,00

Sumber : Questioner Penelitian Pendidikan Informan point e

Dari tabel diatas sangat terlihat jelas bahwa rata-rata pendidikan informan sangat tinggi, sebanyak 7 orang atau 63,64% berpendidikan sarjana atau (S1) dan terdapat 4 informan atau 36,36% yang berpendidikan Sarjana (S2 dan S3). Dengan pendidikan tinggi tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep penelitian, mampu memberikan informasi yang lebih kaya dan detail, serta memiliki kemampuan analisis yang lebih baik. Selain itu, informan juga dapat membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian, mengidentifikasi informan kunci, dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang efektivitas kolaborasi pentehelix dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan

Tabel IV.17
Agama Informan

No	Rentang Umur	Jumlah	Persentase
1	Islam	9	81,82
2	Kristen	0	-
3	Katholik	2	18,18
4	Hindu	0	-
5	Budha	0	-
	Jumlah	11	100,00

Sumber : Questioner Penelitian Agama Informan point F

Dari tabel di atas, terdapat 2 jenis agama yang dianut oleh informan dimana yang memeluk agama Islam sebanyak 9 orang atau 81,82% dan yang memeluk agama Khatolik sebanyak 2 orang atau 18,18%.

4.1.3. Regulasi Implementasi Pentahelix

Konsep Pentahelix melibatkan kolaborasi lima elemen kunci: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing. Implementasi pentahelix sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana terutama untuk melakukan mitigasi struktural dan non struktural yang membutuhkan sinergitas bersama. Pentahelix tidak diatur dalam satu regulasi secara spesifik, tetapi dalam penerapan di pelbagai sektor sangat penting.

Beberapa regulasi yang secara eksplisit atau implisit mengatur tentang kolaborasi pentahelix antara lain;

1. Undang – Undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 59 ayat 1 huruf e. menyatakan bahwa; keterlibatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembangunan (rekonstruksi) yang lebih baik
2. Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 75 ayat 1 Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan, point e. menyatakan bahwa partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya rekonstruksi
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang dana bersama penanggulangan bencana
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 12 Tahun 2014 Tentang peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang.
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang
10. Peraturan Walikota Semarang No 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang
11. Peraturan Walikota Semarang No 12 tahun 2022 tentang Bantuan Sosial di Kota Semarang
12. Surat Keputusan Camat Ngaliyan Nomor 360/25/SK/VIII/2022 tentang Pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan Tahun 2022-2025

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1. Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan

Paradigma penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan melibatkan peran serta aktif seluruh unsur masyarakat. Hal ini telah diterapkan dalam sistem penanggulangan bencana nasional Indonesia, melalui pendekatan pentahelix. Pendekatan ini mendorong adanya kolaborasi yang memanfaatkan konteks lokal, kearifan lokal, dan sumber daya lima pemangku kepentingan utama yaitu: pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan OMS/masyarakat. Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

a. *Face to Face Dialogue* (dialog/tatap muka)

Pada tahap *face to face* atau dialog tatap muka para *stakeholders* yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan. Adanya *face to face* atau dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, tanpa adanya dialog tatap muka pada

awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terjadi *face to face* atau dialog tatap muka dalam upaya PB (pra, tanggap darurat, pasca bencana) para pihak yang berkepentingan (*Pentahelix*) di Kecamatan Ngaliyan.

“Salah upaya untuk PB, kami dari unsur pemerintah Kecamatan Ngaliyan selalu menggandeng semua potensi yang ada di wilayah kami. Upaya rembug dan dialog selalu menjadi point penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kecamatan Ngaliyan” Sebagaimana disampaikan oleh *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*²⁰

“Upaya untuk PB, kami dari unsur pemerintah Kelurahan Bringin selalu menggandeng semua potensi yang ada di wilayah kami. Upaya rembug dan dialog selalu menjadi point penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan Bringin” *Lurah Bringin (Rusly Iswanto)*²¹

“Salah satu upaya untuk penanggulangan bencana kami dari unsur pemerintah Kelurahan Kalipancur selalu menggandeng semua potensi yang ada di wilayah kami. Upaya rembug dan dialog selalu menjadi point penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan kalipancur juga melibatkan KSB, FPRB dan SIBAT” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*²²

“Upaya untuk Penanggulangan bencana kami dari unsur pemerintah Kelurahan Bambankerep selalu menggandeng semua potensi yang ada di wilayah kami. Upaya rembug dan dialog selalu menjadi point penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan Bambankerep juga melibatkan unsur kerelawan lainnya yang ada begitu juga dengan tokoh masyarakat” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*²³

“Dari unsur pemerintah Kelurahan Tambakaji selalu kerjasama terutama yang berpotensi ada di wilayah dan upaya rembug dan dialog selalu menjadi sangat penting untuk penyelesaian

permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan Tambakaji”
*Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*²⁴

“Pemerintah Kelurahan Wonosari selalu bekerjasama terutama yang berpotensi ada di wilayah dan Upaya rebug dan dialog selalu menjadi sangat penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan Tambakaji dengan mengundang Linmas, KSB, FPRB, PKK, FKK dan tokoh masyarakat”
*Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*²⁵

“Proses perencanaan dilakukan melalui dialog agar perencanaan dapat disusun secara matang terlebih untuk penanggulangan bencana”
*Akademi (Margono)*²⁶

Karena PT. Indofood Sukses Makmur berdekatan dengan lingkungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana harus selalu diadakan dialog baik dengan masyarakat dan OPD terutama pemangku wilayah”
*PT. Indofood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*²⁷

“PT. Sango Ceramics Indonesia berdekatan dengan lingkungan masyarakat yang rawan bencana, selalu melakukan dialog dan rebug dalam penanggulangan bencana dengan masyarakat dan OPD terutama pemangku wilayah yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dan Kelurahan Wonosari”
*PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*²⁸

“ya setiap perencanaan dilakukan proses dialog agar target dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahapan bencana selalu ada komunikasi untuk merumuskan langkah dan mengimplementasikannya”
*FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*²⁹

“Setiap upaya Penanggulangan bencana, membutuhkan sinergitas semua unsur. sehingga dialog menjadi key word untuk membangun kolaborasi seperti halnya di penanggulangan kebencanaan di Kecamatan Ngaliyan. Upaya rebug dan dialog selalu menjadi point penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada seperti Pemerintah, Dunia usaha, Masyarakat dalam hal ini adalah Forum PRB, kami (Media Massa) dan akademisi yang saling bahu membahu untuk ketangguhan Kecamatan”
*Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*³⁰

Kemudian hasil wawancara terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut di bawah ini;

“Seluruh potensi yang ada di Kecamatan Ngaliyan Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa. Tetapi unsur lain juga sering kita libatkan untuk penanggulangan bencana seperti pihak TNI, Kepolisian dan lembaga-lembaga sosial lainnya” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*²⁰

“Seluruh potensi yang ada di Kelurahan Bringin Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa. Tetapi unsur lain juga sering kita libatkan untuk penanggulangan bencana seperti pihak TNI, Kepolisian, Koramil, Linmas, KSB, FPRB dan Relawan.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*²¹

“Semua potensi yang ada di Kelurahan Kalipancur kita libatkan baik dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa. Unsur lain yang kita libatkan dalam penanggulangan bencana Koramil, Polsek, Linmas, dan relawan lainnya” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*²²

“Potensi-potensi yang ada di Kelurahan Bambangrepep kita maksimalkan dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa. Tetapi unsur lain juga sering kita libatkan untuk penanggulangan bencana seperti pihak TNI, Kepolisian, Koramil, Linmas, KSB, FPRB, SIBAT, dan relawan lainnya” *Lurah Bambangrepep (Agung Susilo)*²³

“Dari unsur pemerintah Kelurahan Tambakaji selalu kerjasama terutama yang berpotensi ada di wilayah dan upaya rebug dan dialog selalu menjadi sangat penting untuk penyelesaian permasalahan kebencanaan yang ada di Kelurahan Tambakaji” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*²⁴

“Selain Staf kelurahan kita juga melibatkan dunia usaha, masyarakat, akademisi wartawan untuk melibut kegiatan yang ada di kelurahan Tambakaji” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*²⁵

“Unsur pentahelix Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Pewarta dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dalam upaya PB” *UIN Walisongo (Margono)*

“Di wilayah Kecamatan Ngaliyan Kami selalu berdialog dalam upaya penanggulangan bencana baik dengan Pemerintah (kecamatan) Polsek, Koramil, Masyarakat UIN, dan lainnya” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Lingkungan masyarakat, karyawan PT. Sango, pemangku wilayah yaitu kelurahan dan kecamatan” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Semua element yang masuk dalam unsur pentahelix Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Pewarta. Disamping itu juga ada Koramil dan Polsek serta unsur agama yang ada di kecamatan Ngaliyan” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Seluruh potensi yang ada di Kelurahan Bringin Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa. Tetapi unsur lain juga sering kita libatkan untuk penanggulangan bencana seperti pihak TNI (Koramil), Kepolisian (Polsek), Kwarcab (Ubaloka) relawan lainnya.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk mengetahui tentang pertanyaan dari proses dialogue, apakah pihak yang masuk dalam unsur *pentahelix* berperan aktif dalam proses dialog dan/atau upaya penanggulangan bencana?

“Selama ini, keterlibatan pihak terkait (Pentahelix yang meliputi Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa) berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, saya selaku pemangku wilayah menjadi dirigen dalam upaya penanggulangan bencana dan saat terjadi bencana” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Selama ini, keterlibatan pihak terkait (Pentahelix yang meliputi Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa) berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan peran

masing-masing, saya selaku pemangku wilayah menjadi penggerak dalam upaya penanggulangan bencana baik fase pra dan saat terjadi bencana.” *Lurah Bringin (Rusly Iswanto)*

“ya sangat aktif dari pihak pemerintah saya selaku pemangku wilayah harus sering berkomunikasi kepada pihak pentahelix dan sesuai dengan peran masing - masing dalam penanganan bencana” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“ya sangat aktif dari pihak pemerintah saya selaku pemangku wilayah harus sering berkomunikasi kepada pihak pentahelix dan sesuai dengan peran masing - masing dalam penanganan bencana” *Lurah Bambangkerep (Agung Susilo)*

“sangat berperan aktif apalagi pada saat terjadi bencana saling memberikan informasi sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga bencana dapat segera diatasi” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Pihak-pihak yang terkait dalam PB selalu berperan aktif terutama dari perusahaan yang selalu cepat tanggap dalam memberikan bantuan baik logistikselain itu dari pentahelix sendiri sudah berperan sesuai kewenangannya masing - masing” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Dalam pandangan kami berperan aktif, walaupun kami dari unsur Universitas belum dapat berperan secara maksimal” *UIN Walisongo (Margono)*

“satu sama lain sangat berperan aktif apalagi hal dalam hal kemanusiaan agar bencana dapat di bantu secara maksimal” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Sangat berperan aktif apalagi hal dalam hal kemanusiaan (bencana)” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Berperan aktif walaupun ada pihak yang belum dapat berperan secara maksimal antara lain pihak akademisi yang selama ini belum terlibat secara maksimal” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Menurut kami aktif, semua unsur pentahelix terlibat walaupun masih ada dalam pandangan kami unsur yang belum berperan secara maksimal. Tetapi secara kolektif masing - masing sudah

berperan dalam penanganan bencana di Kecamatan Ngaliyan.”
Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)

Selanjutnya untuk mengetahui pertanyaan dari berapa kali proses dialogue dilakukan dalam upaya menggalang potensi kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan? Ada dalam uraian berikut ini;

“Sangat tentatif. Pada saat pra bencana, kami libatkan pihak terkait dalam proses dialog atau musyawarah untuk membantu merumuskan perencanaan berbasis permasalahan kebencanaan. Sengaja saat musyawarah (musrenbang) kita maksimalkan peran pihak pentahelix agar mambu memberikan pemikiran - pemikiran konstruktif sehingga perencanaan sesuai dengan kebutuhan lapangan” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Sesuai kebutuhan dengan melibatkan staf kelurahan,masyarkat, dunia usaha,akademisi,pewartar,lembaga lain yang ada di kelurahan untuk mencapai tujuan yang sama.”
Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)

“Setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan rutin kadang bersamaan dengan rapat koordinasi RW di kelurahan dengan mengundang relawan, KSB, FPRB, SIBAT dan lembaga lain yang ada di Kelurahan Kalipancur” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan rutin kadang bersamaan dengan rapat koordinasi RW di kelurahan dengan mengundang relawan, KSB, FPRB, SIBAT dan lembaga lain yang ada diKelurahan Bambankerep” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Sangat beperan aktif apalagi pada saat terjadi bencana saling memberikan informasi sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga bencana dapat segera diatasi” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Sesuai kebutuhan karena di wilayah kelurahan bambankerep berada di patahan yang kemungkinan besar terjadi bencana longsor dan sering terjadi kebakaran” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Tergantung dari kebutuhan. Jika ditanya berapa kali maka sifatnya tentatif. Jadi proses dialog atau musyawarah sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kolaborasi antar pihak dalam koridor pentahelix” *UIN Walisongo (Margono)*

“Sangat bervariasi sesuai kebutuhan jika musim penghujan dan kemarau bisa dilakukan dengan melihat kondisionalnya” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“sangat bervariasi sesuai kebutuhan jika musim penghujan dan kemarau bisa dilakukan dengan melihat kondisionalnya” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Tergantung dari kebutuhan. Jika ditanya berapa kali maka sifatnya tentatif. Jadi proses dialog atau musyawarah sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kolaborasi antar pihak dalam koridor pentahelix” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Di Wilayah Kecamatan Ngaliyan untuk proses dialog tidak mesti setiap bulan, disesuaikan dengan kebutuhan baik dalam perencanaan, persiapan pelaksanaan dan/atau saat kegawatdaruratan. Seringnya dialog terjadi pada saat perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, simulasi dan lain-lain” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Sedangkan untuk mengetahui pertanyaan dari siapa saja yang sering terlibat dalam kegiatan pra dialogue untuk membangun kolaborasi pentahelix, seberapa sering pra dialogue dilakukan, apa saja rumusan hasil kegiatan pra dialogue tersebut, sebagai berikut?

“Secara prinsip semua elemen yang berkorelasi dengan upaya penanggulangan bencana kita libatkan secara langsung atau

tidak dan mereka (pentahelix) mengambil peran masing-masing. Kegiatan pra dialog kita lakukan secara non formal sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut untuk merumuskan langkah-langkah kedepan guna mengantisipasi terjadinya bencana di Kecamatan Ngaliyan dan membangun komitmen bersama.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Semua elemen dilibatkan dengan upaya penanggulangan bencana atau tidak dan mereka (pentahelix) mengambil peran masing-masing. Kegiatan pra dialog kita lakukan secara non formal sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan tersebut untuk merumuskan langkah-langkah kedepan guna mengantisipasi terjadinya bencana di Kelurahan Bringin untuk membangun komitmen bersama.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“semua terlibat dalam kegiatan pra dialog untuk membangun kolaborasi dan sesuai dengan peran masing masing untuk merumuskan hasil kegiatan yang diharapkan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“semua terlibat dalam kegiatan pra dialog untuk membangun kolaborasi dan sesuai dengan peran masing masing untuk merumuskan hasil kegiatan yang diharapkan” *Lurah Bamankerep (Agung Susilo)*

“Staf kelurahan, masyarakat relawan, wartawan, dunia usaha, akademisi selain itu linmas dan lembaga lain untuk mencapai rumusan hasil kegiatan pra dialog untuk membangun pentahelix untuk menghasilkan komitmen bersama” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Pemerintah yaitu kelurahan ,dunia usaha, masyarakat, wartawan akademisi untuk membangun kolaborasi baik di pra dialogue sehingga hasil hasilnya sesuai dengan program dari masing - masing yang sudah di tentukan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat yang terwakili FPRB, Forum LPMK Kecamatan Ngaliyan, Dunia usaha Universitas Walisongo” *UIN Walisongo (Margono)*

“Yang terlibat RT, RW lingkungan setempat, karyawan PT. Indofood, pihak Kelurahan Dan Kecamatan dalam hal ini yang

menangani penanggulangan bencana dan teman teman FPRB Kecamatan Ngaliyan” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“yang terlibat RT, RW lingkungan setempat, karyawan PT.Sango, pihak Kelurahan Dan Kecamatan dalam hal ini yang menangani penanggulangan bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat yang terwakili FPRB, Forum LPMK Kecamatan Ngaliyan, Dunia usaha yang di wakili PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sango Ceramics Indonesia, UIN Walisongo, Wartawan Suara Merdeka dan Kwarcab Kota Semarang” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Semua unsur yang ada terlibat dalam kegiatan pra dialog untuk membangun kolaborasi dan sesuai dengan peran masing masing untuk merumuskan hasil kegiatan yang diharapkan” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya untuk mengetahui tentang detail dari *point trust building* atau membangun kepercayaan akan disajikan dalam uraian hasil dari kajian lapangan sebagai berikut :

b. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Untuk item dari pertanyaan apakah terjadi hubungan harmonis antara pihak dalam upaya mitigasi bencana di Kecamatan Ngaliyan, diuraikan sebagai berikut;

“Hubungan antar para pihak dalam konstruksi pentahelix sangat harmonis, hal tersebut dapat terlihat dari guyup rukunya dalam upaya penanggulangan bencana. Kami dari pemerintah Kecamatan Ngaliyan semaksimal mungkin membangun hubungan harmonis semua unsur untuk saling bersinergi

membangun ketangguhan Kecamatan Ngaliyan” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Hubungan antar para pihak sangat harmonis, hal tersebut dapat terlihat dari kerjasmanya dalam upaya penanggulangan bencana. Kami dari pemerintah Kelurahan Bringin semaksimal mungkin membangun hubungan dalam mitigasi.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Sinergitas antar pihak -pihak terkait sesuai dengan peran masing - masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulan bencanaapalagi dalam musrenbangkelurahan usulan yang bisa di masukan adalah dari tingkat RT yang ada permasalahan dengan infrastruktur yang di prioritaskan di usulan musrenbang keluarahan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Hubungan harmonis tetap terjaga dengan dilihat kerjasama dengan dunia usaha, masyarakat ,wartawan,pemerintah dan akademisi tidak lupa KSB, FPRB Sibit agar terwujud upaya mitigasi bencana di kelurahan Bambankerep” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“diupayakan hubungan harmonis tetap terjaga dengan dilihat kerjasama dengan dunia usaha, masyarakat ,wartawan,pemerintah dan akademisi agar terwujud upaya mitigasi bencana di kelurahan Tambakaji” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Sangat harmonis karena di Kelurahan Wonosari selalu mengedepankan komunikasi dan keterbuakaan kepada pihak - pihak terkait yang telah membantu dalam bentuk pertanggung jawaban sehingga bisa di percayadalam kegiatan mitigasi bencana khususnya di kelurahan Wonosari” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“hubunganya sangat baik. Semua guyup rukun untuk mitigasi di wilayah Kecamatan Ngaliyan.” *UIN Walisongo (Margono)*

“menurut saya sangat harmonis hubungan antar lembaga di Kecamatan Ngaliyan, meliputi Pemerintah Kecamatan Ngaliyanm Polsek dan koramil sehingga hubungan sangat harmonis, jika terjadi bencan kami merespon cepat dalam

membantu dalam hal Kemanusiaan (bencana)” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Adanya kunjungan kunjungan baik dari opd, Polsek dan koramil sehingga hubungan sangat harmonis apabila terjadi bencana dengan menelpon saja PT.Sango sangat merespon cepat dalam membantu dalam hal Kemanusiaan (bencana)” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“hubunganya sangat harmonis. Itu terlihat dari setiap musyawarah dalam upaya optimalisasi kolaborasi untuk penanggulangan bencana meraka terlibat secara aktif untuk memberikan usulan dan juga merencanakan PB di masing-masing organisasinya.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Hubungan harmonis tetap terjaga dengan dilihat kerjasama dengan dunia usaha, masyarakat , wartawan, pemerintah dan akademisi dan semua unsur relawan lainnya yang ada di wilayah kami” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Sedangkan untuk mengetahui tentang bagaimana cara membangun sinergitas antar pihak agar mau berdialogue untuk penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan sebagai berikut ;

“Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh kami terkait dengan model komitmen bersama atau sinergitas antar pihak adalah dengan mengoptimalkan peran masing-masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana dapat disepakati dalam musrenbang untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Usulan dari tingkat basis RT (yang memiliki permasalahan infrastruktur yang belum maksimal) menjadi prioritas dalam usulan musrenbang, sehingga upaya mitigasi struktural dapat tercapai demi terciptanya ketangguhan” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Yang dilakukan oleh kami terkait dengan komitmen bersama atau sinergitas antar pihak adalah dengan mengoptimalkan peran masing-masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana dapat disepakati dalam musrenbang

untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Usulan dari tingkat basis RT (yang memiliki permasalahan infrastruktur yang belum maksimal) menjadi prioritas dalam usulan musrenbang, sehingga upaya mitigasi strukturan dapat tercapai.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Sinergitas antar pihak -pihak terkait sesuai dengan peran masing - masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencanaapalagi dalam musrenbangkelurahan usulan yang bisa di masukan adalah dari tingkat RT yang ada permasalahan dengan infrastruktur yang di prioritaskan di usulan musrenbang kelurahan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Sinergitas antar pihak -pihak terkait sesuai dengan peran masing - masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencanaapalagi dalam musrenbangkelurahan usulan yang bisa di masukan adalah dari tingkat RT yang ada permasalahan dengan infrastruktur yang di prioritaskan di usulan musrenbang kelurahan” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“untuk membangun sinergitas antar pihak agar mau berdialog saling memberikan kepercayaan dan komunikasi tetap dijaga dengan baik sehinggatujuan penanggulangan bencana berjalan baik dan satu tujuan” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Melalui pendekatan dan aksi nyata agar yang diajak kerjasama untuk membangun sinergitas antar pihak agar mau berdialogue dengan mengoptimalkan peran masing - masing untuk memastikan perencanaan yang dapat disepakati” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, saling percaya, dan pemahaman tujuan bersama. Ini melibatkan menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman berbagi ide, menghargai perbedaan, dan bekerja menuju visi yang sama.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Sangat bervariasi sesuai kebutuhan jika musim penghujan dan kemarau bisa dilakukan dengan melihat kondisionalnya” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Selalu mengedepankan komunikasi, saling bersua dalam forum musyawarah sehingga satu sama lain dapat saling bersinergi”
PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)

“Melalui pendekatan komunikasi yang efektif, saling percaya, dan pemahaman tujuan bersama. Ini melibatkan menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman berbagi ide, menghargai perbedaan, dan bekerja menuju visi yang sama.”
FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)

“Langkah yang sudah dilakukan terkait dengan sinergitas antar pihak adalah dengan mengoptimalkan peran masing-masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana dapat disepakati dalam musrenbang untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Usulan dari tingkat basis RT (yang memiliki permasalahan infrastruktur yang belum maksimal) menjadi prioritas dalam usulan musrenbang, sehingga upaya mitigasi struktural dapat tercapai demi terciptanya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien”
Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)

c. *Commitment to Process* (komitmen bersama)

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah selama ini sudah ada komitmen bersama (*pentahelix*) dalam perencanaan musrenbang kelurahan, kecamatan dan *Corporate Responsibility Social* (CSR) untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana, dapat diuraikan dari hasil wawancara berikut ini;

“Jika merujuknya dalam dokumen komitmen bersama, belum ada. Akan tetapi pembicaraan dan aksi bersama sudah dan sering kita lakukan secara bersama baik dengan masyarakat (FPRB) dengan dunia usaha, media massa dan akademisi. Saat murenbang kelurahan sampai musrenbang kecamatan, semua unsur kita libatkan sehingga hasil musrenbang merupakan perumusan partisipatif komprehensif”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“Komitmens sudah ada dan berjalan dengan baik intinya mereka mau membantu dan mendukung kegiatan yang ada di kelurahan apalagi tentang kebencanaan lebih tepatnya jika diwilayah RT,RW ada usulan wilayah yang jalan rusa, pengaspalan,perbaikan talud dll dapat diusulkan pada musrenbang kelurahan” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“komitmen bersama sudah ada antara pentahelix (pemerintah, dunia usaha masyarakat, wartawan dan akadeemisi)jika ada wilayah RT ada kerusakan di wilayah dan fasum bisa diusulkan pada saat musrenbang kelurahan jika ada kegiatan pelatihan bisa mengajukan bantuan kepada CSR yang ada” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“komitmen bersama sudah ada antara pentahelix (pemerintah, dunia usaha masyarakat, wartawan dan akadeemisi)jika ada wilayah RT ada kerusakan di wilayah dan fasum bisa diusulkan pada saat musrenbang kelurahan jika ada kegiatan pelatihan bisa mengajukan bantuan kepada CSR yang ada” *Lurah Bamankerep (Agung Susilo)*

“komitmen bersama sudah ada antara pentahelix (pemerintah, dunia usaha masyarakat, wartawan dan akadeemisi)jika ada wilayah RT ada infrastrukuttur ada yang rusak saat musrenbang kelurahan j bisa diusulkan untuk pembangunan jika ada kegiatan pelatihan bisa mengajukan bantuan kepada CSR yang ada” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Untuk komitmen bersama belum ada tetapi setiap kali ada kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan pentahelix selalu dilibatkan apalagi dalam kegiatan musrenbangkel karena peran penting dari masing - masing sangat dibutuhkan untuk” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan belum maksimal dan belum menyentuh pada pelibatan semua stakholder kebencanaan dalam kegiatan musrenbangkel/kec.” *UIN Walisongo (Margono)*

“komitmen bersama sudah ada dengan bukti setiap ada kejadian bencana, kami dari pihak PT Indofood Sukses Makmur selalu siap untuk meberikan bantuan baik logistik yang dibutuhkan

oleh korban bencana sesuai dengan kapasitas CSR kami” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“komitmen bersama sudah ada dengan bukti setiap ada kejadian bencana PT, Sango selalu siap untuk memberikan bantuan baik logistik maupun dana apalagi untuk bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“sudah dimana komitmen itu tertuang dalam perencanaan musrenbang kelurahan banyak mengintervensi mitigasi struktural di wilayah kelurahan masing-masing. Begitu juga dengan CSR di perusahaan yang ada di Kecamatan Ngaliyan terutama dari PT Sango Ceramics Indonesia dan PT Infood Sukses Makmur Tbk yang selalu mensupport kegawatdaruratan di wilayah kecamatan Ngaliyan yang terdampak bencana.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Komitmen bersama secara kodifikasi belum ada akan tetapi komitmen bersama untuk saling bahu membahu dalam upaya penanggulangan bencana sudah ada diantara unsur pentahelix (pemerintah, dunia usaha masyarakat, wartawan dan akademisi” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Urian dari pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membangun komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Ngaliyan?

“Pertama, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kecamatan Ngaliyan. Kedua, komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan. Ketiga, menciptakan lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen. Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan komitmen tetap kuat dan relevan sehingga goal gether dapat tercapai secara maksimal” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan kesepakatan tujuan bersama yaitu Ketangguhan kelurahan Bringin komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun

kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan, dan terciptanya lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kelurahan Kalipancur komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan. Menciptakan lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen. valuasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan komitmen tetap kuat dan relevan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kelurahan Bampakerep” *Lurah Bampakerep (Agung Susilo)*

“Pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kelurahan Tambakaji komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan. Menciptakan lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen. valuasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan komitmen tetap kuat dan relevan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“saling terbuka dalam berkomunikasi untuk membangun kepercayaan dan menghargai perbedaan pendapat sehingga pentahelix merasa di hargai dan bisa menjadi komitmen sehingga tujuan penanggulangan bencana bisa tercaai sesuai dengan harapan bersama untuk menuju ketangguhan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Melalui membutuhkan komunikasi yang efektif, tujuan yang jelas, saling percaya, dan lingkungan yang positif. Penting untuk membangun hubungan yang kuat berdasarkan rasa saling menghargai, kesetaraan, dan dukungan satu sama lain. Selain

itu, perlu adanya kesediaan untuk berkorban dan menyelesaikan masalah dengan baik.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Komitmen bersama terbentuk melalui leadership Camat Ngaliyan. Saling berkunjung, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang sudah ada dan diikat dalam Forum PRB menjadi salah satu upaya membangun komitmen tersebut” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“saling berkunjung , memberikan kepercayaan dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang sudah ada” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Melalui membutuhkan komunikasi yang efektif, tujuan yang jelas, saling percaya, dan lingkungan yang positif. Penting untuk membangun hubungan yang kuat berdasarkan rasa saling menghargai, kesetaraan, dan dukungan satu sama lain. Selain itu, perlu adanya kesediaan untuk berkorban dan menyelesaikan masalah dengan baik.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Agar dapat membangun Komitmen bersama harus melalui beberapa langkah antara lain, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kecamatan Ngaliyan. Komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan. Menciptakan lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen. Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan komitmen tetap kuat dan relevan sehingga goal gether dapat tercapai secara maksimal” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk mengetahui tentang pertanyaan apakah unsur *pentahelix* terlibat dalam komitmen bersama tersebut serta apakah komitmen bersama tersebut tertuang dalam berita acara yang di tanda tangani para pihak terurai sebagai berikut;

“Seperti yang saya sampaikan di atas, semua unsur kita libatkan secara kolaboratif, namun komitmen bersama dalam upaya PB belum kita tuangkan dalam bentuk berita acara bersama, tapi saya yakin semua berkomitmen untuk saling bahu membahu dalam upaya PB di Kecamatan Ngaliyan” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Semua unsur dilibatkan secara kolaboratif, namun komitmen bersama dalam upaya PB ,belum dalam bentuk berita acara bersama, tetapi saling membahu dalam upaya PB di Kelurahan Bringin.” *Lurah Bringin (Rusly Iswanto)*

“Semua unsur dilibatkan namun komitmen bersama dalam upaya Penanggulangan bencana ,belum dalam bentuk berita acara bersama, tetapi saling membahu dalam upaya Penanggulangan bencana di Kelurahan Kalipancur dan sesuai dengan harapan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Semua unsur dilibatkan namun komitmen bersama dalam upaya Penanggulangan bencana ,belum dalam bentuk berita acara bersama, tetapi saling membahu dalam upaya penanggulangan bencana di Kelurahan Bambankerep dan sesuai dengan harapan” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“semua pentahelix dilibatkan supaya terjaga komitmen bersama tetapi tidak ada berita acara yang di tanda tangani para pihak tetapi mereka dengan kesadaran masing – masing sudah melakukan sesuai apa yang harus dilakukan” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Penanggulan bencana semua unsur sebisa mungkin di libatkan untuk menghasilkan komitmen meskipun belum tertuang dalam berita acara yang di tanda tangani oleh semua pihak tetapi jika terjadi bencana masing - masing sudah menempatkan siapa dan harus berbuat apa” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan belum ada dalam bentuk Berita Acara yang disepakati. Akan tetapi komitmen itu sudah terbangun dari masing-masing unsur pentahelix yang akan berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan.” *UIN Walisongo (Margono)*

“PT. Indofood Sukses Makmur semua karyawan dilibatkan secara kolaboratif, komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana, sudah dalam bentuk berita acara karena pentingan rasa kemanusiaan karena di wilayah sering terjadi bencana dan semua disiapkan lebih awal” *PT. Indofood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“PT Sango Ceramics Indonesia dan semua karyawan dilibatkan secara kolaboratif, komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana sudah dalam bentuk berita acara karena pentingan rasa kemanusiaan karena di wilayah sering terjadi bencana dan semua disiapkan lebih awal” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Komitmen bersama dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan belum ada dalam bentuk Berita Acara yang disepakati. Akan tetapi komitmen itu sudah terbangun dari masing-masing unsur pentahelix yang akan berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Komitmen bersama dalam bentuk Berita Acara yang disepakati dan di tandatangi bersama sepemahaman saya belum ada karena saya merasa belum pernah menandatangani dokumen tersebut. Akan tetapi komitmen itu sudah terbangun dari masing-masing unsur pentahelix yang akan berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat dan saat pasca bencana.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya apakah di kecamatan atau kelurahan terdapat dokumen Rencana penanggulangan Bencana (RPB) jika ya, apakah menjadi acuan dalam mitigasi bencana ? berikut uraian hasil dari survey lapangan;

“Sepengetahuan saya sudah ada dokumen PRB di beberapa kelurahan yang sudah difasilitasi program Katana oleh BPBD Kota Semarang seperti Kelurahan Kalipancur, Bringin, Tambakaji, Wonosari, Wates. Dokumen tersebut menjadi acuan atau tidak silahkan dapat langsung berkomunikasi dengan lurah

dari kelurahan sebagaimana saya sebutkan.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Kelurahan Bringin sudah memiliki dokumen PRB pada implementasi program KATANA tahun 2018, dalam perjalanannya dokumen tersebut sudah menjadi acuan dalam upaya mitigasi bencana di Kelurahan Bringin. Namun kami memandang perlu untuk dilakukan upgrade atau review dokumen tersebut karena sudah lebih dari 5 tahun sejak disusun bersama dengan BPBD Kota Semarang.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Dokumen PRB Kelurahan Kalipancur sudah ada, sudah dapat digunakan sebagai acuan mitigasi dan jika ada kunjungan dari opd lain bisa membaca kondisi wilayah kelurahan kalipancur dimana lokasi yang ada bencananya” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Di Kelurahan Bambankerep belum ada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, untuk upaya mitigasi pedoman kami dari usulan basis” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“dokumen PRB belum ada untuk mencari informasi dimana wilayah yang ada bencana melalui grup WA relawan kita bisa menangani meskipun lebih lambat dalam penanganan” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Dokumentasi PRB sdh ada jelas sebagai acuan dimana gambaran kejadian bencana diKelurahan Tambakaji bisa di lihat lewat dokumen tersebut sehingga warga masyarakat tahu harus kemana jika terjadi bencana” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“dari 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan baru ada 6 Kelurahan yang sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yaitu Kelurahan Bringin, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Wates, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Wonosari. dari 6 kelurahan upaya mitigasi tersinkronisasi dengan dokumen tersebut walaupun ada hal baru yang tidak tertuang dalam dokumen RPB. sedangkan 4 kelurahan yang belum melaksanakan Katana acuan dalam mitigasi bencana menggunakan pola FGD masyarakat yang biasa berkecimpung dengan kebencanaan.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Kami tidak mengetahui secara persis dokumen tersebut” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Dokumen PB di PT.Sango ada dan jelas sebagai acuan karena wilayah sangat luas dan untuk mempermudah pemantauan jika terjadi bencana di lingkungan pabrik” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“dari 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan baru ada 6 Kelurahan yang sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yaitu Kelurahan Bringin, Kelurahan Tambakaji. Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Wates, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Wonosari. dari 6 kelurahan upaya mitigasi tersinkronisasi dengan dokumen tersebut walaupun ada hal baru yang tidak tertuang dalam dokumen RPB. sedangkan 4 kelurahan yang belum melaksanakan Katana acuan dalam mitigasi bencana menggunakan pola FGD masyarakat yang biasa berkecimpung dengan kebencanaan.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Secara detail kami tidak mengetahui secara persis, namun dalam beberapa diskusi kami mendengar jika beberapa kelurahan sudah memiliki dokumen RPB tersebut hasil dari fasilitasi program Katana” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya tentang pada tahun 2024 apakah terdapat alokasi penganggaran untuk mitigasi struktural dan/atau penganggaran untuk kegawatdaruratan? Lebih jelasnya diuraikan dalam hasil wawancara sebagai berikut;

“Setiap perencanaan pembangunan melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan kita prioritaskan upaya2 mitigasi struktural yang memiliki dampak terhadap kegawatdaruratan secara langsung. Prioritas seperti pembangunan talud, pelebaran drainase, talud bronjong dan lainnya merupakan upaya dalam meminimalisir kejadian kebencanaan. Disamping pendanaan dari musrenbang, kita juga dibantu dinas terkait dalam upaya

penanganan kedaruratan.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Perencanaan pembangunan melalui musrenbang tingkat RT dan RW diprioritaskan untuk mitigasi struktural yang memiliki dampak terhadap kegawatdaruratan secara langsung. Prioritas seperti pembangunan talud, pelebaran drainase, talud dan lainnya merupakan upaya dalam meminimalisir kejadian kebencanaan. selain pendanaan dari musrenbang, kita juga dibantu dinas terkait dalam upaya penanganan kedaruratan.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Perencanaan pembangunan melalui musrenbang tingkat RT dan RW diprioritaskan untuk mitigasi struktural yang memiliki dampak terhadap kegawatdaruratan secara langsung. Prioritas seperti pembangunan talud, pelebaran drainase, talud bronjong dan lainnya merupakan upaya dalam meminimalisir kejadian kebencanaan. Disamping pendanaan dari musrenbang, kita juga dibantu dinas terkait dalam upaya penanganan kedaruratan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Perencanaan pembangunan melalui musrenbang tingkat RT dan RW diprioritaskan untuk mitigasi struktural yang memiliki dampak terhadap kegawatdaruratan secara langsung. Prioritas seperti pembangunan talud, pelebaran drainase, talud bronjong dan lainnya merupakan upaya dalam meminimalisir kejadian kebencanaan. Disamping pendanaan dari musrenbang, kita juga dibantu dinas terkait dalam upaya penanganan kedaruratan” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Perencanaan pembangunan melalui musrenbang tingkat RT dan RW diprioritaskan untuk mitigasi struktural yang memiliki dampak terhadap kegawatdaruratan secara langsung. Prioritas seperti pembangunan talud, pelebaran drainase, talud dan lainnya merupakan upaya dalam meminimalisir kejadian kebencanaan. selain pendanaan dari musrenbang, kita juga dibantu dinas terkait dalam upaya penanganan kedaruratan.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Alokasi anggaran tetap dianggarkan apalagi terkait dengan bencana meskipun hanya lewat lembaga - lembaga yang ada di kelurahan Tambakaji dengan sosialisasi ataupun pelatihan

keawatdaruratan di kelurahan Wonosari” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Untuk FPRB Kecamatan alokasi penganggaran dalam upaya mitigasi lebih pada mitigasi non struktural . Pendanaan tersebut melalui pengajuan dana Kecamatan dan kemitraan dengan CSR perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dan sekitarnya. Nilai hasil kemitraan dari FPRB kecamatan Ngaliyan menjadi langkah nyata dalam upaya PB.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Alokasi penganggaran untuk upaya mitigasi setiap tahun selalu dianggarkan oleh perusahaan. Setiap rapat ahir tahun untuk perencanaan kedepan (CSR) kami selalu mengusulkan agar upaya mitigasi di kecamatan Ngaliyan dapat lebih maksimal” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Alokasi penganggaran untuk upaya mitigasi setiap tahun dselalu dianggarkan karena PT.Sango selalu berkontribusi apalagi dalam kebencanaan” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Untuk FPRB Kecamatan alokasi penganggaran dalam upaya mitigasi lebih pada mitigasi non struktural . Pendanaan tersebut melalui pengajuan dana Kecamatan dan kemitraan dengan CSR perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dan sekitarnya. Nilai hasil kemitraan dari FPRB kecamatan Ngaliyan dalam upaya mitigasi bencana sebesar Rp. 16.322.000,00.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“sama seperti yang tadi kami sampaikan bahwa detail kegiatan mitigasi tahun 2024 kami tidak mengetahui secara persis, namun upaya mitigasi tersebut pasti selalu terprogramkan oleh pemangku wilayah masing-masing di Kelurahan” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Menurut bapak /ibu apakah BPBD Kota Semarang berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan ?

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen terutama dalam upaya PB di wilayah kecamatan Ngaliyan yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target Renas yang berfokus pada capaian RIPB Tahun 2025-2029 dalam peta jalan pelaksanaan RIPB dimana salah satu pointnya adalah penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya PB di wilayah kelurahan Bringin yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah kelurahan kalipancur yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah kelurahan kalipancur yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya PB di wilayah kelurahan Bringin yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“BPBD Kota Semarang berkomitmen dalam upaya penanggulangan bencana karena begitu ada laporan masuk dari

relawan langsung ada tindakan dan meninjau ke lokasi bencana”
Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)

“Sudah berkomitmen. BPBD selalu hadir dalam setiap kejadian kegawatdaruratan dan selalu berkoordinasi dengan civitas akademika.” *UIN Walisongo (Margono)*

“BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya PB di wilayah Kecamatan Ngaliyan yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya PB di wilayah kelurahan Bringin yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Sangat berkomitmen. Buktinya adalah sebagai berikut; pertama dari 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan sudah ada 6 Kelurahan yang diintervensi oleh BPBD terkait dengan implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Semarang Ngaliyan yang terbanyak. Kedua setiap ada bencana baik banjir, kebakaran tanah longsor dan pohon tumbang, BPBD Kota Semarang hadir memberikan bantuan dan selalu berkoordinasi dengan pemangku wilayah di Kecamatan Ngaliyan. Ketiga selalu berkoordinasi dengan FPRB Kecamatan Ngaliyan terkait dengan upaya PB di wilayah Kecamatan ngaliyan.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Menurut saya BPBD Kota Semarang sudah berkomitmen dengan baik terutama dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah kecamatan Ngaliyan yang sering terjadi bencana, namun perlu ditingkatkan lagi agar penanggulangan bencana dapat tercapai secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya untuk mengetahui tentang rincian *shared understanding* atau pemahaman bersama dari unsur *pentahelix* yang ada di Kecamatan Ngaliyan terurai sebagai berikut;

d. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Selanjutnya pertanyaan tentang apakah di wilayah bapak/ibu sering dilakukan pelatihan terkait dengan *disaster menagement*? Jika ya darimana sumber pendanaanya?

“Ya. Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan, simulasi bencana dan seminar sering kita lakukan dengan menggandeng potensi *pentahelix* yang ada. Sumber yang kami dapatkan dari APBD Kota Semarang, CSR dan sumber lain. Setiap kelurahan juga kita minta untuk merencanakan dan mengimplementasikan penguatan kapasitas masyarakat terutama kelurahan-kelurahan yang memiliki potensi ancaman tinggi.”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“Sering diadakan pelatihan dan Sosialisasi tentang kebencanaan untuk pendanaan biasanya kerjasama dengan LPMK, FKK, PKK dan Karang Taruna dengan menggunakan dana APBD.”
Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)

“pelatihan dan sosilasisasi sering dilakukan meskipun kegiatan kerjasama dengan lembaga yang ada di kelurahan kalipancur sedangkan pendanaan dari APDB”
Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)

“pelatihan dan sosilasisasi sering dilakukan meskipun kegiatan kerjasama dengan lembaga yang ada di kelurahan Bambankerep sedangkan pendanaan dari APDB.”
Lurah Bambankerep (Agung Susilo)

“Sering diadakan pelatihan dan Sosialisasi tentang kebencanaan untuk pendanaan biasanya kerjasama dengan LPMK, FKK,

PKK dan Karang Taruna dengan menggunakan dana APBD.”
Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)

“ya sering diadakan pelatihan yang berhubungan dengan disaster manajemen meskipun kegiatan kita barengkan dengan kegiatan lembaga baik dari LPMK, FKK, PKK dan karang taruna sehingga tepat sasaran dan bisa meningkatkan SDM yang ada di Kelurahan Wonosari” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*
“Jika Pelatihan terkait dengan *disaster manajemen* kampus pernah melakukan melalui beberapa organisasi kemahasiswaan.” *UIN Walisongo (Margono)*

“pelatihan sering dilakukan terutama kepada karyawan PT. Sango yang notabene di wilayah sering terjadi banjir dan kebakaran, pendanaan dari dana yang memang sudah di persiapan untuk penanggulangan bencana” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“pelatihan sering dilakukan terutama kepada karyawan PT. Sango yang notabene di wilayah sering terjadi banjir dan kebakaran, pendanaan dari dana yang memang sudah di persiapan untuk penanggulangan bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“sangat sering dilakukan di antaranya adalah pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB di SD Wonosari 1, Pelatihan Dapur Umum sekota Semarang, Sosialisasi Peta Bencana, Pelatihan Fasilitator Katana bertempat di Kelurahan Wonosari, Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana di Kelurahan Kalipancur, Pengenalan bencana banjir, gempa bumi di PAUD Jati Asih, pengenalan bencana bagi anak sekolah usia dini Kopi Tjarik Gunungpati.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Sudah banyak pelatihan, sosialisasi dan simulasi kebencanaan yang dilaksanakan baik oleh Forum PRB, Kelurahan-Kelurahan, LPMK dan organisasi lainnya. Sumber pendanaan ada dari APBD, CSR dan kemitraan lainnya” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Sedangkan untuk mengetahui pertanyaan. Menurut bapak/ibu aspek aspek apa saja yang mempengaruhi risiko atau kerawanan di wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat diuraikan sebagai berikut;

“Adanya ancaman kejadian yang berpotensi bencana ,kerentanan kondisi wilayah atau masyarakat yang membuatnya rentan terhadap dampak bencana,kapasitas kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko dampak bencana dan keadaan wilayah.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Dengan melihat letak geografi di Kelurahan Bringin sehingga mulculnya ancaman kejadian yang berpotensi bencana ,kerentanan kondisi wilayah atau masyarakat yang membuatnya rentan terhadap dampak bencana,kapasitas kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko dampak bencana dan keadaan wilayah.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Dengan melihat letak geografi diwilayah Kelurahan kalipancur kemungkinan besar ncaman kejadian yang berpotensi bencana ,kerentanan kondisi wilayah atau masyarakat yang membuatnya rentan terhadap dampak bencana,kapasitas kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko dampak bencana dan keadaan wilayah contohnya bangunan rumah yang tidak pada tempatnya , perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembaranga, penanaman pohon tidak sesuai dengan lokasi jenis pohonnya” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Dengan melihat letak geografi diwilayah Kelurahan Bambankerep kemungkinan besar ncaman kejadian yang berpotensi bencana ,kerentanan kondisi wilayah atau masyarakat yang membuatnya rentan terhadap dampak bencana,kapasitas kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko dampak bencana dan keadaan wilayah contohnya bangunan rumah yang tidak pada tempatnya , perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembaranga, penanaman pohon tidak sesuai dengan lokasi jenis pohonnya.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Dengan melihat letak geografi di Kelurahan Tambakaji sehingga mulainya ancaman kejadian yang berpotensi bencana ,kerentanan kondisi wilayah atau masyarakat yang membuatnya rentan terhadap dampak bencana,kapasitas kemampuan masyarakat untuk mengurangi risiko dampak bencana dan keadaan wilayah.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“letak Kelurahan Wonosari yang naik turun, membangun rumah tidak pada tempatnya,pemotongan pohon secara liar membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku di lingkungan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Kerawanan bencana dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, termasuk faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor ini menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah atau masyarakat terhadap potensi bencana. Faktor Lingkungan Manusia antara lain penggunaan Lahan: Perubahan tata guna lahan, seperti deforestasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kepadatan Penduduk. Faktor Sosial Ekonomi meliputi faktor Kemiskinan: Kemiskinan dapat meningkatkan kerentanan karena kurangnya akses terhadap informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk menanggulangi bencana. Ketimpangan Sosial: Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan kelompok-kelompok rentan yang lebih mudah terdampak bencana. Faktor Kapasitas: Kesiapsiagaan: Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk perencanaan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana, dapat mengurangi dampak bencana. Mitigasi: Upaya mitigasi bencana, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pengelolaan risiko, dapat mengurangi kerentanan. Kapasitas Penyelamatan: Kemampuan masyarakat dan lembaga terkait dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana..” *UIN Walisongo (Margono)*

“PT. Indofood berdekatan dengan lingkungan padat sering terjadi kebakaran sosial ekonomi diwarga sekitar kapasitas SDMnya dan di lingkungan sekitar belum ada alat peringatan dini untuk bencana” *PT. Infod Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“PT. Sango Ceramis Indonesia berdekatan dengan lingkungan padat sering terjadi kebakaran, sosial ekonomi diwarga sekitar kapasitas SDMnya dan di lingkungan sekitar belum ada alat peringatan dini untuk bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Kerawanan bencana dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, termasuk faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor ini menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah atau masyarakat terhadap potensi bencana. Pertama, Faktor Lingkungan Manusia antara lain penggunaan Lahan: Perubahan tata guna lahan, seperti deforestasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kepadatan Penduduk. Kedua, Sosial Ekonomi meliputi faktor Kemiskinan: Kemiskinan dapat meningkatkan kerentanan karena kurangnya akses terhadap informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk menanggulangi bencana. Ketimpangan Sosial: Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan kelompok-kelompok rentan yang lebih mudah terdampak bencana. Ketiga, Faktor Kapasitas: Kesiapsiagaan: Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk perencanaan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana, dapat mengurangi dampak bencana. Mitigasi: Upaya mitigasi bencana, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan pengelolaan risiko, dapat mengurangi kerentanan. Kapasitas Penyelamatan: Kemampuan masyarakat dan lembaga terkait dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana..” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Di Kecamatan Ngaliyan kerawanan bencana dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan, pertama aspek sosial dimana masih kita temukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membangun bangunan di lereng-lereng dan tepi sungai, aspek Geografis dimana wilayah Kecamatan Ngaliyan dilalui oleh DAS Beringin yang memiliki ancaman banjir dll” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Sedangkan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan, Bagaimana cara mengoptimalkan kolaborasi dalam upaya meningkatkan

penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Ngaliyan? Terurai

sebagai berikut;

“Agar kolaborasi menjadi optimal maka penting untuk membangun komunikasi yang efektif, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (pentahelix), serta memastikan adanya koordinasi yang baik antar lembaga. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana perlu ditingkatkan, serta melibatkan seluruh elemen yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan.”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“tetap saling berkomunikasi baik di grup kebencanaan maupun di dalam kejadian bencana dan satu komando.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“menjaga komunikasi dengan pentahelix agar kolaborasi berjalan dengan optimal terutama dalam penanggulan bencanadi kelurahan kalipancur” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“menjaga komunikasi dengan pentahelix agar kolaborasi berjalan dengan optimal terutama dalam penanggulan bencanadi kelurahan kalipancur.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“tetap saling berkomunikasi baik di grup kebencanaan maupun di dalam kejadian bencana dan satu komando.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“saling berkomunikasi saling memberikan informasi baik dengan pentahelix supaya kolaborasi bisa berjalan secara optimal dan berjalan sesuai tugas masing - masing” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Mengotimalkan kolaborasi dalam penanggulangan bencana, perlu beberapa langkah strategis perlu dilakukan, termasuk membangun kepercayaan antar pihak, melibatkan seluruh elemen masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, sangat krusial dalam penanggulangan bencana. Setiap elemen memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun

sinergi antar unsur akan menghasilkan upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan kontinue.”*UIN Walisongo (Margono)*

“Membangun komunikasi dengan stakeholders dan PT Indofood membuka diri untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“menjaga komunikasi dengan baik kepada warga sekitar PT.Sango jika ada bencana agar cepat tertangani” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Untuk menggali kolaborasi dalam penanggulangan bencana, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, termasuk membangun kepercayaan antar pihak, melibatkan seluruh elemen masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, sangat krusial dalam penanggulangan bencana. Setiap elemen memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun sinergi antar mereka akan menghasilkan upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Agar kolaborasi dalam penanggulangan bencana dapat optimal perlu dilakukan beberapa langkah diantaranya adalah membangun komunikasi yang efektif, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (pentahelix), serta memastikan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, memanfaatkan teknologi.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk mengetahui pertanyaan tentang media apa saja yang digunakan untuk membangun kolaborasi terkait penanggulangan bencana? Dapat dilihat dari uraian hasil wawancara sebagai berikut;

“Media yang digunakan untuk membangun kolaborasi adalah melalui pembentukan forum-forum diskusi formal dan non formal. forum diskusi menjadi media yang sangat efektif dalam membangun kolaborasi. Media lainnya adalah melakukan

pendekatan-pendekatan terhadap organisasi atau lembaga yang berkomitmen dalam upaya PB di Kecamatan Ngaliyan. Membangun komunikasi dapat melalui media tatap muka langsung atau menggunakan media sosial seperti Whatshapp, Instagram, Tiktok dll untuk menyebarkan jaring kolaborasi. Berbagi informasi dan koordinasi melalui Whatshaap juga dilakukan dengan pendekatan grup kebencanaan, berbagi informasi kejadian bencana, langkah yang dilakukan serta koordinasi menjadi mudah karena tidak terpancang ruang dan waktu. Pemanfaatan media berbasis teknologi mempermudah untuk membangun kolaborasi.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“WA, FB, IG dan HT yang memang sudah divasilitasi dari BPBD, kegiatan alin adanya pertemuan rutin antar lembaga untuk embangun berkolaborasi.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“menjaga komunikasi dengan pentahelix agar kolaborasi berjalan dengan optimal terutama dalam penanggulangan bencanadi kelurahan kalipancur” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Grup WA kebencanaan dan HT yang memang sudah divasilitasi dari BPBD selain itu kelurahan kalipancur juga mengaktifkan pretemuan rutin di tingkat kelurahan antar lembaga sehingga digrup - grup itulah kita bisa membangun kolaborasi.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Grup WA kebencanaan dan HT yang memang sudah divasilitasi dari BPBD selain itu kelurahan kalipancur juga mengaktifkan pretemuan rutin di tingkat kelurahan antar lembaga sehingga digrup - grup itulah kita bisa membangun kolaborasi.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“WA, FB, IG dan HT yang memang sudah divasilitasi dari BPBD, kegiatan alin adanya pertemuan rutin antar lembaga untuk membengun berkolaborasi” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Media menjadi jembatan informasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta memfasilitasi penggalangan bantuan dan penyebaran informasi penting

sebelum, selama, dan setelah bencana. media yang digunakan antara lain media tatap muka langsung (musyawarah), Silaturahmi langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan kecanggihan teknologi antara lain Whatshapp, Instagram, Tiktok dll.”*UIN Walisongo (Margono)*

“Grup WA baik di lingkungan PT. Indofood Sukses Makmur Abadi, grup WA kebencanaan termasuk FPRB sehingga dapat melakukan mempermudah dalam penanggulangan bencana” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Grup WA baik di lingkungan PT. Sango, grup WA kebencanaan termasuk FPRB sehingga dapat melakukan mempermudah dalam penanggulangan bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Media memainkan peran krusial dalam membangun kolaborasi untuk penanggulangan bencana. Media dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta memfasilitasi penggalangan bantuan dan penyebaran informasi penting sebelum, selama, dan setelah bencana. media yang digunakan antara lain media tatap muka langsung (musyawarah), Silaturahmi langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan kecanggihan teknologi antara lain Whatshapp, Instagram, Tiktok dll.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Grup WA kebencanaan dan HT yang memang sudah divasilitasi dari BPBD selain itu juga mengaktifkan pertemuan rutin di tingkat kelurahan antar lembaga sehingga digrup - grup itulah kita bisa membangun kolaborasi.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Untuk menguraikan pertanyaan-pertanyaan dari *intermedite outcome* atau pencapaian hasil dari kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah Kecamatan Ngaliyan, Dunia Usaha yang ada di Kecamatan Ngaliyan, Masyarakat (FPRB Kecamatan Ngaliyan) Akademisi dan Media Massa akan terurai sebagai berikut ini;

e. ***Intermedite outcome (pencapaian hasil)***

Sedangkan uraian dari apa peran bapak/ibu sesuai dengan konsep kolaborasi *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan? (unsur *pentahelix* antara lain Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, Dunia Usaha, Akademisi, Media Pawarta, masyarakat dalam hal ini Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan?

“Pemerintah Kecamatan Ngaliyan berperan Regulator pendekatan Pentahelix di wilayah Kecamatan dan sebagai katalis dan faktor pemersatu dalam pendekatan Pentahelix, Unsur masyarakat melalui peran FPRB adalah akselator dalam kesiapsiagaan, daya adaptasi dan daya lenting serta buid back better and saffer, Dunia Usaha menjadi pendorong kontribusi penanganan kedaruratan dan kontribusi proses rehab rekon, Akademisi menjadi konseptor dan inovasi melalui pengembangan sistem EWS, analisis kejadian dampak, serta lesson learned, Dan media massa sebagai pengganda melalui desiminasi informasi serta penanganan pasca bencana.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Peran saya disini sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator, memastikan semua pihak (akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dapat berkontribusi efektif dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana diKelurahan Bringin.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Saling berkoordinasi dan memberikan informasi dan adanya kunjungan ke masing - masing wilayah untuk memamtau keadaan lingkungan supaya penanggulangan bencana lebih mudah dan tidak terpancang ruang dan waktu apalagi kelurahan kalipancur sudah terbentuk KSB, FPRB dan SIBAT” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Saling berkoordinasi dan memberikan informasi dan adanya kunjungan ke masing - masing wilayah untuk memamtau

keadaan lingkungan supaya penanggulangan bencana lebih mudah dan tidak terpancang ruang dan waktu apalagi kelurahan kalipancur sudah terbentuk KSB, FPRB dan SIBAT.” *Lurah Bambangkerep (Agung Susilo)*

“Peran saya disini sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator, memastikan semua pihak (akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dapat berkontribusi efektif dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana diKelurahan Bringin.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“berbagi informasi dan komunikasi (beyambung lidah jika ada kejadian bencana laporan dari relawan bisa kami teruskan ke dinas terkait,dampak nyata ada yaitu kalau ada kejadian bencana dari BPBD langsung turun cek lokasi bencana, dunia usaha mengirim atau memberikan bantuan logistik tanpa ada permintaan.” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Akademisi berperan sebagai konseptor dan penyedia sumber pengetahuan. Mereka memberikan dasar ilmiah dan inovasi untuk berbagai sektor, termasuk pengembangan pariwisata, UMKM, dan penanggulangan bencana. Akademisi juga berperan dalam penelitian, identifikasi potensi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konseptor dan Penyedia Ide, akademisi berperan dalam merumuskan konsep, teori, dan model pengembangan yang relevan dengan berbagai bidang. Penelitian dan Pengembangan, Mereka melakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan dalam suatu sektor, serta mengembangkan solusi inovatif. Peningkatan Kapasitas, akademisi membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, melalui pelatihan dan pendidikan. Penyebarluasan Pengetahuan, menyebarkan hasil penelitian dan pengetahuan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Peran kami dari PT Indofood adalah membantu saat kegawatdaruratan dan juga membantu saat pra bencana melalui suport kegiatan pelatihan dan simulasi dengan pemerintah Kecamatan dan Forum PRB” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Peran kami dari PT Sango adalah membantu kegiatan saat bencana terjadi/kegawatdaruratan dengan memberikan bantuan melalui posko yang ada. sedangkan jika tidak ada bencana kami juga mensupport kegiatan pelatihan dan simulasi dan logistik kepada pemerintah Kecamatan, polsek, koramil dan Forum PRB serta masyarakat di sekitar perusahaan kami” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Peran FPRB Kecamatan Ngaliyan yang merupakan refresentasi dari peran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana pada fase pra bencana, saat/kegawatdaruratan, maupun pasca/setelah terjadi bencana. Peran tersebut meliputi partisipasi dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. masyarakat sebagai akselator memiliki peran vital dalam memberikan informasi awal terjadinya bencana.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Kami selalu memberitakan dan/atau memberikan informasi kepada masyarakat secara detail, nyata dan up to date berita dan informasi yang layak kami sampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kebijakan yang berisikan berita terkini kondisi lapangan.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Sedangkan untuk menguraikan dari pertanyaan, Menurut bapak /ibu hasil kolaborasi pentahelix tahun 2024 sudah mengurangi risiko atau kerentanan diwilayah, apakah ada dampak nyata untuk mengurangi risiko bencana tersebut, dapat di lihat dari hasil wawancara berikut ini;

“Sangat mengurangi, walaupun belum ada penilaian secara numerik, kolaborasi terutamanya dari dana musrenbang dan dana dinas berupa pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ancaman bencana sangat mengurai risiko dari ancaman tersebut. Pembangunan mitigasi struktural begitu terasa bagi wilayah yang memiliki ancaman tinggi.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“dampak nyata ada setiap kejadian bencana pentahelix sudah berperan sesuai dengan tugas dan peran masing masing sehingga bisa mengurangi risiko bencana yang ada di kelurahan Bringin, sehingga ada dampak nyata untuk pengurangan risiko bencana.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Cukup mengurangi, kolaborasi terutamanya dari dana musrenbang dan dana dari pemerintah berupa pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ancaman bencana sangat mengurangi risiko dari ancaman tersebut,” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Sangat mengurangi, kolaborasi dari musrenbang dan intervensi dari pemerintah berupa pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan ancaman bencana sangat mengurangi risiko dari ancaman tersebut.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“dampak nyata ada setiap kejadian bencana pentahelix sudah berperan sesuai dengan tugas dan peran masing masing sehingga bisa mengurangi risiko bencana yang ada di kelurahan Tambakaji sehingga ada dampak nyata untuk pengurangan risiko bencana.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Dengan Kolaborasi maka akan ada dampak nyata mengurangi risiko bencana yang ada di kelurahan Wonosari. Kolaborasi memperluas capaian dalam upaya penanggulangan bencana” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Kami tidak dapat menilai secara numerik karena belum ada penelitian ilmiah tetapi jika melihat saat sekarang bencana berkurang jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya itu dapat menjadi indikator adanya kolaborasi yang baik.” *UIN Walisongo (Margono)*

“menurut saya kolaborasi adalah salah satu kunci dalam upaya mempercepat pengurangan risiko bencana karena kolaborasi akan meningkatkan upaya pembangunan” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“kunci kesuksesan mengurangi risiko bencana adalah perencanaan yang baik sesuai dengan kebutuhan hasil kajian disamping itu juga perlunya kolaborasi. Dan tahun 2024

kecamatan Ngaliyan sudah baik menggalang kolaborasi dalam upaya PB” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Kalau peran *pentahelix* utamanya pada upaya mitigasi struktural sudah sangat mengurangi risiko bencana, hal tersebut dapat dilihat dari implementasi pendanaan musrenbangkel atau musrenbangkec serta pendanaan dari dinas terkait yang dilaksanakan di Kecamatan Ngaliyan Tahun 2024 sudah sangat banyak. akan tetapi kita tidak bisa menghitung secara numerik angka pengurangan secara matematis. Meningkatnya infrastruktur terutama yang berkaitan dengan mitigasi bencana sangat terlihat jelas.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut, karena tidak pernah ada perhitungan terkait kondisi awal dan kondisi akhir dari sebuah intervensi kolaborasi terdapat kerentanan suatu wilayah atas jenis ancaman yang ada.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya untuk hasil jawaban dari pertanyaan, Apakah upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan sudah tepat sasaran efektif dan efisien? Dapat dilihat dari jawaban responden sebagai berikut;

“Dalam pandangan kami, perencanaan yang melalui musrenbang dan melalui pendanaan lainnya (CSR atau pendanaan lainnya) sudah melalui rembug-rembug yang matang, sehingga target sasaran sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan, Upaya penanggulangan bencana dilakukan secara inklusif sebagaimana sudah tertuang dalam UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana..” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“tepat sasaran karena selaku pemangku wilayah selalu memberikaan masukan kepada masing - masing lembaga yang ada supaya menyelipkan satu kegiatan untuk pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga secara efektif dan se efisien mungkin untuk pendanaan.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“Dalam upaya penanggulangan bencana saya rasa sudah tepat sasaran, fektif dan efisien karena dalam kegiatan sudah melibatkan pihak - pihak yang terkait” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“Dalam upaya penanggulangan bencana saya rasa sudah tepat sasaran, fektif dan efisien karena dalam kegiatan sudah melibatkan pihak - pihak yang terkait.” *Lurah Bambangkerep (Agung Susilo)*

“tepat sasaran dan efisien karena selaku pemangku wilayah sering melakukan himbuan kepada lembaga yang ada di kelurahan bambankerep untuk mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“tepat karena selaku pemangku wilayah selalu memberikan masukan kepada masing - masing lembaga yang ada supaya menyelipkan satu kegiatan untuk pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga secara efektif dan efisien mungkin untuk mencapai penanggulan bencana yang diharapkan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Sedikit banyaknya upaya mitigasi di kecamatan Ngaliyan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan..” *UIN Walisongo (Margono)*

“Sudah cukup efektif dan efisien terbukti intensitas bencana di Kecamatan Ngaliyan relatif berkurang” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“menurut kami upaya Penanggulangan bencana sudah tepat sasaran. Terbukti intensitas bencana di Kecamatan Ngaliyan relatif berkurang karena pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Sedikit banyaknya upaya mitigasi di kecamatan Ngaliyan sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan..” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Dalam upaya penanggulangan bencana saya rasa sudah tepat sasaran efektif dan efisien karena dalam kegiatan sudah

melibatkan pihak - pihak yang terkait.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk mengetahui dari pertanyaan, Menurut bapak/ibu apakah kolaborasi *pentahelix* sudah menjalankan peran dan fungsi dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini;

“Unsur *pentahelix* sudah menjalankan peran dan fungsi dalam PB di Kecamatan Ngaliyan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pemerintah Kecamatan Ngaliyan berperan Regulator pendekatan *Pentahelix* di wilayah Kecamatan dan sebagai katalis dan faktor pemersatu dalam pendekatan *Pentahelix*. Unsur masyarakat melalui peran FPRB adalah akselator dalam kesiapsiagaan, daya adaptasi dan daya lenting serta *buid back better and saffer*. Dunia Usaha menjadi pendorong kontribusi penanganan kedaruratan dan kontribusi proses rehab rekon. Akademisi menjadi konseptor dan inovasi melalui pengembangan sistem EWS, analisis kejadian dampak, serta *lesson learned*. Dan media massa sebagai pengganda melalui desiminasi informasi serta penanganan pasca bencana”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“sesuai peran dan fungsinya siapa dan berbuat apa sesuai dengan fungsinya FPRB berperan pada pra bencana KSB dan Sibit berperan pada saat terjadi bencana sedangkan pasca bencana yang bertanggung jawab pemerintah.” *Lurah Bringin (Rusly Iswanto)*

“*Pentahelix* sudah melaksanakan sesuai peran dan fungsinya jika terjadi bencana relawan dengan cepat turun membantu pelaporan ke kelurahan, dunia usaha memberikan bantuan sesuai kebutuhan, akademisi memberikan adukasi atau pemulihan trauma hiling, pemerintah membangun infrastruktur yang rusak sedangkan wartawan menyebarluaskan berita lewat media” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“*Pentahelix* sudah melaksanakan sesuai peran dan fungsinya jika terjadi bencana relawan dengan cepat turun membantu

pelaorkan ke kelurahan,dunia usaha memberikan bantuan sesuai kebutuhan,akademisi memberikan adukasi ataupun pemulihan trauma hiling, pemerintah membangun infrastruktur yang rusak sedangkan wartawan menyebarluaskan berita lewat media.”
Lurah Bambankerep (Agung Susilo)

“sesuai peran dan fungsinya siapa dan berbuat apa sesuai dengan fungsinya FPRB berperan pada pra bencana KSB dan Sibit berperan pada saat terjadi bencana sedangkan pasca bencana yang bertanggung jawab pemerintah.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Sudah, di Kelurahan Wonosari banyak sinergitas antara kelurahan dan warga dalam upaya membangun kolaborasi begitu juga antara Kelurahan dan kecamatan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Kolaborasi harusnya menguatkan dan berperan secara komperehensif. Secara umum sudah kolaborasi sudah memiliki peranya masing-masing walaupun masih ada beberapa yang belum berperan secara maksimal.”*UIN Walisongo (Margono)*

“menurut saya kolaborasi menjalankan peran dan fungsi bagi upaya penanggulangan bencana karena dapat membantu pemerintah” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Menurut saya kolaborasi menjalankan peran dan fungsi dengan baik, karena kolaborasi sangat membantu pemerintah dalam upaya Penanggulangan bencana” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Secara umum sudah mampu menjalankan peranya masing-masing walaupun masih ada salah satu pihak yang belum dapat menjalankan peranya secara maksimal.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Seperti yang di awal kami kemukakan, Masing-masing sudah berperan secara nyata dan inklusif akan tetatpi masih ada unsur yang belum berkontribusi nyata bagi upaya penanggulangan bencana. Akademisi belum berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan atau dialog dalam upaya merumuskan kebijakan.”
Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)

selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan, Apakah kolaborasi yang sudah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan bencana sudah transparan dan akuntabel tersaji dalam uraian berikut ini;

“Setiap perencanaan kita melibatkan semua unsur, sehingga pada tahap pelaksanaan kegiatan hasil kolaborasi pastinya ada pertanggungjawaban dan transparansi kepada semua pihak. Terlebih jika kegiatannya merupakan dana dari APBD. Pedanaan melalui dana APBD akan selalu di audit oleh PBK dan BPKP setiap tahunnya.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“sudah transparan dan akuntabel sehingga penanganan bencana berjalan baik dengan adanya kolaborasi atau kerjasama karena setiap kali ada kebencanaan kita selalu membuat catatan dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait yang sudah memberikan bantuan.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“sudah transparan dan akuntabel karena setiap kejadian pasti ada rekapan atau laporan yang harus dipertanggungjawabkan” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“sudah transparan dan akuntabel karena setiap kejadian pasti ada rekapan atau laporan yang harus dipertanggungjawabkan.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“sudah transparan dan akuntabel sehingga penanganan bencana berjalan baik dengan adanya kolaborasi atau kerjasama karena setiap kali ada kebencanaan kita selalu membuat catatan dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait yang sudah memberikan bantuan.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Jika sumber dananya dari APBD untuk pembangunan infrastruktur sudah sangat transparan akan tetapi jika pendanaan dari luar APBD kami tidak dapat berkomentar” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Menurut kami sudah transparan dan akuntabel, karena pedanaan dari pemerintah pasti ada pertanggungjawaban yang logis dan realistis serta pastinya ada dari pihak BPK atau BPKP yang selalu melakukan audit untuk akuntabilitas dari sebuah

perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendanaan APBD.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Sudah cukup baik. Kegiatan penanggulangan bencana sudah maju dan transparan” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“upaya penanggulangan bencana sudah maju dan transparan karena kami selalu dilibatkan dalam usulan awal musrenbang kel/kec serta juga selalu diundang saat akan pelaksanaan kegiatan pembangunan” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Menurut kami sudah transparan dan akuntabel, karena pedanaan dari pemerintah pasti ada pertanggungjawaban yang logis dan realistis serta pastinya ada dari pihak BPK atau BPKP yang selalu melakukan audit untuk akuntabilitas dari sebuah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendanaan APBD.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Sudah transparan dan akuntabel, karena setiap ada kejadian kebencanaan ada laporan yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah atau donatur yang memberikan bantuan dan juga kepada masyarakat.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Pada uraian pertanyaan berikut adalah terkait dengan langkah - langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan mitigasi di kelurahan atau kecamatan dapat diuraikan hasil wawancara berikut ini;

“Beberapa langkah yang kami lakukan untuk mitigasi antara lain

- Pemetaan Daerah Rawan Bencana
- Penyebaran Informasi dan Sosialisasi
- Pelatihan dan Simulasi Bencana
- Pengadaan Sarana dan Prasarana
- Pembuatan Peringatan Dini
- Penyusunan Rencana Kontinjensi
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Penyusunan Peraturan dan Kebijakan

• Rehabilitasi dan Rekonstruksi” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Adanya pemetaan wilayah rawan bencana, pembentukan sistem peringatan dini, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana. .” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“mengadakan pelatihan - pelatihan untuk meningkatkan SDM yang melibatkan masyarakat ,perangkat kelurahan, bhabinsa, bhabinkantibmas, linmas PKK, FKK dan Karang taruna dengan tujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi di kelurahan kalipancur” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“mengadakan pelatihan - pelatihan untuk meningkatkan SDM yang melibatkan masyarakat, perangkat kelurahan, bhabinsa, bhabinkantibmas, linmas, PKK, FKK dan Karang taruna dengan tujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi d kelurahan Bbankerep.” *Lurah Bbankerep (Agung Susilo)*

“Adanya pemetaan wilayah rawan bencana, pembentukan sistem peringatan dini, sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana. .” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Pendekatan kepada masyarakat dengan terlibat langsung kepada kegiatan masyarakat akan membangkitkan kepedulian masyarakat. Jika dengan dunia usaha juga melalui silaturahmi ke perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Untuk mengoptimalkan mitigasi bencana, ada beberapa langkah yang bisa diambil, baik dari sisi pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penanggulangan. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta pelatihan dan simulasi bencana

Langkah-langkah Optimasi Mitigasi Bencana antara lain, Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat melalui edukasi, Pelatihan dan Simulasi, Penyebaran Informasi. Pengembangan Sistem Peringatan Dini atau EWS, Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana, Drainase, Bronjong, Sea Wall, Penguatan Kesiapsiagaan meliputi

Penilaian Risiko, Renkon, Pengendalian Tata Ruang dan kolaborasi.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Perlu dimaksimalkan pembangunan infrastruktur yang berkenaan dengan pencegahan bencana seperti pelebaran sungai.kali, dranase, bronjong dll” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“perlunya masyarakat dilibatkan secara langsung dalam usulan kegiatan yang berkenaan dengan upaya mitigasi, keterbukaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat merasa handarbeni” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Untuk mengoptimalkan mitigasi bencana, ada beberapa langkah yang bisa diambil, baik dari sisi pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penanggulangan. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta pelatihan dan simulasi bencana

Langkah-langkah Optimasi Mitigasi Bencana

- a) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: melalui edukasi, Pelatihan dan Simulasi, Penyebaran Informasi.
- b) Pengembangan Sistem Peringatan Dini atau EWS
- c) Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana, Drainase, Bronjong, Sea Wall
- d) Penguatan Kesiapsiagaan meliputi Penilaian Risiko, Renkon, Pengendalian Tata Ruang dan kolaborasi” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mitigasi bencana antara lain meningkatkan kesadaran dan pendidikan Masyarakat: melalui edukasi, Pelatihan dan Simulasi, Penyebaran Informasi., Pengembangan Sistem Peringatan Dini atau EWS, Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana, Drainase, Bronjong, Sea Wall, Penguatan Kesiapsiagaan meliputi Penilaian Risiko, Renkon, Pengendalian Tata Ruang dan kolaborasi.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Kemudian untuk mengetahui dari jawaban dari pertanyaan, apa saja yang menjadi kendala dalam upaya membangun kolaborasi *pentahelix*

untuk PB di Kecamatan Ngaliyan? Jawaban dari beberapa informan

adalah sebagai berikut ;

“Kendala dalam membangun kolaborasi bencana mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan kepentingan antar pihak, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran situasional, serta perbedaan budaya organisasi. Selain itu, kesenjangan informasi dan kurangnya kepemimpinan yang fasilitatif juga dapat menghambat upaya kolaborasi” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Kurangnya koordinasi antar faktor, kesenjangan pemahaman dan tujuan, serta perbedaan kepentingan dan prioritas. Selain itu, masalah kepercayaan, transparansi, dan komunikasi juga menjadi tantangan signifikan. Yang utama adalah kurangnya fasilitas untuk penanganan bencana.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“perbedaan pendapat, kurangnya kepercayaan, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumberdaya, kurangnya kesadaran, kurangnya fasilitas untuk menunjang dalam situasi bencana” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“perbedaan pendapat, kurangnya kepercayaan ,perbedaan kepentingan, keterbatasan sumberdaya, kurangnya kesadaran, kurangnya fasilitas untuk menunjang dalam situasi bencana.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“kurangnya koordinasi antar faktor, kesenjangan pemahaman dan tujuan, serta perbedaan kepentingan dan prioritas. Selain itu, masalah kepercayaan, transparansi, dan komunikasi juga menjadi tantangan signifikan. Yang utama adalah kurangnya fasilitas untuk penanganan bencana.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“kendala dalam membangun kolaborasi adalah pemangku wilayah (lurah/Camat) yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik maka menjadi kendala disamping itu juga karena locus bencana tidak merata maka kolaborasi antar kelurahan tidak merata” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Kendala karena bidang sosial tidak melakukan sepenuh hati sehingga tidak optimal, siapa yang bertanggungjawab di pemangku wilayah perlu pemahaman tentang Penanggulangan bencana. Sering gonta ganti pemangku wilayah (Camat) hal tersebut menjadai komunikasi akan dimulai dari awal sedangkan pemangku wilayah lama terkadang sudah berfikir jauh, Pemangku wilayah baru acap kali tidak aware terhadap upaya Penanggulangan Bencana, Karena pemangku wilayah baru, maka program Penanggulangan Bencana tidak mendapatkan suport sehingga target tidak dapat maksimal.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Kendalanya antara lain Kurang maksimalnya Dunia usaha yang ada di kecamatan Ngaliyan untuk membantu mitigasi non struktural” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Kendala pertama masih kurangnya peran dunia usaha yang ada di kecamatan Ngaliyan untuk membantu mitigasi, belum maksimalnya peran akademisi di Kecamatan Ngaliyan untuk membantu merumuskan konsep2 ilmiah upaya PB” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Kendala karena bidang sosial tidak melakukan sepenuh hati sehingga tidak optimal, siapa yang bertanggungjawab di pemangku wilayah perlu pemahaman tentang Penanggulangan bencana. Sering gonta ganti pemangku wilayah (Camat) hal tersebut menjadai komunikasi akan dimulai dari awal sedangkan pemangku wilayah lama terkadang sudah berfikir jauh, Pemangku wilayah baru acap kali tidak aware terhadap upaya Penanggulangan Bencana, Karena pemangku wilayah baru, maka program Penanggulangan Bencana tidak mendapatkan suport sehingga target tidak dapat maksimal.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Kendala yang ada antara lain komunikasi, komitmen dan spirit kebersamaan. Perlunya peningkatan pada hal tersebut agar target penanggulangan bencana dapat terlaksana secara maksimal.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya untuk pertanyaan, apa saja yang menjadi faktor pendorong proses kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan?

“Faktor pendorong dalam membangun kolaborasi bencana meliputi beberapa aspek kunci. Diantaranya adalah kepercayaan antar pemangku kepentingan, komitmen terhadap tujuan bersama, kejelasan dalam tata kelola, akses terhadap otoritas, dan pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi. Selain itu, keterbukaan dalam berbagi informasi, dialog tatap muka, dan pemetaan potensi risiko bencana juga berperan penting.”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“Apabila komitmen bersama, kepercayaan antarpihak, kejelasan tata kelola, akses terhadap informasi dan kebijakan, serta dukungan logistik dan pendanaan berjalan dengan baik maka penanggulangan bencana akan terwujud sesuai dengan harapan.”
Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)

“tujuan yang sama ,pemahaman yang sama , kejelasan dalam kegiatan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi faktor pendorong proses kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“tujuan yang sama ,pemahaman yang sama, kejelasan dalam kegiatan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi faktor pendorong proses kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Apabila komitmen bersama, kepercayaan antarpihak, kejelasan tata kelola, akses terhadap informasi dan kebijakan, serta dukungan logistik dan pendanaan berjalan dengan baik maka penanggulangan bencana akan terwujud sesuai dengan harapan.”
Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)

“Keterbukaan, komunikasi dan leadership menjadi faktor pendorong bagi terciptanya kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“beberapa faktor pendorong antara lain faktor pendorong pertama adalah komitmen bersama. Dengan komitmen akan lebih mudah untuk melangkah dan menrencanakan serta mengimplementasikan program yang berkenaan dengan upaya penanggulangan bencana, Struktur organisas, jika struktur pentahelix sudah baik akan lebih mudah untuk mecapai upaya penanggulangan bencana, Fasilitas akan mempermudah untuk mendukung dalam upaya PB, Keterbukaan komunikasi antar pelaku akan mendorong faktor kolaborasi antar pentahelix.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Keterbukaan dan transparansi akan menjadi faktor pendorong disamping itu juga leadhershship menjadi faktor utama. Dengan leadhershship yang baik akan membangun trust bagi perusahaan lainnya” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Keterbukaan dan transparansi akan menjadi faktor pendorong disamping itu juga leadhershship menjadi faktor utama. Dengan leadhershship yang baik akan membangun trust bagi perusahaan lainnya” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Faktor pendorong pertama adalah komitmen bersama. Dengan komitmen akan lebih mudah untuk melangkah dan menrencanakan serta mengimplementasikan program yang berkenaan dengan upaya penanggulangan bencana, Struktur organisas, jika struktur pentahelix sudah baik akan lebih mudah untuk mecapai upaya penanggulangan bencana, Fasilitas akan mempermudah untuk mendukung dalam upaya PB, Keterbukaan komunikasi antar pelaku akan mendorong faktor kolaborasi antar pentahelix.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“tujuan yang sama ,pemahaman yang sama, kejelasan dalam kegiatan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan menjadi faktor pendorong proses kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan, apakah masyarakat di Kecamatan Ngaliyan sudah puas terhadap upaya penanggulangan bencana melalui mitigasi yang sudah dilakukan oleh semua unsur pentahelix?

“Puas dan tidak puas belum dapat dinilai secara obyektif karena belum ada satu lembaga yang melakukan penilaian kepada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dalam upaya PB. Akan tetapi kami dan jajaran unsur pentahelix bekerja keras dalam upaya penanggulangan bencana sehingga jika terjadi bencana tidak menimbulkan korban jiwa dan kehilangan harta benda yang masif. Upaya preventif terus kami lakukan agar ketangguhan masyarakat Kecamatan Ngaliyan semakin baik.” *Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)*

“Masyarakat Kelurahan Bringin menurut saya sudah puas karena sering diadakannya peningkatan kapasitas SDM agar masyarakat paham akan bencana.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“masyarakat kelurahan kalipancur sudah puas karena dalam kegiatan upaya penanggulangan bencana masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan mitigasi” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“masyarakat kelurahan kalipancur sudah puas karena dalam kegiatan upaya penanggulangan bencana masyarakat selalu dilibatkan dalam kegiatan mitigasi.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Masyarakat Kelurahan Bringin menurut saya sudah puas karena sering diadakannya peningkatan kapasitas SDM agar masyarakat paham akan bencana.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“Saya tidak dapat berkomentar karena kami ada di wilayah kelurahan, jika pertanyaanya warga kelurahan wonosari, kami cukup percaya diri masyarakat puas terhadap upaya Penanggulangan Bencana karena kami selalu hadir dalam bencana yang terjadi di wilayah kami” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Menurut kami, puas karena upaya untuk penanggulangan bencana intens dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Sangat puas karena PT Indofood selalu memberikan dukungan dan bantuan setiap kali ada bencana tanpa pilih-pilih dan hanya melalui telepon saja bantuan langsung dikontribusikan karena sudah terbangun kepercayaan apalagi dengan FPRB yang jelas kegiatannya” *PT. Indofood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Sangat puas karena PT. Sango selalu memberikan dukungan dan bantuan setiap kali ada bencana tanpa pilih-pilih dan hanya melalui telepon saja bantuan langsung didistribusikan karena sudah terbangun kepercayaan apalagi dengan FPRB yang jelas kegiatannya” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Menurut kami, puas karena upaya untuk penanggulangan bencana intens dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Upaya penanggulangan bencana dilakukan secara struktur dan sesuai kebutuhan lapangan, dengan melibatkan semua unsur yang teras bahu membahu menangani dampak bencana, puas atau tidak puas menurut kami sangat relatif. Sekali lagi untuk menilai kepuasan masyarakat perlu survey agar pendapatan kepuasan dapat obyektif bukan subyektif.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Uraian jawaban dari pertanyaan selanjutnya adalah menurut bapak atau ibu, apakah sudah ada integrasi perencanaan program dari masing-masing unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana?

“Integrasi perencanaan ada dalam perencanaan musrenbang, setiap tahapan musrenbangkel, kami meminta adanya pelibatan unsur pentahelix yang ada di kelurahan masing-masing sehingga rencana aksi dalam penanggulangan bencana baik basis mitigasi struktural dan mitigasi non struktural dapat masuk dalam musrenbangkel, disamping itu kami juga mengoptimalkan CSR

untuk ikut dalam upaya PB di Wilayah Kecamatan Ngaliyan.”
Camat Ngaliyan (DR. Moeljanto, SE. KP.MM)

“Dari masing masing unsur pentahelix sudah ada integritas perencanaan baik mitigasi struktural maupun non struktural sesuai dengan rencana aksi penanggulangan bencana dan sesuai perencanaan masing - masing untuk mengoptimalkan CSR dalam upaya Penanggulangan Bencana.” *Lurah Bringin (Rusly Iswantoro)*

“integrasi perencanaan program dimasing - masing unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana ada dalam perencanaan musrenbang setiap tahapan sehingga rencana aksi dalam penanggulangan bencana mitigasi masuk dalm musrenbangkel dan mengoptimalkan CSR untuk ikut berperan didalamnya” *Lurah Kalipancur (Anggun Budi Pramono)*

“integrasi perencanaan program dimasing - masing unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana ada dalam perencanaan musrenbang setiap tahapan sehingga rencana aksi dalam penanggulangan bencana mitigasi masuk dalm musrenbangkel dan mengoptimalkan CSR untuk ikut berperan didalamnya.” *Lurah Bambankerep (Agung Susilo)*

“Dari masing masing unsur pentahelix sudah ada integritas perencanaan baik mitigasi struktural maupun non struktural sesuai dengan rencana aksi penanggulangan bencana dan sesuai perencanaan masing - masing untuk mengoptimalkan CSR dalam upaya Penanggulangan Bencana.” *Lurah Tambakaji (A. Agus Maryanto)*

“integrasi perencanaan saya kira sudah ada dan sudah berintergarsi antar pentahelix dan perencanaan program sesuai daring masing - masing unsur dengan tujuan sama yaitu penanggulangan bencana” *Lurah Wonosari (Dimas Nofa Sansoyo)*

“Tidak semua wilayah (kelurahan) sudah mengintegrasikan perencanaan program penanggulangan bencana dengan murenbangkel. Akan tetapi jika kita melihat hasil musrenbangkel dan murenbangkec kegiatan mitigasi struktural sudah cukup banyak dalam upaya PB.” *UIN Walisongo (Margono)*

“Integrasi perencanaan dari masing-masing unsur pentahelix belum maksimal. Hal tersebut terbukti perencanaan kami juga belum mengundang seluruh stakeholders dalam perencanaan satu tahun kedepan” *PT. Infood Sukses Makmur (Punjung Riyana)*

“Integrasi perencanaan program jelas ada kalau di kelurahan atau kecamatan PT. Sango juga dilibatkan untuk mensupport dalam penanggulangan bencana sebagai CSR tetap” *PT. Sango Ceramics Indonesia (Urip Santoso)*

“Tidak semua wilayah (kelurahan) sudah mengintegrasikan perencanaan program penanggulangan bencana dengan murenbangkel. Akan tetapi jika kita melihat hasil musrenbangkel dan murenbangkec kegiatan mitigasi struktural sudah cukup banyak dalam upaya PB.” *FPRB Kecamatan Ngaliyan (Bambang Kristiono)*

“Integrasi perencanaan program dimasing - masing unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana ada dalam perencanaan musrenbang setiap tahapan sehingga rencana aksi dalam penanggulangan bencana mitigasi masuk dalam musrenbangkel dan mengoptimalkan CSR untuk ikut berperan didalamnya.” *Wartawan Suara Merdeka (Salman Daryono)*

Tujuan dari tatakelola kolaboratif yang melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan adalah menciptakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien. tatakelola kolaboratif semacam ini harus didasarkan pada kebijakan dan peraturan, struktur, mekanisme, program, dan kegiatan yang meyakinkan dan koheren, serta akuntabel. Hasil dari kajian yang dilakukan terkait dengan efektifitas kolaborasi pentahelix masih kurang efektif, sebagai mana dikemukakan oleh Tangkilisan (2005: 156) faktor yang berpengaruh pada efektivitas, yaitu: Struktur organisasi, merupakan sistem pengelompokan

pekerjaan yang ditata dalam suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakan secara maksimal dalam suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Adanya kerja sama, yang merupakan unsur terpenting dalam organisasi, karena dengan adanya hubungan/kerja sama yang baik, maka keberhasilan pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat. Dalam perjalanannya peran dari lima unsur *pentahelix* masih ada yang belum memberikan peran secara maksimal.

Hasil dari penelitian secara *etnografi*, adanya ketidakefektifan dari masing-masing unsur *pentahelix* (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa) yang ada di Kecamatan Ngaliyan sebagaimana konsep peran dari unsur yang ada. Berdasarkan beberapa penjelasan informan, setidaknya ketidakefektifan itu terdiri dari beberapa *point* diantaranya;

1. Peran akademisi yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan (Universitas Islam (UIN) Walisongo, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unnes, Institut Teknologi Statistika dan Bisnis (ITESA) Muhammadiyah Semarang masih belum memberikan kontribusi yang nyata sebagaimana tugas dan fungsi akademisi sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanggulangan bencana. Akademisi yang ada belum mampu memberikan kontribusi secara langsung dalam upaya mitigasi bencana di Kecamatan Ngaliyan, walaupun sudah masuk

dalam struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan Ngaliyan.

2. Begitu juga dengan potensi dunia usaha yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Potensi Kawasan Industri Candi dan Kawasan Industri Tambak Aji (juga dikenal sebagai Kawasan Industri Guna Mekar Indonesia/GMI) masih belum memberikan kontribusi yang nyata. Kawasan Industri Candi adalah kompleks industri terpadu yang menaungi berbagai jenis pabrik dan pergudangan, sementara Kawasan Industri Tambak Aji adalah kompleks pergudangan yang dikenal bebas banjir. Kontribusi nyata yang sudah dilakukan selama ini, baru ada dua perusahaan swasta yang ikut terlibat secara langsung dalam proses kolaborasi untuk penanggulangan bencana yakni PT. Sango Ceramics Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk akan tetapi peran tersebut belum efektif dalam upaya penanggulangan bencana. Kontribusi yang sudah dilakukan Perlunya optimalisasi peran perusahaan swasta untuk mendukung upaya perubahan atau pengembangan sumber daya manusia dalam rangka kerjasama dengan pemerintah. Perusahaan juga dapat mendukung kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pendapatan dana dalam pelbagai kegiatan untuk penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan

3. Perencanaan anggaran dari Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan masih berfokus dalam upaya mitigasi struktural (lebih dominan), hal tersebut dapat di lihat dari data awal yang sudah disajikan dalam penelitian ini, sedangkan upaya mitigasi non struktural belum menjadi *basic need* dalam perencanaan untuk penanggulangan bencana. Mitigasi non struktural sangat penting untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui kebijakan, peraturan, penyebaran informasi, dan pemberdayaan kapasitas masyarakat agar mereka mampu mengenali, mencegah, dan merespons dampak bencana secara efektif, baik melalui upaya preventif maupun responsif.

5.1.2. Faktor faktor penghambat dan pendorong dari efektivitas kolaborasi unsur pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan

Faktor pendorong merupakan segala sesuatu yang memicu, memotivasi, atau memperkuat terjadinya suatu kegiatan, perilaku, atau kondisi dalam masyarakat, seperti dalam konteks migrasi, perubahan sosial, atau integrasi sosial. begitu juga dengan faktor penghambat yang akan selalu timbul dalam kolaborasi pentahelix ini. Beberapa faktor pendorong dari kolaborasi antara lain;

1. Kepercayaan antar pemangku kepentingan, komitmen bersama terhadap tujuan yang hendak dicapai
 2. Kejelasan dalam tata kelola, akses terhadap otoritas dan pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi.
 3. Keterbukaan komunikasi antar pelaku dalam berbagi informasi, dialog tatap muka, dan pemetaan potensi risiko bencana.
 4. Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menjelaskan pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas serta tanggung jawab dalam suatu organisasi.
 5. Fasilitas atau sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana
- Sedangkan beberapa faktor penghambat timbulnya kolaborasi pentahelix di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang antara lain;

1. Kurangnya koordinasi antar lembaga
2. Perbedaan kepentingan antar pihak
3. Keterbatasan sumber daya
4. Selain itu, kesenjangan informasi dan kurangnya kepemimpinan yang fasilitatif.
5. Sering gonta ganti pemangku wilayah

5.2. Pembahasan

5.2.1. Kajian Efektivitas Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Efektivitas kolaborasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas kolaborasi salah satunya melalui pendekatan sasaran (*goal approach*). Yang dimaksud dengan sasaran (*goal*) adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh satu/gabungan organisasi yang memiliki *goal* bersama. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek juga mencakup sasaran dari keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan mengemukakan bahwa sasaran efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir

Dalam penjelasan efektivitas kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan dapat dilihat dari kemampuan dan kemauan dari masing-masing unsur pentahelix untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan bencana di kecamatan tersebut. Hasil dari pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan beberapa sumber laporan keuangan dan kegiatan, terakumulasi dana sebesar **Rp. 21.741.938.000,00** (*Dua Puluh Satu*

Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) hasil dari penganggaran tahun 2023 sampai dengan 2024. Efektivitas kolaborasi dapat terjalin karena adanya kontribusi untuk saling bahu membahu memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi struktural meliputi (Pembangunan Drainase, Pembangunan Talud, Pembangunan tebing, bronjong dll) dan mitigasi non struktural meliputi (Peningkatan Kapasitas Pengurus FPRB, Sosialisasi Petabencana.id, Pelatihan DU dan Sosialisasi Peta bencana, Pembentukan KSB, Pelatihan dan simulasi pemadam kebakaran, Kajian Risiko Bencana dan Peta BKRK, Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana dll).

Tabel IV.18

Rekap Hasil Kolaborasi Pentahelix

No	Lembaga/Organisasi	Tahun	Jenis Bantuan	Estimasi Anggaran	Keterangan
1	Pemerintah Kecamatan Ngaliyan/Dinas terkait	2023-2024	Struktural/Fisik	12.647.400.003	
2	Pemerintah Kecamatan Ngaliyan	2023-2024	Non Struktural/Sosial	143.793.500	
3	Kelurahan Kalipancur, Bringin, Wonosari, Bampakerep, Tambakaji	2023-2024	Struktural/Fisik	8.592.579.997	
4	Kelurahan Kalipancur, Bringin, Wonosari, Bampakerep, Tambakaji	2023-2024	Non Struktural/Sosial	154.500.000	
5	FPRB Kecamatan Ngaliyan	2023-2024	Non Struktural/Sosial	107.129.000	
6	Dunia Usaha	2023-2024	Non Struktural/Sosial	96.535.500	
7	Media Massa	2023-2024	Non Struktural/Sosial		Peliputan dan penyebaran kegiatan
Jumlah					

	21.741.938.000	
--	----------------	--

Sumber : Hasil Laporan Keuangan dan Kegiatan, 2025

Strategi yang melibatkan kerjasama antara lima elemen penting dalam unsur pentahelix meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha (swasta), dan media untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak saja merupakan upaya komprehensif untuk ketangguhan kecamatan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan dan keahlian demi mencapai tujuan. Efektifitas dari kolaborasi itu dapat dilihat dari adanya peran dari masing-masing unsur yang berkontribusi pada upaya mitigasi pra bencana. Perencanaan penganggaran dari masing-masing unsur dalam pentahelix menunjukkan adanya kepedulian untuk mencegah dampak bencana.

5.2.2. Kajian Faktor pendorong dan faktor penghambat dari efektivitas kolaborasi unsur *pentehelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Faktor pendorong merupakan segala sesuatu yang memicu, memotivasi, atau memperkuat terjadinya suatu kegiatan, perilaku, atau kondisi dalam masyarakat, seperti dalam konteks migrasi, perubahan sosial, atau integrasi sosial. Banyak faktor pendorong menjadi salah satu *point* untuk menggerakkan organisasi untuk ikut terlibat dalam upaya

penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan. Faktor pendorong dalam membangun kolaborasi bencana meliputi beberapa aspek kunci. Beberapa faktor pendorong hasil dari wawancara dengan informan yang adalah sebagai berikut;

- a. Kepercayaan antar pemangku kepentingan, komitmen bersama terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan komitmen bersama akan lebih mudah untuk melangkah dan merencanakan serta mengimplementasikan program yang berkenaan dengan upaya penanggulangan bencana. Kesamaan jenis ancaman yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Ngaliyan adalah bencana Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Gedung, Angin Puting. Namun hasil dari penilaian/perengkian jenis bencana yang sering terjadi adalah banjir, hal tersebut lebih disebabkan wilayah Kecamatan Ngaliyan dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin. DAS Beringin acapkali meluapkan banjir saat intensitas hujan yang tinggi dengan intensitas hujan tinggi 2-3 jam, Penyempitan DAS Beringin, Irigasi saluran air perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sepadan DAS yang digunakan untuk perumahan/pertanian serta kekurangan resapan, pendangkalan DAS Beringin itu sendiri.

- b. Kejelasan dalam tata kelola, akses terhadap otoritas dan pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi. Kejelasan tentang tata kelola sangat penting agar semua pihak yang terlibat dapat memahami peran dan fungsi masing-masing dalam upaya aksi penanggulangan bencana
- c. Keterbukaan komunikasi antar pelaku dalam berbagi informasi, dialog tatap muka, dan pemetaan potensi risiko bencana juga berperan penting untuk mendorong kolaborasi pentahelix
- d. Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menjelaskan pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas serta tanggung jawab dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini mengatur hubungan hierarkis, aliran informasi, dan jalur wewenang, sehingga setiap individu/organisasi yang berkepentingan mengetahui peran dan tanggung jawabnya, yang memungkinkan operasi menjadi lebih efisien, komunikasi yang terarah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan struktur organisasi pentahelix yang baik akan lebih mudah untuk mencapai upaya penanggulangan bencana
- e. Fasilitas penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendorong kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana. Fasilitas ini mencakup tempat atau sekretariat bersama yang digunakan untuk mengelola berbagai urusan administratif,

keuangan, rebug bersama sehingga mendukung kelancaran operasional organisasi, termasuk pengelolaan surat dan dokumen, penyusunan program dan anggaran, koordinasi kegiatan, serta penyediaan dukungan administrasi dan teknis lainnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan kolaborasi pentahelix di Kecamatan Ngaliyan dalam rangka penanggulangan bencana ada beberapa point hasil dari kajian. Penghambat atau kendala adalah segala sesuatu yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya suatu tujuan atau sasaran dalam sebuah kegiatan. Kendala bisa bersifat internal atau eksternal dan sering kali membutuhkan perencanaan yang matang serta strategi yang tepat untuk mengatasi atau memitigasi sehingga target – target yang sudah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Dalam upaya membangun kolaborasi untuk mendukung optimalisasi penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan juga tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Kendala tersebut pasti akan muncul karena unsur pentahelix memiliki struktur organisasi masing-masing, goal organisasi yang berbeda serta jalur hirarki organisasi yang berbeda pula.

Upaya agar kendala dalam membangun kolaborasi dapat terminimalisir diperlukan langkah-langkah melalui identifikasi masalah yang jelas, pengembangan rencana tindakan yang realistis, menetapkan

tujuan dan peran yang jelas, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, mengembangkan kepercayaan lintas organisasi yang masuk dalam kolaborasi *pentahelix* serta mendorong empati dan sikap terbuka terhadap perbedaan ide, dan menggunakan alat yang tepat untuk memfasilitasi kerja sama. Selain itu, jadikan proses belajar dan berkembang bersama sebagai bagian dari budaya kolaborasi, serta sediakan lingkungan dan fasilitas yang mendukung kerja tim secara efektif.

Beberapa kendala dalam upaya membangun kolaborasi *pentahelix* untuk penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan hasil dari wawancara mendalam dengan beberapa informan adalah sebagai berikut;

- a. Kurangnya koordinasi antar lembaga, faktor ini menjadi sesuatu yang mendasar terjadinya kendala dalam upaya membangun kolaborasi *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan.
- b. Perbedaan kepentingan antar pihak, situasi ketika beberapa individu, kelompok, atau institusi memiliki tujuan, kebutuhan, atau nilai yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain, yang dapat memicu ketegangan, konfrontasi, atau jika tidak dikelola dengan baik.
- c. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran situasional, serta perbedaan budaya organisasi.

- d. Selain itu, kesenjangan informasi dan kurangnya kepemimpinan yang fasilitatif juga dapat menghambat upaya kolaborasi pentahelix di dalam upaya penanggulangan bencana.
- e. Sering gonta ganti pemangku wilayah, hal tersebut menjadikan komunikasi akan dimulai dari awal sedangkan pemangku wilayah lama terkadang sudah berfikir jauh, Pemangku wilayah baru acap kali tidak *aware* terhadap upaya Penanggulangan Bencana, Karena pemangku wilayah baru, maka program Penanggulangan Bencana tidak mendapatkan suport sehingga target tidak dapat maksimal

Upaya membangun kolaborasi yang diawali dengan dialogue/tatap muka pada pihak yang berkepentingan (Pentahelix) di Kecamatan Ngaliyan untuk membangun pemahaman bersama dalam upaya penanggulangan bencana serta memberikan ruang yang cukup untuk berpendapat dalam ruang musyawarah atau rembug diikuti implementasi penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadikan sinergitas antar pelaku kolaborasi saling percaya. Dampak dari mitigasi struktural (infrastruktur) adalah mengurangi kerentanan dan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur fisik dan rekayasa teknis guna meminimalkan dampak bencana, seperti kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerugian ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan cara membangun prasarana yang kuat dan tahan bencana.

Sedangkan dampak dari kolaborasi basis mitigasi nonstruktural (sosial) mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana dan meningkatkan ketahanan mereka melalui berbagai upaya non-fisik seperti kebijakan, peraturan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, dengan sasaran akhir mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Kemudian untuk mengetahui komparasi antara hasil penelitian dengan hasil observasi/pengamatan dan temuan teori yang relevan dapat disajikan dalam matrik triangulasi data. Matrik tersebut merupakan strategi untuk menguji suatu fenomena penelitian dari berbagai sudut pandang, sumber data, metode, atau teori guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengurangi bias dan subjektivitas, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan akurat terhadap subjek penelitian. Dengan matrik triangulasi data akan mempermudah untuk membandingkan antara hasil penelitian, hasil observasi/pengamatan dan temuan teori yang relevan terhadap focus penelitian.

Berikut hasil matrik triangulasi data dari judul penelitian tentang efektivitas kolaborasi *pentahelix* dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

No	Focus	Hasil Penelitian	Hasil Observasi/Pengamatan	Temuan Teori Yang Relevan
1	Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka)	<p>Proses dari kolaborasi antar pemangku kepentingan berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi tersebut. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen antar pihak. Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Dialog tatap muka (<i>face to face dialogue</i>) mempertemukan pemangku kepentingan yang menjadi pelaksana dalam upaya penanggulangan bencana. Kegiatan dialog mempertemukan unsur pentahelix meliputi unsur Pemerintah (Pemerintah Kecamatan Ngaliyan, Masyarakat (Forum PRB Kecamatan Ngaliyan, Dunia Usaha (PT Sango Ceramics Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur), Akademisi (UIN Walisongo) dan Pewarta (Suara Merdeka). Disamping unsur yang telah disebutkan keterlibatan dari Koramil Ngaliyan dan Polsek Ngaliyan serta unsur keagamaan yang ada di kecamatan Ngaliyan. Tema dalam proses dialog adalah membangun kolaborasi untuk penanggulangan bencana yang ada di Kecamatan Ngaliyan, Potensi kolaborasi yang terdiri dari swadaya masyarakat, penganggaran musrenbangkel, Aspirasi serta <i>corporate social responsibility</i> serta potensi lainnya. Tema lainnya adalah membangun komitmen warga dalam upaya membentuk Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)</p>	<p>Kegiatan awal dalam upaya membangun kolaborasi pentahelix di Kecamatan Ngaliyan dilakukan beberapa kali tatap muka atau <i>face to face</i> antar pelaku pentahelix. Pertemuan secara formal dan informal dilakukan untuk tetap berkomunikasi membangun jejaring Kolaborasi. Pertemuan dilakukan dengan melibatkan Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat yang terwakili FPRB, Forum LPMK Kecamatan Ngaliyan, Dunia usaha yang di wakili PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sango Ceramics Indonesia, UIN Walisongo, Wartawan Suara Merdeka dan Kwarcab Kota Semarang. Proses kolaborasi tatap muka sudah berjalan beberapa kali, namun proses tersebut tidak terdokumen dalam berita acara yang tertanda tangani.</p>	<p>Menurut Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan terdapat 5(lima) indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain: Face to face dialogue (dialog tatap muka), Trust Building (membangun kepercayaan), Commitment to The Process (komitmen terhadap proses), Shared Understanding (pemahaman bersama), Intermedite outcome (pencapaian hasil). Face to face dialogue (dialog tatap muka) Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman Bersama, dan komitmen terhadap prosrs dari sebuah kolaborasi akan yang direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2007:558). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejala dalam proses berjalannya suatu kolaborasi</p>

2	<p><i>Trust Building (membangun kepercayaan)</i></p>	<p>Kegiatan sosialisasi digunakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan program dalam upaya mitigasi bencana melalui kolaborasi. Kegiatan penyusunan rencana teknis dan aksi pemasaran sosial dilaksanakan dengan skenario gambar disain before-after diharapkan mempermudah komunikasi dengan mitra potensial dalam rangka penawaran ide dan gagasan penanganan kumuh. Sosialisasi tersebut juga digunakan untuk membuat komitmen bersama antar pemangku kepentingan agar target yang sudah disepakati dapat dilaksanakan masing-masing pihak. Beberapa komitmen itu diantaranya adalah kegiatan pra bencana yakni pelatihan dan simulasi bencana yang dilaksanakan di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan hasil kerjasama dengan unsur pentahelix. Komitmen bersama lainnya adalah terbentuknya relawan yang peduli terhadap keadaan kegawatdaruratan yang mana masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan sudah terbentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB). Di samping terbentuk KSB juga terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di enam kelurahan yang berfungsi untuk membangun kerjasama dengan leading sektor yang ada di kelurahan tersebut dalam upaya memaksimalkan penanggulangan bencana. eberapa langkah yang sudah dilakukan terkait dengan model komitmen bersama atau sinergitas antar pihak adalah dengan mengoptimalkan peran masing-masing untuk memastikan perencanaan dalam upaya penanggulangan bencana dapat disepakati dalam musrenbang untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Usulan dari tingkat basis RT (yang memiliki permasalahan infrastruktur yang belum maksimal) menjadi prioritas dalam usulan musrenbang, sehingga upaya mitigasi struktural dapat tercapai demi terciptanya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.</p>	<p>Upaya membangun kepercayaan beberapa sektor dalam kerangka kolaborasi pentahelix sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan rembug atau musyawarah dan kegiatan lainnya. Komitmen bersama juga sudah terbangun antara Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Masyarakat yang terwakili FPRB, Forum LPMK Kecamatan Ngaliyan, Dunia usaha yang di wakili PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Sango Ceramics Indonesia, UIN Walisongo, Wartawan Suara Merdeka dan Kwardcab Kota Semarang. Sayangnya pada takaran implementasi semua unsur belum berperan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut perlunya meningkatkan komunikasi dan interaksi agar semua unsur yang masuk dalam kerangka pentahelix dapat berperan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga trust di internal unsur pentahelix dapat meningkat</p>	<p>Menurut Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain: Trust Building (membangun kepercayaan). Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena dalam sebuah kolaborasi bukan hanya terkait tawar-menawar, namun juga menyangkut tentang pembangunan sebuah kepercayaan pada masing-masing stakeholders yang terlibat. Kepercayaan tidak akan langsung hadir begitu saja, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena kepercayaan akan sangat berguna dalam jangka panjang pada proses kolaborasi.</p>
---	--	---	--	---

3	Commitment to Process (komitmen bersama)	<p>Upaya untuk membangun komitmen bersama melalui beberapa langkah antara lain; Pertama, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang tujuan bersama yaitu Ketangguhan kecamatan Ngaliyan. Kedua, komunikasi yang efektif dan terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan pandangan. Ketiga, menciptakan lingkungan yang positif dan suportif, di mana setiap unsur pentahelix merasa dihargai dan termotivasi sangat penting untuk menjaga komitmen. Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan komitmen tetap kuat dan relevan sehingga <i>goal gether</i> dapat tercapai secara maksimal. Bukti komitmen bersama adalah tertuangnya Dokumen Rencana Peanggulangan Bencana dari 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ngaliyan baru ada 6 Kelurahan yang sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) hasil dari program Katana. keenam kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Bringin, Kelurahan Tambakaji. Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Wates, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Wonosari. Dari enam kelurahan yang sudah memiliki dokumen RPB, beberapa sudah mengambil program-program mitigasi bencana dari dokumen RPB. Upaya mitigasi tersinkronisasi dengan dokumen tersebut walaupun ada hal baru yang tidak tertuang dalam dokumen RPB. Sedangkan 4 kelurahan yang belum melaksanakan Katana acuan dalam mitigasi bencana menggunakan pola FGD masyarakat yang biasa berkecimpung dengan kebencanaan.</p>	<p>Penanggulangan bencana secara maksimal masih menjadi tantangan tersendiri, kesiapsiagaan masyarakat masih belum terbangun secara maksimal. Kita masih sering diam dan tidak memaksimalkan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana saat sedang tidak adanya bencana. Penanggulangan bencana dilakukan pada saat tidak ada bencana saat kegawatdaruratan dan pasca bencana, mengingat banyaknya upaya yang harus dilakukan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi seluruh potensi yang ada di Kecamatan Ngaliyan. Proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana dalam hal komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh unsur pentahelix memiliki tujuan yang sama. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan berpadu dengan lembaga masyarakat, dalam hal ini kolaborasi pentahelix memiliki tujuan meningkatkan pemahaman kapasitas masyarakat seta meningkatkan kualitas permukiman sebagai upaya penanggulangan bencana.</p>	<p>Menurut Friend dan Cook (2010), setiap bentuk kolaborasi harus memiliki minimal lima komponen yang meliputi hal berikut. 1. Personal commitment (komitmen personal), yakni sebuah janji setia atau kepatuhan dari masing-masing anggota kolaborasi dalam menjalankan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 2. Communication skills (kemampuan berkomunikasi), yakni sebuah kemampuan para anggota dalam mengolah dan menyikapi berbagai informasi yang masuk, yang selanjutnya dikomunikasikan secara lugas, cepat, tepat, dan akurat kepada pihak policy maker agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi keberadaan dan proses kerja kolaborasi. 3. Interaction processes (proses interaksi), yaitu setiap anggota kolaborasi dituntut untuk saling berinteraksi secara efisien dan efektif, terkait dengan pelaksanaan kerja, baik atas pekerjaan yang bersifat routinized work maupun unroutinized work. 4. Program or services (program atau pelayanan), betapa dalam kehidupan kolaborasi itu semua pihak atau para anggota kolaborasi itu harus selalu bekerja berdasarkan program-program yang telah disusun secara sistematis dan prosedural serta selalu bersedia secara sukarela untuk saling memberikan pelayanan kepada semua anggota, terkait dengan pelaksanaan atau penyelesaian sebuah program tertentu. Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain: Commitment to The</p>
---	--	--	--	---

				<p>Process (komitmen terhadap proses) Tahapan terhadap proses mengembangkan sebuah keyakinan bahwa perundingan adalah sebuah cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kebijakan yang diinginkan dalam pemecahan suatu persoalan yang dihadapi. Komitmen dalam prakteknya membutuhkan suatu tahapan yang jelas, adil dan transparan dari masing-masing aktor yang terlibat.</p>
--	--	--	--	---

4	Shared Understanding (pemahaman bersama)	<p>Saling memahami antara pemangku kepentingan dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat tidaklah mudah, selain menyamakan persepsi agar satu frame dalam arti satu pandangan yang sama dalam penanggulangan bencana harus mempunyai satu misi yang jelas, dimana misi ini akan menjadi pegangan setiap pemangku kepentingan untuk melangkah ataupun mengambil tindakan bersama. Pemahaman bersama dalam upaya membangun kesepakatan unsur pentahelix dilakukan melalui kegiatan rembug atau musyawarah. Dengan pemahaman bersama maka akan tercipta kolaborasi, dimana kolaborasi harusnya menguatkan dan berperan secara komprehensif. Secara umum unsur pentahelix sudah melakukan kolaborasi, kolaborasi yang dilakukan memiliki peranya masing-masing walaupun masih ada beberapa yang belum berperan secara maksimal. Untuk mengoptimalkan kolaborasi dalam penanggulangan bencana, beberapa langkah strategis dilakukan antara lain ; membangun komunikasi yang efektif, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (pentahelix), serta memastikan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan melakukan evaluasi berkelanjutan.</p>	<p>Kolaborasi itu sendiri merupakan sebuah entitas sikap yang dilandasi oleh kesadaran kolektif dan kesepahaman atas permasalahan, yang perlu ditangani secara bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifar terbuka dan inklusif terutama saat penyusunan perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang disetiap tahapanya. Peran dari pemerintah Kecamatan Ngaliyan dalam upaya membangun pemahaman bersama untuk menggali potensi kolaborasi perlu ditingkatkan lagi agar semua stakeholders yang ada dalam kerangka pentahelix dapat berperan secara maksimal. Akademisi yang belum memberikan pemikiran-pemikiran ilmiahnya dalam upaya mitigasi bencana perlu digandeng lebih erat lagi agar pemahaman numerik masyarakat dalam lebih meningkat, begitu juga potensi CSR yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan perlu dimaksimalkan untuk mendukung rencana aksi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup harmonisasi dengan alam</p>	<p>Samatupang dan Sridharan (2008), kolaborasi merupakan upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan solusi untuk masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai bersama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Hal serupa diungkapkan oleh Leever (2010) yang menyatakan bahwa, kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan pemikiran oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan. Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, antara lain: Shared Understanding (saling memahami) Stakeholders dalam sebuah proses kolaboratif pada suatu titik tertentu membutuhkan pengembangan terhadap suatu proses pada pemahaman bersama dari apa yang dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama juga didefinisikan sebagai proses penyamaan pemahaman terkait suatu pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi.</p>
---	--	---	--	---

5	Intermedite outcome (pencapaian hasil)	<p>Pencapaian hasil dari sebuah kolaborasi adalah menurunnya tingkat kerawanan atau risiko di titik-titik yang berpotensi adanya ancaman bencana. Pentahelix yang menjadi ujung tombak memiliki peran dalam upaya ketangguhan masyarakat, beberapa peran dari unsur pentahelix antara lain; Pertama Peran Berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia infrastruktur serta sumber daya dalam penanggulangan bencana.</p> <p>Masyarakat: berperan sebagai akselerator, yaitu pelaku utama dalam aksi pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bencana. Akademisi: berperan sebagai konseptor dan inovator dalam pengembangan teknologi, penelitian, dan strategi penanggulangan bencana. Dunia Usaha: Berperan sebagai pendorong dalam penyediaan solusi inovatif, bantuan logistik, dan dukungan finansial dalam penanggulangan bencana. Media: berperan sebagai pengganda informasi, penyebar kesadaran, dan pengawas dalam proses penanggulangan bencana.</p>	<p>Pencapaian hasil dari sebuah kolaborasi adalah menurunnya tingkat kerawanan atau risiko di titik yang berpotensi adanya ancaman bencana. Kolaborasi yang selama ini sudah terjalin pada fase pra bencana adalah sosialisasi, pelatihan dan simulasi bencana sumber dari kolaborasi FPRB kecamatan Ngaliyan dengan Pemerintah Kecamatan Ngaliyan serta suport dana dari PT Sango Ceramics Indonesia. Sedangkan pendanaan dari musrenbangkel, Musrenbangkec dan bantuan dari dinas terkait lebih menyentuh pada aspek infrastruktur yang membutuhkan pembangunan untuk mengurangi ancaman di wilayah – wilayah rentan akan bencana. Fase kegawatdaruratan adalah fase paling “produktif” dimana semua berperan secara langsung untuk membantu rehabilitasi masyarakat yang terdampak bencana. Pencapaian hasil kolaborasi pentahelix perlu dimaksimalkan agar pencapaian hasil lebih maksimal terutama pada fase pra bencana, hal tersebut sangat penting agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat dapat meningkat. Pelatihan, sosialisasi dan simulasi bencana perlu terus dilakukan agar masyarakat saat terjadi bencana tidak gamang dan panik.</p>	<p>Menurut Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan indikator dari proses terbentuknya collaborative governance yang terjalin oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Intermediate Outcome (hasil akhir yang dicapai) Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam satu kolaborasi, perencanaan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing stakeholders guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Menurut Frederich, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu</p>
---	--	--	--	--

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Efektivitas kolaborasi pentahelix yang sudah terjalin di Kecamatan Ngaliyan masih kurang efektif, Peran akademisi masih belum memberikan kontribusi yang nyata sebagaimana tugas dan fungsi akademisi sebagai konseptor untuk membangun konsep, teori, dan model baru untuk membantu penanggulangan bencana. Begitu juga dengan optimalisasi dunia usaha yang ada di wilayah Kecamatan Ngaliyan yang masih belum tergarap dengan baik, sehingga peran dunia usaha untuk mendukung upaya perubahan atau pengembangan sumber daya manusia dalam rangka kerjasama dengan pemerintah masih kurang maksimal. Hal lain adalah penganggaran dari Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan masih berfokus pada mitigasi struktural (lebih dominan). Sedangkan upaya mitigasi non struktural belum menjadi *basic need* dalam perencanaan untuk penanggulangan bencana. Proses aktivitas para subjek pada kolaborasi pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana, perlunya menerapkan *network administrative organization* ditandai dengan adanya entitas administratif secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola “*network*” bukan sebagai “*service provider*”

2. Faktor Pendorong membangun kepercayaan diantara pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tidaklah mudah karena membangun kepercayaan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini dikarenakan dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus menerus). Beberapa point dari faktor pendorong terjadinya kolaborasi pentahelix di Kecamatan Ngaliyan dalam upaya penanggulangan bencana antara lain; Kepercayaan antar pemangku kepentingan, komitmen bersama, kejelasan dalam tata kelola, akses terhadap otoritas dan pemahaman bersama tentang pentingnya kolaborasi, keterbukaan komunikasi antar pelaku, struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menjelaskan pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas serta tanggung jawab, fasilitas penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendorong kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana. Keterlibatan kepentingan unsur kolaborasi pentahelix berpadu dengan lembaga masyarakat, dalam hal ini kolaborasi *pentahelix* masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat salah satu unsur kolaborasi pentahelix (akademisi) belum memberikan kontribusi secara nyata sebagai konseptor yang mengembangkan konsep, teori, dan pemikiran baru untuk membantu kegiatan unggulan dan mendukung tujuan. Beberapa faktor penghambat kolaborasi antara lain; Kurangnya

koordinasi antar lembaga, perbedaan kepentingan antar pihak, keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran situasional, serta perbedaan budaya organisasi, kesenjangan informasi dan kurangnya kepemimpinan, sering gonta ganti pemangku wilayah, hal tersebut menjadikan komunikasi akan dimulai dari awal sedangkan pemangku wilayah lama terkadang sudah berfikir jauh.

6.2 Saran

Dalam upaya meningkatkan kolaborasi untuk mendukung penanggulangan bencana tentu perlu adanya evaluasi yang mendalam. Kolaborasi yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan kebencanaan secara utuh. Berikut saran dari penulis terhadap penelitian ini:

1. Perlunya melakukan pendekatan intens terhadap potensi dari dunia usaha yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan melalui program sertifikasi yang mengakui dan memberikan insentif bagi dunia usaha yang memenuhi kriteria kesiapsiagaan bencana. *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan mampu mempercepat upaya penanggulangan kebencanaan. Berangkat dari kesadaran bahwa dana pemerintah hanya mampu mendukung sebagian dari pembiayaan proyek pembangunan, peran serta pihak swasta dapat termanifestasikan melalui skema kerja

sama (*public private partnership*) untuk ikut membantu pembangunan sektor vital yang ada di Kecamatan Ngaliyan. Basis data hasil kajian risiko bencana menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana musrenbang di tingkat kelurahan atau kecamatan. Sehingga penganggaran mitigasi bencana non struktural dalam perencanaan penganggaran menjadi prioritas yang tidak hanya pelengkap dalam dokumen musrenbang tersebut. Langkah lain yang tidak kalah penting dilakukan adalah mengoptimalkan peran pemerintah daerah (BPBD, Dinsos, DP3A, dll) serta kelompok sosial kemasyarakatan lainnya. Upaya menggandeng peran organisasi di luar Kecamatan Ngaliyan adalah agar penanggulangan bencana dapat lebih maksimal sehingga goal getther menuju Kecamatan Ngaliyan Tangguh Bencana dapat tercapai. Selain itu, pelibatan komunitas berperan sebagai titik kontak antar pemangku kepentingan agar semua proses kerjasama berjalan lancar dan media massa dapat mengambil peran sebagai *watchdog* untuk ikut mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau faktor terpenting dalam menyebarkan informasi, publikasi dan promosi.

2. Langkah yang dilakukan agar kolaborasi dapat berjalan lebih maksimal adalah perlu meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan melalui pertemuan-pertemuan intens baik formal maupun non formal dengan melibatkan seluruh forum pentahelix yang ada, sehingga

terumuskan pemahaman bersama sebagai rujukan komitmen agar terjadi keterbukaan komunikasi. Dalam upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat dari kolaborasi pentahelix, maka perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan lembaga-lembaga di Kecamatan Ngaliyan yang memiliki *interest* terhadap penanggulangan bencana. Disamping itu perlunya penyelenggaraan pelatihan/simulasi agar Sumber Daya Manusia dapat lebih tangguh untuk resilient di Kecamatan Ngaliyan. Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam upaya membangun kolaborasi *pentahelix* di Kecamatan Ngaliyan, sedapat mungkin menghindari pola kerjasama *inequal kolaboratif* yakni kondisi ketidaksetaraan atau kesenjangan, yang berarti akses yang tidak merata terhadap sumber daya, peluang maupun hak-hak sosial antar pelaku kolaborasi tersebut. Prinsip pelaksanaan yang *imperative* dan komunikasi yang *normative* tidak dapat mendukung terbentuknya kerjasama tersebut secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bencana, B. N. P. UU No 24 Tahun 2005. *Undang-undang 7*, 213–221 (2007).
- 2008, P. P. R. I. N. 21 T. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peratur. Pemerintah Republik Indones. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 49 المجلد*, 69–73 (2008).
- BNPB. Perka BNPB No 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penggulangan Bencana Tahun 2025 - 2029. *Rencana Nas. Penggulangan Bencana Tahun 2025 - 2029* (2025).
- Asmiddin, A., Sadat, A. & Basir, M. A. Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton. *J. Manaj. Bencana 8*, 71–82 (2022).
- Pasaribu, L. P., Apsari, N. C. & Sulastri, S. Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share Soc. Work J. 13*, 140 (2023).
- Putra Pratama, J., Dewo, L. P. & Rahmat, H. K. Model Sinergitas Pentahelix dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *J. Curr. Res. Disaster Response Emerg. Manag. e-ISSN xxxx-xxx 1*, 1–6 (2024).
- Ardiansyah, F. & Pradana, G. W. Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah Covid-19 Di Kabupaten Bojonegoro. *Publika 545–560* (2021) doi:10.26740/publika.v9n4.p545-560.
- Arfani, M. Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. *J. Syntax Transform. 3*, 104–120 (2022).
- Astuti, R., Warsono, H. & Rachim, A. Collaborative Governance dalam perspektif Administrasi Publik. *Collab. Govenance Dalam Perspefkit Publik 161* (2020).
- Engel. *gabungan Teori Administrasi. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2014).
- Yuniningsih, T. & Kharisma, D. Efektivita Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Maj. Kedokt. Indones. 54*, 283–288 (2017).
- Rahadian, A. H. Pengaruh disiplin dan motivasi kerja pegawai terhadap efektivitas kerja penanggulangan bencana alam di kecamatan sukamakmur kabupaten bogor. *J. Ilm. Ilmu Adm. VIII*, 187–207 (2016).
- Saleh, C. Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107 1*, 7–8 (2020).
- Malang, C. G. dalam P. K. T. K. (KOTAKU) di K. K. K. Angesti Widya Palupi. (2019).

- Maulana, D. *et al.* Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang mendirikan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). proses pembentukan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Hasil observasi dan riset dalam pelaksanaan k. **9**, 314–323 (2021).
- 2011, P. B. N. 15 T. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pendoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. *Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana* 219375 (2011).
- Widiatmika, K. P. Kajian Laporan Kolaborasi Pentahelix dalam Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning Sebuah Stud. Mengenai Koran Lampu Hijau* **16**, 39–55 (2015).
- Biro Hukum Kota Semarang. n 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. (2021).
- Agusta, I. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pus. Penelit. Sos. Ekon. Litbang Pertanian, Bogor*, 27 **02**, 59 (2003).
- DR. Moeljanto, S. K. M. Hasil Wawancara dengan Camat Ngaliyan. 1–9 (2025).
- Rusly Iswanto, S. Hasil Wawancara dengan Lurah Bringin. 1–6 (2025).
- Anggun Budi Pramono, S. Sos, . M.A.P. Hasil Wawancara dengan Lurah Kalipancur. 1–5 (2025).
- Agung Susilo, S. Hasil Wawancara dengan Lurah Bambangrejo. 3–8 (2025).
- A. Agus Maryanto, S. Hasil Wawancara dengan Lurah Tambakaji. 1–5 (2025).
- Dimas Nofa Sansoyo, S.IP,.MM, . M.Hum. Hasil Wawancara dengan Lurah Wonosari. 1–5 (2025).
- Margono. Hasil Wawancara dengan Perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. 2–7 (2025).
- Riyana, P. Hasil Wawancara dengan Perwakilan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. 1–5 (2025).
- Urip Santoso. Hasil Wawancara dengan Perwakilan PT Sango Ceramics Indonesia. 1–5 (2025).
- Bambang Kristiono, S. Hasil Wawancara dengan Ketua FPRB Kecamatan Ngaliyan. 1–9 (2025).
- Salman Daryono. Hasil Wawancara dengan Wartawan Suara Merdeka Semarang. 2–7 (2025).